

CITRA JAWA BARAT DALAM ARSIP



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, September, 2006

CITRA JAWA BARAT DALAM ARSIP

Sambutan Kepala Arsip Nasional RI



SAMBUTAN

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau, berbagai suku, agama dan budaya dalam perjalanan sejarahnya penuh dengan dinamika. Keindahan Indonesia terletak pada keberagaman tersebut dan warna pelangi yang disandangnya, seperti yang telah dipatrikan dalam semboyan **Bhinneka Tunggal Ika**. Keberagaman dan warna pelangi tersebut juga terekam pada arsip yang merupakan warisan nasional. Sehingga tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa : “Dari semua aset negara yang ada, arsip adalah aset negara yang paling berharga. Ia merupakan warisan nasional yang perlu dipelihara dan dilestarikan dari generasi ke generasi. Tingkat peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari pemeliharaan dan pelestarian arsipnya”.

Jawa Barat merupakan salah satu daerah penting di Indonesia. Dalam perjalanan sejarahnya hingga ia menjadi salah satu provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) penuh dengan dinamika. Dinamika tersebut juga terekam dalam arsip. Dari arsip-arsip yang disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) disusunlah suatu program, yang disebut dengan Program Citra Daerah.

Program Citra Daerah pada dasarnya merupakan kegiatan pengungkapan kembali memori kolektif daerah. Program ini dibuat untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai budaya bangsa dan nilai kebangsaan, memupuk rasa cinta tanah air dan mencegah disintegrasi bangsa. Hal ini didukung data dan fakta yang terkandung dalam arsip yang merefleksikan bagaimana suatu daerah ikut memberi warna dan corak dalam sejarah perjalanan bangsa dari masa ke masa. Dengan mencermati data dan fakta tersebut akan diperoleh informasi akurat dan obyektif mengenai peran masing-masing daerah dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI.

Materi Citra Daerah mencakup arsip yang berupa teks, peta, foto dan film sebagai satu kesatuan. Di dalamnya akan tampak sebuah dinamika kolektif menuju pembentukan bangsa dan negara Indonesia. Sebuah perjuangan kolektif yang terbentuk atas dasar kesadaran sejarah. Pengalaman sejarah suatu bangsa adalah riwayat hidup bangsa itu sendiri. Apapun pengalaman yang dialami, duka, nestapa, darah, nyawa, dan pengorbanan untuk mencapai kemerdekaan, mengisi dan mempertahankan kemerdekaan serta membangun bangsa dan negara yang dicita-citakan bersama terekam dalam arsip, yang merupakan memori kolektif bangsa. Sebagai memori kolektif, dan jati diri bangsa serta warisan nasional, arsip tersebut menurut undang-undang kearsipan disebut arsip statis. Dengan mencermati lembar demi lembar arsip yang disajikan dalam Citra Daerah ini, akan diperoleh gambaran tentang dinamika berbangsa dan bernegara.

Dengan semangat otonomi daerah dan dengan melihat latar belakang sejarah, Citra Daerah ini diharapkan dapat meluruskan dan meningkatkan pemahaman kita akan makna Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berayun ditengah derasnya arus globalisasi. Dengan demikian semangat otonomi daerah harus dipahami dalam makna yang bersifat integratif dan bukan disintegratif terhadap tatanan sosial budaya maupun politik kenegaraan

Perlu disampaikan disini bahwa karena berbagai keterbatasan, Citra Daerah ini barulah berisi sebagian kecil dari seluruh arsip yang disimpan di ANRI. Oleh karena itu Citra Daerah ini diharapkan dapat merangsang tumbuhnya program lanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Terima Kasih.

Jakarta, 19 September 2006

Kepala,

Djoko Utomo

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul_____	
Sambutan Kepala ANRI_____	i
Daftar Isi_____	iii
PENDAHULUAN _____	1
A. Latar Belakang _____	2
B. Letak Geografis _____	3
C. Perkembangan Awal Sejarah Jawa Barat_____	7
D. Periode Pergerakan Nasional _____	10
E. Periode Pendudukan Jepang_____	11
F. Periode Kemerdekaan RI _____	13
G. Jawa Barat dalam Khasanah Arsip_____	25
Daftar Pustaka_____	37
CITRA JAWA BARAT DALAM ARSIP _____	42
A. Geografis_____	39
B. Pemerintahan_____	47
C. Pertahanan dan Keamanan_____	71
D. Perekonomian dan Perindustrian _____	101
E. Pertanian dan Perkebunan _____	123
F. Pendidikan _____	138
G. Kesehatan_____	164
H. Infrastruktur _____	171
I. Irigasi_____	185
J. Pertambangan_____	190
K. Transportasi dan Komunikasi _____	193
L. Agama_____	207
M. Kebudayaan dan Olahraga_____	217
N. Lingkungan Hidup_____	231
DAFTAR ARSIP YANG DISERAHKAN _____	242
PENUTUP _____	273

Pendahuluan

CITRA JAWA BARAT DALAM ARSIP

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mewacanakan "daerah" sebagai kondisi dasar diharapkan akan membangunkan pemahaman kita tentang bangsa (*nation*), kebangsaan (*nasionalitas*) dan rasa kebangsaan (*nasionalisme*). Di masa lalu eksistensi daerah terbentuk karena ikatan kultural yang melekat pada wilayah dan masyarakatnya. Dalam perkembangannya eksistensi dan dinamika daerah diwujudkan pada kemandirian dan prakarsa daerah yang bersangkutan untuk memajukan masyarakat dan wilayahnya. Dalam konteks tersebut keberhasilan yang dicapai suatu daerah akan mencerminkan keberhasilan dalam membangun sebuah bangsa.

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang merupakan pengganti Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah diundangkan. Pelaksanaan Otonomi Daerah ini pada hakekatnya adalah sebagai suatu upaya untuk meningkatkan peran daerah dalam memberikan dan mendekatkan layanan masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan di daerahnya masing-masing secara optimal.

Salah satu aspek yang cukup mendasar dengan penerapan otonomi daerah berkenaan dengan fungsi kearsipan adalah kewenangan untuk mengelola arsip statis di daerah beralih dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) kepada Pemerintah Daerah. Untuk itu kepada daerah perlu diberikan informasi dari peristiwa masa lalu tentang daerah masing-masing agar daerah dapat mengembangkan upaya penyelamatan dan pelestarian arsip statis pada masa-masa berikutnya.

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, ANRI mencoba berperan aktif untuk memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat pelaksanaan Otonomi Daerah melalui Program Citra Daerah, yaitu penyerahan hasil alihmedia dari khasanah arsip statis yang tersimpan di ANRI kepada seluruh Provinsi di Indonesia. Salah satu Provinsi yang menerima Program Citra Daerah pada tahun 2006 ini adalah Provinsi Jawa Barat .

Arsip Jawa Barat yang diserahkan tersebut mencakup kurun waktu mulai awal abad ke-17 sampai dengan abad ke-20, yaitu sejak masa *Vereeniging Oost Indische Compagnie (VOC)* sampai dengan masa Republik Indonesia. Arsip yang diserahkan berisikan informasi tentang berbagai fenomena dan peristiwa yang terjadi di Jawa Barat pada periode tersebut. Citra Jawa Barat Dalam Arsip ini diharapkan dapat memupuk rasa cinta tanah air, berbangsa dan bernegara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bagi masyarakat Jawa Barat pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

B. Perkembangan Awal Sejarah Jawa Barat

Letak geografis Jawa Barat berada pada $5^{\circ} 50' \text{ LS} - 7^{\circ} 50' \text{ LS}$ dan $104^{\circ} 48' \text{ BT} - 108^{\circ} 48' \text{ BT}$. Wilayah Jawa Barat bagian utara berbatasan dengan Laut Jawa dan wilayah DKI Jakarta, di selatan dengan Samudra Indonesia, di sebelah barat dengan Provinsi Banten dan sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.

Jawa Barat termasuk daerah yang memiliki sejarah sosial yang tertua di Indonesia. Para ahli arkeologi menilai bahwa daerah Jawa Barat memiliki potensi yang tidak kecil sumbangannya bagi perjalanan sejarah manusia Indonesia dan kebudayaannya. Sebagai bagian dari Dataran Sunda yang muncul pada jaman *Mioceen* – sekitar 26 juta tahun yang lalu – setelah terbentuknya Dataran Asia, Jawa Barat terbilang cukup kaya

dengan peninggalan sejarah kepurbakalaannya. Beberapa situs penting yang memiliki potensi itu telah meninggalkan bukti-bukti jaman pra sejarah, misalnya banyak fosil binatang purba ditemukan di kawasan Jawa Barat terutama di wilayah Kabupaten Subang. Selain itu banyak ditemukan benda sejarah berupa alat-alat dari sekitar 600.000 tahun yang lalu, yaitu jaman ketika jenis manusia *Pithecanthropus Erectus* diperkirakan hidup.

Namun seperti daerah lainnya di Indonesia, bentuk kehidupan manusia baru diketahui secara lebih jelas mulai 2.000 tahun sebelum masehi, yaitu sejak terjadinya gelombang imigrasi besar-besaran dari Dataran Asia, tepatnya dari kawasan Selatan Cina. Mereka datang dengan membawa serta kebudayaannya, antara lain kemahiran membuat barang-barang dari logam.

Perkembangan jaman logam di Nusantara, termasuk Jawa Barat, telah membuka babak baru dalam perjalanan sejarah manusia Indonesia. Maka pada permulaan tarikh Masehi, penduduk Jawa Barat terutama yang menghuni daerah pesisir pantai, sudah berhubungan dengan dunia luar sehingga memungkinkan masuknya pengaruh kebudayaan Hindu dari India, yaitu dengan ditemukannya beberapa prasasti tertua di daerah Jawa Barat yang ditulis dalam huruf pallawa berbahasa Sansekerta, seperti yang ditemukan di tepi sungai Ciaruteun Bogor dan daerah Cilincing, Jakarta Utara. Kesemua prasasti itu menunjukkan bahwa di daerah tersebut ada sebuah kerajaan yang bernama **Tarumanegara** sebagai salah satu kerajaan Hindu tertua di Nusantara setelah Kutai, jauh sebelum munculnya kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit. Salah seorang raja yang memerintah kerajaan tersebut bernama **Purnawarman**. Dari prasasti yang berhasil ditemukan, dapat diduga bahwa kerajaan tersebut sudah ada sekitar pertengahan abad ke 5 dan runtuh pada abad ke 7.

Selain **Tarumanegara**, pada periode abad ke 1 hingga abad ke 15, di Jawa Barat juga diketahui berdiri kerajaan lain. Misalnya **Kerajaan Sunda**, **Kerajaan Galuh** yang berpusat di Ciamis, serta **Kerajaan Pajajaran**. Dengan ditemukannya prasasti Sanghyang Tapak di Kampung Pengcalihan dan Bantar Muncang, di tepi Sungai Citatih, Sukabumi menunjukkan bahwa di daerah Jawa Barat berdiri Kerajaan Sunda yang diperintah oleh **Maharaja Sri Jayabhupati Jaya Manahen Wisnu murti Samara wijaya Sakalabhuwana mandales WaraninditaHarogowardhana Wikramatunggadewa** dengan pusat kerajaannya adalah Pakuan Pajajaran (Bogor sekarang), tetapi tidak lama kemudian pindah ke Kawali (sekarang masuk Kabupaten Cirebon), kerajaan-kerajaan tersebut umumnya adalah kerajaan Hindu.

Memasuki abad ke 16, Jawa Barat mulai mengalami perubahan yang mencolok dalam kehidupan pemerintahan. Pada masa itu Pajajaran sebagai kerajaan Sunda terakhir yang masih berdiri, tampak makin memudar pamornya sebagai akibat adanya pemberontakan dan penyebaran agama Islam yang masuk melalui Banten dan Cirebon. Pada waktu itu Cirebon sudah dikuasai oleh **Susuhunan Gunung Jati**, sedangkan Banten dikuasai oleh pasukan dari Demak yang dipimpin oleh **Falatehan**.

Kekuatan Kerajaan Pajajaran digerogoti oleh serangkaian pemberontakan di daerah-daerah yang ingin melepaskan diri dari Pakuan, seperti Cirebon, Ciamis, Telaga, dan Banten. Beberapa daerah yang tadinya tunduk dan berada di bawah kekuasaan Pajajaran, satu persatu memberontak dan melepaskan diri. Seiring dengan itu, di kawasan Pantai Utara Jawa Barat, khususnya Banten dan Cirebon, pengaruh Islam mulai masuk yang segera disusul dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di dua kawasan tersebut. Tentu saja berdirinya kerajaan baru ini dengan

sendirinya diikuti oleh berbagai penaklukan ke daerah pedalaman Jawa Barat sekaligus untuk menyebarkan ajaran Islam.

Untuk menghadapi ancaman tersebut, pada tahun 1521 Kerajaan Pajajaran pada masa pemerintahan Surawisesa menjalin hubungan persahabatan dengan Portugis. Namun pada tahun 1527 pasukan Demak di bawah pimpinan Pangeran Cirebon, Dipati Keling dan Dipati Cangkuang berhasil menundukkan Sunda Kelapa dan mengganti nama menjadi Jayakarta dan Falatehan menjadi kepala Pemerintahan yang pertama di Bandar Sunda Kelapa.

Demikian pula setelah Sultan Maulana Yusuf dari Banten menyerang dan menaklukkan Pajajaran, sejak tahun 1596 Jawa Barat praktis dikuasai oleh dua kerajaan. Di bagian Barat (mulai Cianjur hingga Selat Sunda) oleh Kesultanan Banten, dan di bagian Timur (mulai Bandung hingga sungai Citanduy dan Cisanggarung) dikuasai Kesultanan Cirebon. Akhirnya satu persatu wilayah kekuasaan Pajajaran jatuh ke tangan para penguasa beragama Islam.

Kesultanan Banten pada masa pemerintahan Maulana Hasanuddin mengalami kemajuan pesat dan sejak itu menjadi pusat penyebaran agama Islam ke seluruh wilayah Pajajaran bahkan meluas sampai ke Lampung, Bengkulu dan daerah lainnya. Pada waktu itu Banten mengalami masa puncak kemegahan baik di bidang perekonomian, politik maupun kebudayaan terutama pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Sementara itu Jayakarta di bawah Pangeran Wijayakrama berkembang menjadi Bandar yang ramai dan menjadi pesaing Banten. Peperangan tak dapat dielakkan di antara mereka terutama setelah Belanda menguasai Jayakarta yang merubah namanya menjadi Batavia.

C. Pemerintahan dan Perkembangan Wilayah

Jawa Barat adalah daerah yang relatif strategis letaknya. Kawasan utara merupakan daerah dataran rendah, sedangkan daerah selatan berbukit-bukit dengan sedikit pantai serta di bagian tengah dataran tinggi dengan pegunungan yang membentang. Jawa Barat juga unggul secara ekonomis, karena kesuburan tanah dan kekayaan alamnya. Faktor-faktor inilah yang antara lain menarik perhatian berbagai bangsa asing seperti Belanda, Inggris dan Jepang untuk menguasainya.

Pada tanggal 25 Juni 1596, bangsa Belanda telah mulai menginjakkan kakinya di Jawa Barat ketika empat kapal dagang milik VOC berlabuh di Teluk Banten. Kemajuan kesultanan Banten merupakan tantangan dan hambatan baru bagi kompeni untuk memperluas wilayah pengaruhnya. Tiga belas tahun setelah menginjakkan kakinya di Jawa Barat, Belanda mulai mendirikan kastil-kastil di pelabuhan Sunda Kelapa yang sekaligus dijadikan sebagai pusat seluruh kegiatan perdagangannya. Pada masa itu, wilayah kekuasaan VOC meliputi Sunda Kelapa (kemudian Belanda mengubah namanya menjadi Batavia) dan wilayah sekitarnya yakni Tangerang bagian Timur dan Bekasi bagian Barat.

Dalam pada itu Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Sultan Agung juga tak luput berusaha untuk menguasai sebagian wilayah Jawa Barat, khususnya wilayah selatan sebelah Timur hingga Tengah. Penaklukan Mataram ke Jawa Barat dimulai tahun 1641 dan berlangsung selama kurang lebih 45 tahun.

Banten dapat dikuasai oleh kompeni yaitu dengan didudukinya Keraton Sulatan Agung Tirtayasa, sejak tahun 1686 seluruh Jawa Barat praktis telah dikuasai VOC (Cirebon ditaklukkan tahun 1681, Banten menyusul dua tahun kemudian, dan daerah-daerah yang dikuasai Mataram di Jawa Barat berhasil diambil alih sepenuhnya tahun 1686).

Setelah Jawa Barat dikuasai VOC, dengan sendirinya sistem dan pengaturan pemerintahan yang berlaku juga sepenuhnya ditentukan oleh VOC. Akan tetapi karena fungsi VOC pada dasarnya hanyalah sebuah perusahaan dagang, dalam kenyataan sehari-hari, tata pemerintahan belum banyak mengalami perubahan. Setidaknya VOC belum terlalu banyak mendikte dalam kehidupan pemerintahan sehari-hari kecuali yang berkaitan dengan kepentingan VOC secara langsung.

Namun ketika tahun 1799 VOC dibubarkan dan seluruh daerah yang tadinya dikuasai diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Belanda, kehidupan pemerintahan di Jawa Barat dengan sendirinya mulai mengalami beberapa perubahan. Perubahan pertama yang mencolok adalah menyangkut organisasi dan administrasi pemerintahan dengan pembentukan dua satuan wilayah pemerintahan (*gewest*), yaitu *Gewest* Batavia dan *Gewest* Cirebon. Seiring dengan itu, Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten juga dihapuskan, masing-masing pada tahun 1813 dan 1815.

Sejak abad ke XIX, Jawa Barat benar-benar telah sepenuhnya diatur oleh Pemerintah Belanda. Sistem dan struktur pemerintahan yang berlaku, sepenuhnya berdasarkan keinginan Belanda. Pada waktu itu pemerintah Belanda mengeluarkan ***Provincie Ordonantie*** yang menyatakan pembentukan Provinsi Pasundan yang kemudian diubah menjadi ***Provincie West Java***.

Jawa Barat mempunyai keistimewaan karena merupakan provinsi pertama yang dibentuk pemerintah Belanda di wilayah Indonesia (ketika itu masih bernama Hindia Belanda). Provinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Lembaran Negara (*Staatsblad*) nomor 378 tanggal 14 Agustus 1925 yang merupakan pelaksanaan janji pemerintah Kerajaan Belanda yang akan memberikan hak otonomi kepada pemerintah Daerah tersebut dan merupakan realisasi dari *Bestuursher-vormingswet* 1922 sebagai

penyempurnaan Undang-undang Desentralisasi yang dicanangkan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1903.

Dalam melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari, Belanda masih tetap memanfaatkan jaringan penguasa tradisional, seperti para patih/bupati. Kekuasaan mereka secara riil sudah tidak ada. Karena mereka berada di bawah sub ordinasi asisten residen/residen yang terdiri dari pejabat-pejabat Pemerintah Belanda.

Jawa Barat pada masa awal terbentuk atas wilayah yang terbagi dalam lima (5) karesidenan, yaitu Karesidenan Banten, Karesidenan Batavia, Karesidenan Bogor, Karesidenan Priangan dan Karesidenan Cirebon dengan 18 kabupaten dan empat (4) kotapraja (*stadsgemeente*) serta satu (1) kotapraja besar. Pada tingkat provinsi, pemerintahan dipegang oleh Dewan Provinsi (*Provincialeraad*) dan gubernur, dengan Ketua Dewan dipegang oleh gubernur. Di tingkat Kabupaten pemerintahan dilakukan oleh Dewan Kabupaten (*Regentschapsraad*) dan bupati, sedangkan pemerintahan kotapraja dilakukan oleh Dewan Kota (*Gemeenteraad*) dan walikota (*Burgemeester*), dengan Ketua Dewan dipegang oleh Walikota. Untuk anggota dewan ditentukan berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduknya, yang terdiri dari bangsa Belanda, Pribumi, Timur Asing (Cina dan Arab).

Dengan struktur pemerintahan seperti itu beberapa orang Pribumi Jawa Barat kemudian menjadi tokoh pergerakan nasional telah mendapat kesempatan memperoleh pelatihan politik dan administratif dengan menjadi anggota Dewan Kota, beberapa di antaranya M. Husni Thamrin, R.R. Kosasih Surakusumah, dan R. Otto Kusumasubrata. Sistem pemerintahan yang diberlakukan Belanda tersebut terus berlangsung hingga masuknya Jepang ke Indonesia.

D. Masa Pergerakan Nasional

Pada tahun 1901 Belanda mulai melaksanakan kebijakan baru di Indonesia yang disebut dengan "Politik Etis", antara lain dengan mendirikan sekolah-sekolah. Di Jawa Barat iklim politik yang demikian ini dimanfaatkan oleh Raden Dewi Sartika yang tergerak pikirannya untuk menyebarkan pendidikan dikalangan rakyat banyak. Pada tanggal 16 Januari 1904 dengan disponsori oleh Bupati Martanegara, Raden Dewi Sartika membuka sekolah untuk anak-anak gadis di Bandung. Di kemudian hari perkembangan pendidikan terus mengalami perluasan baik di Jawa Barat maupun di daerah lain di Indonesia.

Sesudah berdirinya Budi Utomo 20 Mei 1908 yang menandai era Pergerakan Nasional, di Jawa Barat lahir organisasi-organisasi yang bertujuan untuk memperbaiki kehidupan rakyat dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, antara lain *Indische Partij* pada tanggal 25 Desember 1912 dengan E.F.E. Douwes Dekker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Dr. Suwardi Suryaningrat sebagai tokoh pimpinannya. Selain itu tahun 1925 di Bandung golongan terpelajar mendirikan *Algemeene Studie Club* yang dipimpin oleh Soekarno, seorang mahasiswa *Technische Hogeschool* (sekarang Institut Teknologi Bandung). Kemudian pada tanggal 4 Juli 1927 berdiri **Perserikatan Nasional Indonesia** yang kemudian menjadi **Partai Nasional Indonesia**.

Pada tanggal 17 Desember 1927, di Bandung berdiri pula suatu badan federasi yang disebut **Permufakatan Perhimpunan-perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia** (PPPKI) yang beranggotakan PNI, Partai Sarekat Islam, Budi Utomo, **Paguyuban Pasundan** (didirikan oleh Mahasiswa School tot Opleiding van Inlands Aartsen –STOVIA- asal Jawa Barat pada tanggal 22 September 1914), *Jong Sumatranen Bond*, **Perkumpulan Kaum Betawi**, *Indonesische*

Studie Club. Pada tanggal 22 Maret 1930 di Bandung berdiri pula sebuah organisasi wanita bernama **Istri Sedar**, sebagai kelanjutan dari organisasi **Putri Indonesia**.

Pada perkembangan selanjutnya, pertumbuhan organisasi kebangsaan di Jawa Barat semakin gencar menanamkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Keadaan ini berlangsung sampai pecahnya Perang Pasifik 7 Desember 1941 sebagai bagian dari Perang Dunia II. Pada hari itu juga pasukan Jepang melakukan pemboman terhadap pangkalan armada Amerika di Pearl Harbour, Hawaii. Lima jam setelah serangan tersebut, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Mr. A.W.L. Tjarda van Starckenborgh Stachouwer, melalui radio menyatakan bahwa Pemerintah Hindia Belanda dalam keadaan perang dengan Jepang. Angkatan Perang Jepang tidak menemukan banyak kesulitan dalam merebut daerah jajahan negara-negara Barat di Asia Tenggara, termasuk merebut Kepulauan Indonesia. Kekalahan Belanda terhadap Jepang ditandai dengan penyerahan tanpa syarat secara militer yang terjadi di Kalijati, Subang, Jawa Barat yang mana sebelumlahnya Belanda telah memindahkan konsentrasi pertahanannya dari Jakarta ke Kota Bandung.

E. Masa Pendudukan Jepang

Pada tanggal 1 Maret 1942, angkatan perang Jepang mendarat di Merak dan Teluk Banten, serta di Eretan, Indramayu yang dipimpin oleh Kolonel Shoji dengan sasaran untuk menguasai pangkalan udara Kalijati, Subang. Gerak maju angkatan perang Jepang ke daerah pedalaman Jawa Barat tidak dapat dibendung lagi. Tanggal 5 Maret 1942, Batavia diduduki dan diganti namanya menjadi **Jakarta**. Pada hari itu juga kota Bogor, Cianjur, dan Sukabumi dapat dikuasai Jepang dengan mudah. Pada tanggal 8 Maret 1942, Panglima Angkatan Darat Belanda Letnan Jenderal Ter Poorten dan Gubernur Jenderal Belanda Tjarda van Starckenborgh

menandatangani kapitulasi kepada pihak Jepang di Pangkalan Angkatan Udara Kalijati, Subang.

Masuknya Jepang pada awal tahun 1942 ke Jawa Barat, segera mengubah susunan pemerintahan yang ada di wilayah ini. Di bawah pemerintahan militer Jepang, Provinsi Jawa Barat bentukan Belanda sebelumnya dihapuskan dan berdasarkan *Osamu Seirei* No. 27 tahun 1942 ditetapkan bahwa daerah Jawa Barat dibagi menjadi lima (5) *shu* (keresidenan), yaitu Banten *Shu*, Bogor *Shu*, Jakarta *Shu*, Priangan *Shu* dan Cirebon *Shu*, sebagai wilayah pemerintahan tertinggi. Di bawah *shu* terdapat *ken* (kabupaten) dan *si* (kotapraja), sementara di bawah *ken* adalah *gun* (kawedanaan) dan di bawah *gun* ada *son* (kecamatan), yang paling bawah adalah *ku* (desa). Pada tahun 1944 Jepang memperkenalkan *tonarigumi* (rukun tetangga) yang beranggotakan 10 hingga 20 kepala keluarga dengan seorang pemimpin.

Kedatangan bala tentara Jepang pada awalnya memang mendapat simpati penduduk, segi positif lain Jepang adalah memberi kepercayaan bagi orang-orang Indonesia yang terpelajar untuk menduduki posisi-posisi penting dalam pemerintahan yang ditinggalkan orang-orang Belanda.

Namun keadaan ini tidak berlangsung lama. Kekayaan alam dan rakyat dieksploitasi untuk kepentingan perang Jepang melawan pasukan Sekutu, sehingga kehidupan rakyat Indonesia umumnya semakin menderita. Karena itu dalam waktu yang tidak lama perasaan antipati terhadap Jepang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat yang kemudian menimbulkan perlawanan bersenjata terhadap Jepang. Keadaan ini berlangsung sampai Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945.

F. Masa Republik Indonesia

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya yang disebarluaskan ke seluruh penjuru tanah air dan dunia internasional. Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta terpilih masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI, disusul dengan ditetapkannya UUD 1945. **Proklamasi kemerdekaan Indonesia telah melahirkan sebuah NKRI.**

Berita proklamasi di daerah Jawa Barat pertama kali diterima kantor Berita *Domei* Bandung tanggal 17 Agustus 1945 dari Kantor Berita *Domei* Pusat Jakarta. Teks Proklamasi kemudian disebarluaskan melalui *Harian Tjahaja* dan melalui Pemancar Radio Bandung (*Bandung Hosokyoku*) yang menyiarkan secara terus menerus pada setiap kesempatan siaran, yaitu pukul 19.00, 20.00 dan 21.00 WIB. Berita ini disambut gembira di Jawa Barat, walaupun dalam prakteknya kemudian tidak secara otomatis kemerdekaan itu dapat sepenuhnya dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sementara itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sidang pertamanya pada tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan antara lain:

1. Daerah Indonesia dibagi dalam delapan (8) provinsi yang dipimpin oleh gubernur. Provinsi-provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil.
2. Provinsi dibagi dalam karesidenan yang dikepalai oleh seorang Residen.
3. Gubernur dan Residen dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID).

Pada hari ini juga PPKI menetapkan pembentukan departemen-departemen yang akan dipimpin oleh seorang menteri dan pemerintahan

provinsi yang dipimpin oleh seorang gubernur. PPKI kemudian dibubarkan dan diganti menjadi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bertugas membantu presiden.

Jawa Barat adalah provinsi pertama yang dibentuk RI pada masa awal kemerdekaan dimana terletak kota Jakarta sebagai Ibu Kota negara RI yang merupakan pusat pemerintahan. Di masa sebelum kemerdekaan kota Jakarta juga dijadikan sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda begitu pula pada masa pendudukan Jepang. Sebagai gubernur pertama ditunjuk Mr. Sutarjo Kartohadikusumo yang berkedudukan di Jakarta. Dalam menjalankan tugasnya, beliau banyak mendapat bantuan dari tokoh-tokoh pergerakan, seperti R. Puradireja dan Otto Iskandar Dinata, Mr. M. Roem, R.D. Prawiranata, Partajumena, R.S. Suriadireja dan Dr. Sudarsono

Untuk melengkapi struktur pemerintahan daerah yang disesuaikan dengan keadaan pemerintah pusat, maka pemerintah RI menetapkan UU nomor 1 tahun 1945 yang mengatur kedudukan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID). Dalam kerangka ini Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) akan melakukan pelimpahan tanggung jawab administratif semua urusan lokal pada Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID). Hal tersebut selain memperjelas pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah otonom, juga menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia didukung oleh daerah-daerah bekas kerajaan yang menjadi daerah otonom.

Sebagai perangkat pembantu gubernur, KNID terutama berfungsi sebagai penghubung antara pusat dengan daerah, selain itu untuk membantu ketenteraman dan menjaga keselamatan rakyat, anggota KNID ikut aktif menyusun Badan Keamanan Rakyat (BKR) di daerahnya masing-masing. Badan ini terutama menampung mereka yang pernah

mendapatkan pendidikan militer, seperti para mantan anggota Peta, Heiho dan KNIL.

Meskipun pemerintahan telah terbentuk, kemerdekaan masih harus ditegakkan oleh segenap komponen bangsa mengingat Jepang yang kalah perang dengan pihak Sekutu diharuskan menjaga *status quo* di wilayah Indonesia hingga kedatangan pasukan sekutu. Pasukan Jepang yang berada di Jawa Barat yang berjumlah kurang lebih 60.000 personil melakukan berbagai upaya untuk menghambat kegiatan pemerintah nasional Republik Indonesia di Jawa Barat. Mereka berupaya untuk meningkatkan pengawasannya atas beberapa instalasi-instalasi vital, seperti gudang-gudang senjata. Padahal persenjataan dan penguasaan berbagai instalasi tersebut sangat diperlukan oleh para pejuang di Jawa Barat untuk menopang perjuangan. Akibatnya konflik antara pemuda Indonesia dengan tentara Jepang tidak dapat dihindarkan.

Untuk menghadapi kekuatan Jepang, pemerintah dan rakyat Jawa Barat membentuk barisan kelaskaran yang berbasis di beberapa kota seperti Bandung, Purwakarta, Serang, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Cirebon, Kuningan, Majalengka, dan Sumedang, dengan berbagai nama kebanggaan masing-masing seperti Barisan Merah Putih, Barisan Banteng Republik Indonesia, Barisan Pemberontak Republik Indonesia, Angkatan Pemuda Indonesia, dan Laskar Wanita. Selain itu di kalangan pemuda yang bekerja di instansi-instansi pemerintah membentuk Angkatan Muda Pos, Telegram dan Telepon (AMPTT), Angkatan Muda Pekerjaan Umum (AMPU), serta dari kalangan pemuda Islam membentuk laskar Hizbullah dan Sabilillah.

Sementara itu perkembangan lain terjadi di lingkungan kotapraja Jakarta. Administrasi kotapraja Jakarta secara resmi masih berada di tangan Jepang hingga tanggal 19 September 1945. Ketika para pegawai menyatakan setia kepada RI, maka pada tanggal 23 September 1945

dibentuklah Pemerintah Nasional Kota Djakarta (PNKD) dengan Suwiryo sebagai pimpinannya. Menurut struktur pemerintahan saat itu, Jakarta termasuk ke dalam wilayah Provinsi Jawa Barat, tetapi pada prakteknya menerima langsung instruksi dari pemerintah pusat.

Jakarta yang merupakan pusat pemerintahan RI, pada tahun 1945 sampai dengan 1949 dengan terpaksa melepaskan statusnya tersebut. Keamanan di kota itu tidak stabil akibat pertikaian antara Indonesia dengan Belanda dan Inggris. Bahkan pada tahun-tahun tersebut Jakarta dalam realisasinya berada di bawah pendudukan Inggris, yang kemudian dilanjutkan oleh Netherlands Indies Civil Administration (NICA). Oleh karena itu, sebagai konsekuensi yang harus diambil pemerintah RI, Jakarta harus mencerminkan sebagai Kota Damai. Namun, Rakyat Jakarta dan sekitarnya menganggap cara yang ditempuh pemerintah RI merupakan hal yang tidak masuk akal, karena merasa sudah merdeka.

Ibukota Provinsi Jawa Barat pada mulanya ditetapkan di Jakarta, namun dengan kedatangan Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia menyebabkan Jakarta menjadi kacau. Ibukota Provinsi Jawa Barat kemudian beralih ke Bandung dan ibukota RI dipindahkan ke Yogyakarta. Ketika RI mundur ke Yogyakarta rakyat Jakarta bertindak atas inisiatif sendiri untuk melakukan revolusinya sendiri. Aksi-aksi yang mereka lakukan antara lain melawan pejabat pemerintah setempat yang mereka anggap telah bertindak tidak adil.

Guna memadukan potensi perjuangan bersenjata, pemerintah Republik Indonesia melebur berbagai barisan dan laskar bersenjata tersebut ke dalam satu wadah, yaitu Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Wadah perjuangan baru ini berdiri pada tanggal 5 Oktober 1945.

Aksi-aksi yang dilakukan oleh para pemuda selanjutnya adalah mengambil alih kekuasaan dan melucuti orang-orang asing yang bersenjata. Dalam usahanya tersebut, para pemuda pada awalnya hanya

mendatangi tangsi-tangsi dan gudang-gudang persenjataan Jepang untuk meminta senjata dengan tekad jika tidak diserahkan secara sukarela, maka mereka akan mengambil tindakan kekerasan. Dalam keadaan terkepung tentara Jepang tidak mempunyai pilihan kecuali menyerahkan senjatanya. Walaupun demikian benturan fisik terkadang tidak dapat dihindari, seperti pertempuran yang terjadi di daerah Lengkong dan Kiaracondong.

Pada tanggal 12 Oktober 1945, rombongan tentara Sekutu yang terdiri dari tentara Inggris (Gurkha) tiba di Bandung. Pasukan Sekutu yang bertugas di Indonesia bernama *Allied Forces Netherlands East Indies* (AFNEI) dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison. AFNEI bertugas antara lain menerima penyerahan dari Jepang, membebaskan para tawanan perang dan interniran serikat, melucuti dan mengumpulkan orang Jepang untuk dipulangkan, dan menegakkan serta mempertahankan keadaan damai untuk diserahkan kepada pemerintah sipil.

Pada mulanya Indonesia menyambut kedatangan pasukan Sekutu dengan sikap netral. Namun sikap ini segera berubah setelah mengetahui bahwa pasukan itu membawa orang-orang NICA yang dengan terang-terangan ingin menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Bahkan antara pihak Inggris dengan Belanda telah tercapai persetujuan yang disebut *Civil Affairs Agreement*, isinya antara lain Inggris meminta supaya daerah seluas 11 km keliling kota Bandung – dihitung dari tengah kota - dikosongkan dari semua pihak yang bersenjata. Walaupun pada awalnya para pejuang bersenjata dan pihak pemerintahan nasional setempat keberatan memenuhi tuntutan Inggris tersebut, namun akhirnya mereka tertekan dan diikuti penduduk terpaksa meninggalkan kota Bandung pada tanggal 24 Maret 1946 menuju tempat-tempat yang terletak di sebelah selatan kota, antara lain Dayeuh Kolot, Ciparay, Majalaya, Pameungpeuk, Banjaran, dan Soreang. Setelah kota Bandung ditinggalkan oleh sebagian rakyat, para pejuang yang tergabung dalam Majelis

Persatuan Perjoangan Priangan (MP3) berbulat hati untuk melakukan perlawanan terakhir dengan menghancurkan dan membakar rumah-rumah dan bangunan penting. Peristiwa ini dikenang sebagai ***Bandung Lautan Api***. Kota Bandung ditinggalkan penduduknya dan diadakan pembumihangusan kota yang bertujuan selain menghambat gerak maju musuh, juga agar kota Bandung tidak dijadikan pangkalan bagi tentara Sekutu.

Dengan jatuhnya kota Bandung ke tangan musuh, maka sekutu menyerahkan "pengamanan" Indonesia kepada Belanda. Belanda semakin memperkuat kedudukannya di Indonesia dengan membentuk 5 (lima) ***Regeringscommissarissen voor Bestuursangelegheden*** (Recomba), yaitu komisar pemerintah untuk masalah administrasi yang ditempatkan di 5 wilayah administrasi, yaitu di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Madura, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Namun Belanda tidak pernah merasa aman, karena selalu mendapat serangan dari para pejuang dengan cara melakukan perlawanan gerilya.

Menyadari bahwa usaha untuk mengembalikan pemerintahan kolonialnya seperti sebelum Perang Dunia ke II mustahil dapat dicapai dengan kekuatan senjata, pemimpin NICA Letnan Gubernur Jenderal H.J. Van Mook mengambil siasat dengan mencetuskan gagasan pembentukan Negara Indonesia Serikat atau federasi di bawah naungan Kerajaan Belanda. Dengan siasat memecah belah seperti ini Belanda berharap kedudukan Republik Indonesia yang pada saat itu berpusat di Yogyakarta dapat dipersempit dan kemudian dengan mudah dapat diruntuhkan.

Untuk tujuan tersebut Van Mook mengadakan Konferensi Malino pada tanggal 16–22 Juni 1946, konferensi yang kedua di Pangkalpinang dan konferensi yang ketiga di Denpasar 18–24 Desember 1946. Dalam Konferensi ini diputuskan untuk membentuk Negara bagian yang pertama

yaitu Negara Indonesia Timur. Belanda memang mempunyai tujuan untuk memecah persatuan bangsa Indonesia.

Pada tanggal 20 Nopember 1946, R.A.A.M. Suriakartalegawa, seorang menak Jawa Barat, membentuk Partai Rakyat Pasundan, bertujuan untuk mendirikan suatu Negara Pasundan dengan dukungan Belanda, pada tanggal 14 April 1947, ia memproklamkan berdirinya Negara Pasundan, tetapi gagal karena mendapat perlawanan dari rakyat yang sadar segala upaya itu tak lebih dari upaya Belanda untuk melepaskan Jawa Barat dari RI.

Usaha lain untuk meredam konflik Indonesia–Belanda adalah usulan Sekutu agar dilakukan perundingan antara pihak Indonesia dengan Belanda, antara lain di **Hooge Valuwe** namun perundingan ini mengalami kegagalan. Perundingan berikutnya dilanjutkan di **Linggarjati** suatu tempat yang terletak di kaki gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan dan menghasilkan naskah **Perjanjian Linggarjati** yang ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947.

Sekalipun Persetujuan Linggarjati telah ditandatangani, namun hubungan Indonesia Belanda tidak bertambah baik. Perbedaan tafsir dan pelanggaran gencatan senjata dilakukan Belanda menyebabkan gagalnya persetujuan tersebut. Pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda melancarkan Agresi Militer I berhasil menduduki kota Bogor, Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya, Sumedang, Cirebon dan Ciamis.

Perlawanan yang terjadi di hampir seluruh Jawa Barat akhirnya mendapat perhatian dunia internasional. Untuk menyelesaikan masalah ini Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Jasa-jasa baik sebagai perantara komisi ini beranggotakan wakil-wakil dari Australia, Belgia dan wakil dari Amerika Serikat sebagai ketuanya.

Perundingan selanjutnya diadakan di atas sebuah kapal Amerika USS **Renville** di Teluk Jakarta. Naskah perjanjian ditandatangani pada

tanggal 17 Januari 1948 yang berisikan persetujuan gencatan senjata antara Indonesia Belanda. Berdasarkan Persetujuan Renville, sebagian besar wilayah Jawa Barat yang sudah diduduki Belanda menjadi daerah kekuasaan Belanda, kecuali Banten yang tetap menjadi wilayah Republik Indonesia. Dengan perjanjian itu Indonesia menerima apa yang disebut Garis Van Mook. Indonesia harus menyerahkan sebagian wilayahnya kepada Belanda dan tentara Indonesia yang berada di daerah tersebut harus hijrah ke daerah Republik. Hijrahnya Tentara Indonesia dari Jawa Barat menyebabkan daerah ini mengalami kekosongan militer.

Kekosongan ini kemudian diisi oleh laskar-laskar di Jawa Barat yang merasa tidak terikat oleh perjanjian tersebut. Laskar-laskar ini cenderung bertambah kemudian dipersatukan ke dalam suatu Federasi dengan nama Divisi 17 Agustus oleh Wahidin Nasution. Mereka inilah yang kemudian merupakan pasukan gerilya di Jawa Barat .

Akan tetapi keadaan yang tidak menentu pada waktu itu, khususnya pada saat berlangsungnya revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan, membuat roda pemerintahan tidak bisa berjalan lancar. Bahkan ibukota Jawa Barat sempat dipindahkan ke daerah Tasikmalaya. Dalam saat-saat krisis seperti itu, tanggal 24 April 1948 Belanda mendirikan **Negara Pasundan** dan memilih R.A.A. Wiranata Kusuma sebagai Wali Negara Pasundan yang pada waktu itu menetap di Yogyakarta sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung RI (*Staatsblaad* 1948 nomor 95). Meskipun pemerintah Republik Indonesia menentang atas pembentukan Negara-negara boneka bentukannya, Belanda tetap melanjutkan siasatnya sembari berusaha untuk memblokade RI. Karena itu perlawanan mempertahankan kemerdekaan semakin bergelora dan meluas di seluruh tanah air, termasuk Jawa Barat .

Selain terdapat perjuangan Militer Gerilya, di Jawa Barat terdapat juga Pertahanan Administratif dan Desa yang dikordinir oleh Syamsuddin

Tjan, Mohammad Syafei, dan Oja Sumantri untuk mendukung perjuangan gerilya. Khususnya ketika Belanda mendirikan Negara Pasundan, reaksi perjuangan rakyat Jawa Barat semakin meningkat.

Pada Bulan April 1948 diadakan Konferensi Koordinasi Pamong Praja tingkat Kabupaten, Kawedanaan dan Kecamatan Jakarta, yang menghasilkan kebulatan tekad untuk meneruskan perjuangan dengan segala cara dan sepakat untuk tidak menggunakan nama Republik Indonesia agar tidak melanggar Perjanjian Renville. Pada bulan Juli 1948, Oja dan Moh. Syafei berusaha mengadakan hubungan dengan seluruh badan perjuangan untuk membentuk pusat koordinasi, pusat pimpinan bersama, yang berencana membentuk corak pemerintahan yang meliputi gerakan kemiliteran dan sipil.

Pada tanggal 25 September 1948, di kaki gunung Sanggabuana tercapai persetujuan antara Oja dengan Wahidin Nasution untuk membentuk pemerintahan yang dinamakan **Pemerintahan Republik Djawa Barat** (PRDB). Di sisi lain permasalahan Negara Pasundan belum terpecahkan, pada bulan Agustus 1949 di Jawa Barat berdiri pula Negara Islam Indonesia, yaitu bentukan Kartosuwiryo yang selanjutnya melancarkan pemberontakan DI/TII. Akan tetapi semua dapat diatasi, dan pemberontakan berhasil dipadamkan.

Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda kembali melancarkan aksi militernya dengan menyerbu dan menduduki kota Yogyakarta. Tindakan penyerangan ini diprotes keras oleh Jawa Barat, bahkan Perdana Menteri Negara Pasundan, Adil Puradirja meletakkan jabatannya.

Perjuangan diplomasi Indonesia menghasilkan Persetujuan **Roem-Royen** pada tanggal 7 Mei 1949, dan sebagai kelanjutannya dilangsungkan **Konferensi Meja Bundar (KMB)** di Den Haag Agustus – Nopember 1949 yang dihadiri oleh delegasi pemerintah RI, Kerajaan Belanda, delegasi BFO (***Bijeenkomst Federal Oversleg*** atau Negara-negara bagian

bentukan Belanda) dan *United Nations Commission for Indonesia* (**UNCI**) sebagai perantara.

KMB menghasilkan Piagam Pengakuan Kedaulatan Republik Indonesia (RIS) oleh Kerajaan Belanda. Upacara Pengakuan Kedaulatan itu dilangsungkan pada tanggal 27 Desember 1949. Piagam berisi tentang pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia di seluruh wilayah Hindia Belanda, kecuali Irian Barat yang akan diselesaikan kemudian hari. Isi piagam tersebut diterima oleh masyarakat dan pejuang di Jawa Barat dengan penuh harapan. Namun eksistensi Negara-negara bagian bentukan Belanda ini hanya berlangsung dalam kurun waktu yang singkat, karena pada perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa bentuk negara bagian dan negara serikat ternyata tidak sesuai dengan kehendak rakyat. Sebelum RIS yang dihasilkan KMB berumur satu tahun, timbul pergolakan-pergolakan yang menuntut dibubarkannya bentuk Negara Federal dan kembali ke Negara Kesatuan RI. Negara Pasundan sendiri dalam sidang khusus yang diadakan pada tanggal 8 Maret 1950 atas desakan rakyat menuntut untuk bergabung dengan RI. Demikian pula **Pemerintah Republik Djawa Barat (PRDB)** kemudian menyerahkan Badan Pemerintah Sipil kepada Pemerintah RI melalui Ir. Ukar Bratakusumah yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat .

Untuk menampung aspirasi rakyat, pemerintah RIS menetapkan Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1950, tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan dari Wilayah Republik Indonesia Serikat. Berdasarkan undang-undang itu, satuan kenegaraan yang menghendaknya dapat dibubarkan oleh Presiden RIS dan wilayahnya digabungkan dengan Republik Indonesia.

Pada tanggal 19 Mei 1950 antara pemerintah RIS dan pemerintah RI tercapai persetujuan untuk membentuk negara kesatuan dengan jalan mengubah Konstitusi RIS. Pada tanggal 15 Agustus 1950 keluarlah

Undang-undang RIS No. 7 tahun 1950 tentang perubahan konstitusi RIS menjadi UUD Sementara (Lembaran Negara No. 56 th 1950).

Sebagai langkah persiapan untuk pembentukan pemerintahan di daerah-daerah, Pemerintah RIS menetapkan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1950 yang membagi wilayah Republik Indonesia dalam 10 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan.

Pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS dibubarkan dan dibentuk kembali Negara Kesatuan RI dan daerah Jawa Barat kembali kepada statusnya semula sebagai sebuah provinsi dengan Undang-undang No. 11/1950, dengan ibukotanya Bandung yang wilayahnya meliputi eks Negara Pasundan. Namun dalam perkembangan selanjutnya, wilayah Kotapraja Besar Jakarta yang tadinya termasuk Jawa Barat, kemudian dibentuk menjadi Provinsi tersendiri dengan nama Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tahun 1960.

Setelah 10 tahun bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, di Bandung pada tanggal 18 sampai dengan 24 April 1955 terjadi peristiwa sangat penting dalam sejarah politik luar negeri Indonesia dan merupakan peristiwa monumental bagi pemerintah dan bangsa Indonesia, yaitu **Konferensi Asia Afrika**. Betapa tidak, karena sebagai negara yang masih muda itu bangsa Indonesia telah tampil menjadi tuan rumah bagi konferensi bertaraf internasional itu. Konferensi tersebut berakhir dengan sukses, baik dalam mempersatukan sikap dan menyusun pedoman kerjasama di antara bangsa-bangsa Asia Afrika maupun dalam ikut serta membantu terciptanya ketertiban dan perdamaian dunia. Konferensi ini melahirkan **Dasasila Bandung** yang kemudian menjadi pedoman bangsa-bangsa terjajah di dunia dalam perjuangan memperoleh kemerdekaannya dan yang kemudian menjadi prinsip-prinsip

dasar dalam usaha memajukan perdamaian dan kerja sama internasional. Kesuksesan konferensi ini tidak hanya tampak pada masa itu, tetapi juga terlihat pada masa sesudahnya, sehingga jiwa dan semangat Konferensi Asia Afrika menjadi salah satu faktor penting yang menentukan jalannya sejarah dunia.

Dalam periode selanjutnya Jawa Barat mempunyai sumbangan yang cukup penting dalam pembangunan nasional. Kondisi geografis yang strategis merupakan keuntungan bagi daerah Jawa Barat terutama dari segi komunikasi dan transportasi. Wilayah Jawa Barat juga sebagai wilayah penyangga Ibukota Jakarta. Potensi alam baik dalam segi keindahan alam dan sumber alam sudah banyak yang dikembangkan. Daerah yang relatif subur ini banyak menghasilkan produk pertanian berupa padi, sayur-sayuran, buah-buahan, sementara itu di sektor perkebunan dihasilkan teh, kopi, kina dan karet. Hasil lain adalah bahan tambang seperti minyak dan gas, emas dan bijih besi. Di masa depan potensi yang masih mungkin dikembangkan adalah pemanfaatan daerah pesisir, sumber daya hutan dan pemanfaatan lahan yang cukup prospektif.

Dalam kurun waktu 50 tahun setelah pembentukannya, wilayah kabupaten/kota di Jawa Barat telah bertambah sebanyak lima daerah, yakni Kabupaten Subang (1968), Kota Tangerang (1993), Kota Bekasi (1996), Kota Cilegon dan Kota Depok (1999). Sementara itu wilayah Jawa Barat terbagi dalam lima Wilayah Pembantu Gubernur. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, maka wilayah yang semula sebagai Administrasi Pembantu Gubernur Wilayah I Banten berdiri sendiri sebagai Provinsi Banten. Saat ini Provinsi Jawa Barat terdiri dari 16 kabupaten dan sembilan (9) Kota dengan membawahkan 584 kecamatan, 5.201 desa, dan 609 kelurahan.

G. Jawa Barat dalam Khasanah Arsip

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal bahwa arsip yang diserahkan melalui program *Citra Daerah* ini adalah khasanah arsip statis yang tersimpan di ANRI tentang berbagai aktifitas dan fenomena di Jawa Barat. Arsip yang diserahkan berupa arsip tekstual, arsip peta dan arsip foto yang menggambarkan berbagai peristiwa yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Barat kurun waktu abad 17 sampai dengan abad 20.

Dalam Citra Daerah Jawa Barat ini pokok masalah pertama yang ditampilkan adalah mengenai **Geografis**. Penjelasan wilayah geografis ini digambarkan melalui arsip Peta bagian Priangan antara lain : Sukapura, Galunggung, Limbangan, 16 Januari 1942, peta Priangan Barat tahun 1830, sketsa Cipanas Distrik Ciputri Kabupaten Cianjur Karesidenan Priangan, peta rencana Kota Bandung, peta daerah Cirebon, sketsa wilayah Puncak, dan juga peta Kota Bandung tahun 1946.

Masalah **Pemerintahan** dituangkan pertama kali dengan menampilkan arsip berupa Akta Perjanjian Nomor 6 tahun 1699 tentang Mufakat Raja-raja Cirebon, Daftar silsilah Raja-raja Cirebon tahun 1765, fragmen catatan harian perjalanan di Jawa dalam misi pendakian ke Gunung Ciremai tahun 1805, Akta Perjanjian antara Pemerintah Belanda dengan Sultan Kasepuhan dan Sultan Anom dari Cirebon tentang pengakuan kekuasaan Belanda atas negeri Cirebon tahun 1806, interogasi Belanda terhadap Bagus Manoch dan Bagus Rangin pejuang rakyat Cirebon 1812, daftar silsilah keturunan bupati sampai mantri polisi di Karawang dan Priangan tahun 1854, notulen rapat daerah Cirebon tentang anggaran Cirebon tahun 1914, permohonan tentang rekonstruksi Pemerintahan Karesidenan Cirebon sehubungan dengan reorganisasi pemerintahan Hindia Belanda 1923, notulen *besluit* no. 5 tahun 1925 tanggal 6 September 1925 tentang pembentukan Provinsi Jawa Barat, program kerja Provinsi Jawa Barat di bidang pendidikan, pertanian,

peternakan, kesehatan tahun 1926, laporan hasil pembentukan pemerintahan di Jawa Barat 1926. Selain itu ditampilkan juga foto tentang peristiwa menyerahnya Belanda pada Jepang tanpa syarat di Kalijati, Subang, 8 Maret 1942, gedung tempat dilangsungkannya perundingan Linggarjati di Kuningan Cirebon 1946, upacara penandatanganan perjanjian Linggarjati oleh PM Sutan Syahrir 1947, juga arsip Perjanjian Linggarjati 25 Maret 1947, laporan singkat rapat pembentukan PPN di Majalengka dan anggaran dasarnya tahun 1947, permohonan pembentukan Daerah Istimewa Karesidenan Cirebon 1948, proses verbal sumpah Wali Negara Pasundan Adipati Arya Wiranatakusumah 1948, mosi kepada pemerintah Negara Pasundan supaya Negara Pasundan diakui sah oleh RI 1948, surat tentang desakan pembentukan Karesidenan Purwakarta, Keputusan Presiden RI Nomor 112 tahun 1951 tentang pengangkatan T. Mohamad Sanusi Hardjadinata (*Sic.*), Residen Priangan menjadi Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat, R. Mohamad Sanusi Hardjadinata sedang diambil sumpahnya dalam pelantikan sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bandung, 1 Juli 1951, foto-foto Gubernur Jawa Barat, foto tentang perjalanan Presiden Soekarno ke Tasikmalaya Juli 1951, Keputusan Presiden RI Nomor 39 tahun 1952 tentang Pengesahan Pedoman untuk Dewan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Jawa Barat 13 Februari 1952, Keputusan Presiden RI Nomor 19 tahun 1954 tentang Pengesahan Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat tanggal 22 September 1953 Nomor 13/K/53 yang berisi daftar susunan pangkat dan kenaikan pangkat pegawai 29 Januari 1954, Sokongan dari Serikat Buruh PU Cabang Soreang terhadap pernyataan SOBSI Jawa Barat tentang pengoperan Jawatan Pekerjaan Umum oleh Daerah Otonom Provinsi Jawa Barat 8 Maret 1954, Keputusan Presiden RI Nomor 216 tahun 1954 tentang Penggunaan Lambang Kota Sukabumi, 30 Oktober 1954, Keputusan Presiden RI Nomor 51 Tahun 1956 tentang Pengesahan Keputusan DPRDS Provinsi Jawa

Barat tanggal 5 Juli 1955 Nomor 26/K/55 yang menetapkan pemakaian **muntadis–muntadis** bagi pegawai dan pemberian tunjangan cacat bagi pegawai negeri sipil, 21 Februari 1956, Keputusan Presiden Nomor 99 tahun 1958 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 3 Oktober 1957 nomor 15 yang berisi Peraturan Pajak Tontolan Kabupaten Majalengka 6 Mei 1958, Keputusan Presiden RI Nomor 134 Tahun 1958 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Swatantra TK II Cianjur tanggal 23 Juli 1957 yang berisi Peraturan Pungutan Pajak, 2 Juli 1958, serta pidato Presiden Soekarno pada rapat raksasa di Bandung dalam rangka menyambut Presiden Filipina Diosdado Macapagal, 24 Februari 1964.

Masalah **Politik dan Keamanan** diawali dengan menampilkan Pembakaran Kota Bandung yang kemudian dikenal sebagai Bandung Lautan Api, 24 Maret 1946, Bandung Lautan Api pada tanggal 24 Maret 1946 Mochamad Toha tokoh yang juga dikenal sebagai Pahlawan Bandung Selatan, Berita Peristiwa Bandung Lautan Api tanggal 24 Maret 1946, arsip tentang laporan keadaan keamanan di daerah Dayeuh Kolot 21 Mei 1947, Laporan keadaan daerah Subang, Jawa Barat akibat agresi Militer I, Juli 1947, peristiwa Agresi Militer Belanda I di Jawa Barat 12 Juli 1947, kunjungan Soekarno dan M. Hatta ke Cirebon yang disambut dengan penghormatan militer dan defile pada 16 Juni 1947, Suasana Kota Bandung Pasca Agresi Militer I, 1947, Laporan tentang pertahanan yang dilakukan oleh Tentara Siliwangi terhadap Sub Teritorial Comando di Jogja, 13 Desember 1948, Anggota TNI dari Divisi Siliwangi berkumpul di Cicalengka, Bandung untuk hijrah ke Jogja, 1948. Pasukan TNI dari Siliwangi, Brigade Suryakencana, Batalion Sujono di Sukanegara menjelang hijrah ke Jogja, 1948. Panglima Siliwangi, Kolonel Sadikin memasuki Kota Bandung menjelang pengakuan kedaulatan RI, 1949 surat rakyat Cibusah kepada Presiden Soekarno tentang permohonan pengiriman TNI Siliwangi untuk

menjaga keamanan 18 Juni 1950, memorandum mengenai acara Konferensi Bogor 8 Desember 1954, foto Perdana Menteri India Shri Jawa harlal Nehru, Perdana Menteri Birma bertemu Presiden Soekarno dalam rangka Konferensi Panca Negara di Istana Bogor 27 Desember 1954, arsip tentang laporan singkat pada *Session* I Konferensi 5 perdana menteri di Bogor 28 Desember 1954, Konferensi Pancanegara di Bogor 29 Desember 1954, naskah kerja delegasi RI pada Konferensi Asia Afrika di Bandung 18– 23 April 1955, Dasasila Bandung merupakan hasil rumusan Konferensi Asia Afrika Perdana Menteri Republik Indonesia Mr. Ali Sastroamijoyo menyambut kedatangan Sir John Kotelawata dari Srilangka di Bandung 1955, pemandangan pada sidang Pleno Konferensi Asia Afrika (KAA) Gedung Dwi Warna tempat Sidang- sidang Ekonomi, Politik, Kebudayaan pada Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan, Bandung, 20 April 1955, Hotel Preanger dan Hotel Savoy Homan di Jalan Asia Afrika tempat penginapan Delegasi peserta Konferensi Asia Afrika, Bandung, 20 April 1955, kegiatan sidang pleno pada Konferensi Mahasiswa Asia Afrika 3 Juni 1956, pidato Presiden Soekarno pada pembukaan Konferensi Dewan Solidaritas Asia Afrika di Bandung 10 April 1961, Gubernur Jawa Barat Ipik Gandamana sedang memasukkan suaranya pada pemungutan suara untuk DPRD Jawa Barat Agustus 1957, Presiden Soekarno menerima emblem Batalyon Infantri 330 TT III Siliwangi 21 Mei 1958, Raja Keprabonan sedang memberikan suara pada pemungutan suara ke II kembali ke UUD 1945 oleh Dewan Konstituante di Bandung, 1 Juni 1959, pidato Presiden Soekarno pada Musyawarah Nasional Perdamaian di Bandung 25 Januari 1960 serta Amanat Presiden Soekarno pada upacara pemberian “Sam Karya Anugerah Kepresiden” kepada Kodam Siliwangi Bandung 28 Agustus 1965.

Kegiatan **Perekonomian dan Perindustrian** lebih banyak tergambar melalui arsip foto, antara lain foto Pembangunan gedung baru Javasche

Bank di Bandung, 21 Mei 1915, Gedung Javasche Bank di Bandung, 1920, pekerja wanita sedang memintal benang pada perusahaan "Yo Sek In" di Bandung pada Maret 1946, Bagian pemintalan dengan mesin kelos bersilang di pabrik tenun Bandung, 23 Mei 1952, Para pekerja sedang membuat hiasan payung di Tasikmalaya, 28 Juni 1948, Seorang pekerja wanita sedang membuat keramik pada perusahaan keramik di Plered, 12 Februari 1953, Pemandangan pedagang yang sedang berjualan di depan pasar Depok, 11 Juni 1949, Pembangunan Pasar Pengalengan hasil gotong royong rakyat desa Pengalengan, Bandung, 25 Agustus 1958, pembuatan tikar mendong dengan alat-alat penganyam yang dikerjakan dengan tangan pada perusahaan rumput mendong di Tasikmalaya 1952, Para pekerja sedang membuat batik di Koperasi "Mitra Batik" Tasikmalaya, 14 Maret 1956, Perusahaan sepatu "Persebo" di Bogor, 14 Juni 1951, Pembuatan sikat dari ijuk hasil produksi industri "Sikat Indonesia" di desa Cisaat, Sukabumi 1955/1956, gambaran aktivitas di pabrik ban "Good Year" di Bogor 1953, Kunjungan Wakil Presiden M. Hatta didampingi Ketua Koperasi Pegawai Negeri, Hasan Wirawatna memasuki gedung KPN, Bandung, 7 September 1956, Keputusan Presiden RI Nomor 174 tahun 1956 tentang pengiriman suatu delegasi Indonesia untuk menghadiri Konferensi FAO Regional untuk negara-negara Asia dan Timur Jauh di Bandung, 15 Oktober 1956, Anggota FAO diterima Gubernur Jawa Barat R. Mohammad Sanusi Hardjadinata, 1956, Wakil Presiden M. Hatta mengunjungi Koperasi Perusahaan Rotan di Cirebon dan Perusahaan Tembaga di Panyingkiran, Majalengka, 25 Juli 1956, Pemandangan di pabrik tekstil Majalaya, Bandung, 18 September 1963, Surat Keputusan Dirjen Perindustrian Kimia tentang Penunjukkan dan Penetapan Tim Penyehatan Managerial PN. Kertas Padalarang, 29 Agustus 1974, dan Keputusan Kepala Pusat Perindustrian tentang penempatan Pejabat-pejabat dalam lingkungan Lembaga Industri Penerbangan Nurtanio (LIPNUR) di Pangkalan Angkatan

Udara Utama Husein Sastranegara Bandung 1971. Perkembangan sektor **Pertanian dan Peternakan** digambarkan dalam arsip antara lain tentang kalkulasi hasil perkebunan kopi di Karesidenan Priangan pada tanggal 18 Januari 1861, Laporan kerusakan 450 pohon kopi akibat serangan kumbang tanah di Banjarn, Bandung, 16 Maret 1891, besluit tanggal 17 Oktober 1911 nomor 55 tentang penyuluhan penanaman teh di Karesidenan Priangan, nota perjanjian antara organisasi pertanian dengan penduduk tentang penyerahan bagi hasil pertanian dan penelitian di bidang pertanian 1923, Pemberitahuan pembebasan tanah untuk pertanian agroponik di Karesidenan Priangan 1940, Seorang pekerja sedang menebang Pohon Kina, Bandung, 8 September 1949, seorang pekerja perempuan sedang memetik daun teh di perkebunan Gunung Mas Puncak 1951, Bunga teratai di Kebon Raya Bogor 1951, Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan pemerintah pusat dalam bidang perikanan darat kepada Provinsi Jawa Barat, iPeraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam bidang pertanian kepada Provinsi Jawa Barat, 27 Juni 1951, Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1951 tentang Pelaksanaan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam bidang kehewanan (ternak) kepada Provinsi Jawa Barat, Bunga bangkai di Kebun Raya Bogor, 28 Juli 1952, Kebun Sayur Kol di Lembang tahun 1965, Petani sedang menanam padi di sawah, Depok, 26 November 1952, dan Wakil Presiden M. Hatta didampingi Menteri Pertanian Moh. Sardjan meninjau Balai Penyelidikan Karet di Bogor, 1 Agustus 1952.

Kegiatan **Pendidikan** dapat dilihat pada arsip kertas maupun foto antara lain menampilkan foto Pelajaran pertama di dalam kelas Sekolah Kartini di Bandung, Sekolah Internasional "Taman Siswa" Mr. Soerjo Adipoetra khusus perempuan di Bandung, Sekolah swasta pribumi di Bogor, *Besluit* No. 31 tanggal 16 Februari 1921 tentang perluasan bangunan

Technische Hooge School dengan biaya 22.000 Gulden, 16 Februari 1921, *Besluit* Nomor 29 tanggal 11 April 1921 tentang pengembangan jurusan Teknik Kimia di Technische Hooge School, 11 April 1921, Peraturan yang menetapkan Technische Hooge School untuk memberikan gelar insinyur kepada lulusannya, pengangkatan Ketua ITB oleh Gubernur Jenderal, pengangkatan dosen-dosen oleh Minister *van Kolonie* serta rincian pengajiannya, 11 April 1921, para mahasiswa Sekolah Pertanian Atas Bogor sedang berpraktek tanaman pinus 14 Mei 1949, Mahasiswa Technische Hooge School sedang mengukur kejernihan langit di Bandung 1949, Technische Hooge School 1949, Boscha (Gedung Peneropongan Bintang) di Lembang, 15 April 1950, Alat Teropong Bintang (Boscha) Lembang Bandung 1951, Presiden Soekarno sedang mengunjungi Sekolah Kader di Cimahi 1951, Siswa Polisi Wanita yang sedang belajar di Sekolah Polisi Sukabumi 1951, Peletakan batu pertama pembangunan gedung Fakultas Pertanian oleh Presiden Soekarno, Bogor, 27 April 1952, Peletakan batu pertama pembangunan gedung Taman Siswa oleh Ki Hajar Dewantoro, Bandung, 27 Juli 1952, Siswa Penerbang Akademi Penerbangan Indonesia sedang bersiap mengadakan demonstrasi terbang di Curug 1955, Presiden Universitas Negeri Padjajaran menyerahkan surat pengesahan kepada Dewan Mahasiswa Sdr Abdul Djabar pada pelantikan Dewan Mahasiswa Universitas Negeri Padjajaran, Bandung 30 Desember 1957, Gedung Universitas Negeri Padjajaran, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Bandung, 6 November 1958, Pidato Presiden Soekarno pada peresmian pembukaan Institut Teknologi Bandung (ITB) di Bandung 1959, Amanat Presiden Soekarno pada peringatan Dies Natalis ke II Universitas Padjajaran, 10 Oktober 1959, Penganugerahan Gelar Doktor *Honoris Causa* dari ITB kepada Presiden Soekarno tahun 1962, Pidato Presiden Soekarno pada pemancangan tiang pertama gedung Herbarium di Bogor, 19 Agustus 1963, dan Sambutan Roeslan Abdulgani selaku wakil Ketua

Badan Pembantu IKIP di Bandung tentang perlunya mahasiswa dalam persoalan revolusi, 17 Maret 1964.

Masalah **Kesehatan** diawali dengan menampilkan arsip tentang, Pembangunan gedung rehabilitasi epidemi di daerah Sukabumi, epidemi tersebut sedang diteliti oleh Institut Pasteur, Bandung, 28 Mei 1915, kemudian foto Sanatorium Cisarua Jawa Barat 1947, Gedung Institut Pasteur Bandung, 21 Agustus 1949, Presiden Soekarno mengunjungi PMI dalam rangka Kongres PMI ke V di Bogor 1951, Konferensi WHO di Bandung, 9 Oktober 1956, Gedung Balai Pengobatan Penyakit Kusta di desa Kedaung Bekasi 1957, dan surat Izin pendirian Rumah Sakit Khusus Ginjal Ny. R.A Habibie, November 1991- September 1995.

Pembangunan **Infrastruktur** digambarkan melalui berbagai corak arsip kertas maupun arsip foto seperti Denah bangunan *Algemeene Secretarie* Bogor, surat-surat tentang penunjukkan daerah Kedung Halang Bogor untuk digunakan sebagai Laboratorium percobaan di bidang pertanian dan peternakan, kedokteran hewan 29 Oktober 1938, salinan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang perluasan kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Barat 21 Juli 1941, Jembatan di atas Kali Ciliwung, Puncak, 10 Juli 1949, Gedung Fakultas Teknik, Universitas Indonesia (ITB), Bandung, 8 Juli 1953, Istana Bogor, tempat pemerintahan Gubernur Jenderal, Istana Cipanas, tempat peristirahatan Gubernur Jenderal, Jembatan gantung sepanjang 40 meter di Bekasi, 14 Oktober 1957, Pembangunan kembali jembatan Leuwisapi (Daerah Nanjung) yang menghubungkan antara Cimahi dan Soreang, Bandung, 15 November 1958, Gedung "Merdeka" Tempat Pemungutan Suara ke II kembali ke UUD 1945 oleh Dewan Konstituante Bandung 1959.

Pembangunan sarana **Irigasi** dapat dilihat dari Denah saluran air ledeng yang berasal dari rawa Cibinong 29 Januari 1801, pusat Tenaga Air di Lumajang Bandung Selatan tahun 1949, Proyek pembangunan

Waduk serba guna Jatiluhur 18 April 1965, dan Amanat Presiden Soekarno pada waktu mengunjungi Proyek Waduk Serba Guna Jatiluhur di Purwakarta 19 September 1965.

Usaha **Pertambangan** tidak begitu banyak diungkapkan karena arsip yang ada terbatas, sehingga hanya sedikit yang dapat ditampilkan antara lain Resolusi untuk memutuskan pemerintah pusat Cq. Kementerian Perindustrian agar segera mengusahakan penggalian sumber-sumber minyak tanah di daerah Indramayu pada tanggal 10 September 1957 dan tentang pidato Presiden Soekarno pada pembukaan tambang emas di Cikotok Sukabumi pada tanggal 12 Juli 1958.

Perkembangan jaringan **Transportasi** digambarkan melalui Grafik tentang biaya pekerjaan stasiun kereta api jalur Priangan- Cilacap, 1890, arsip-arsip foto seperti Kereta Api sedang langsir di Stasiun Bandung 1952, Stasiun Kereta Api Bandung, 27 Juli 1953, Stasiun Kereta Api di Cirebon, 15 November 1953, pesawat terbang Garuda Indonesia Airways sedang mendarat di lapangan terbang Andir Bandung pada tanggal 10 September 1949, Model angkutan Becak sebagai salah satu alat transportasi di kota Bandung 1953, Pemandangan di sekitar pelabuhan Cirebon dimana terlihat pangkalan kapal-kapal penarik sampan tempat kapal berlabuh 1953, Nota Kepala Dinas Interlokal tentang Organisasi Dinas Interlokal, 15 Mei 1925, Surat tentang perluasan gedung Kantor Pos Besar di Bandung, lampiran denah, 9 Oktober 1931, Kantor Pos Besar di Bandung, 27 Juli 1953, Kantor Pos dan Telepon di Bandung, 27 Juli 1953, Penyederhanaan Organisasi Post, Telegraaf dan Telefoon (PTT), 6 September 1935, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1984 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro, 4 September 1984

Kegiatan **Keagamaan** digambarkan melalui foto-foto tempat peribadatan yang tersebar di berbagai tempat, seperti foto gereja di Depok tahun 1949, Gereja Katolik Roma di Bandung tahun 1953, Gereja

Protestan Bandung 1953, Masjid Agung Sukabumi 1952, Masjid Kanoman Cirebon 1953, dan Masjid Agung Bandung 1957. Selain itu terdapat foto Presiden Soekarno sedang melaksanakan Sholat Idul Adha di Alun-alun Sukabumi pada tanggal 31 Agustus 1952, Perayaan hari Whu Chang oleh bangsa Tionghoa golongan Kuo Min Tang di Bandung, 10 Oktober 1953 dan kegiatan Renungan tahun baru 1990 di Paseban Tri Panca Tunggal Cigugur Kabupaten Kuningan Jawa Barat yang dilakukan oleh 80 orang anggota pemuda Hindu Indonesia Provinsi Jawa Barat .

Aktivitas **Kebudayaan dan Olahraga** lebih banyak ditampilkan dalam bentuk foto antara lain seperti foto tentang pertunjukan Tari Kelana Sunda Bandung 1950, Orkes Angklung yang diselenggarakan oleh Badan Kesenian Indonesia 1 Februari 1951, Tari Wayang Sunda yang sedang diperagakan untuk menghibur tamu 1951, batu tulis di Jawa Barat 1952, Rombongan "Panjang Jimat" dari Kraton Kanoman menuju Masjid Agung, Cirebon, 19 Oktober 1953, Pertunjukan Wayang Kulit pada upacara Lumban untuk menghormati Dewa Laut di pesisir, Cirebon, 14 November 1953 Gua Sunyaragi bekas peristirahatan Putri Tiongkok istri Sultan Cirebon di abad XVI (1570), Cirebon, 20 November 1953, seperangkat gamelan sunda untuk mengiringi pertunjukan tari di Gubernuran Bandung 1955, Wayang Golek yang merupakan salah satu ciri khas kesenian Jawa Barat, 20 Mei 1955, naskah Pidato Presiden Soekarno pada upacara pembukaan PON V di Bandung 30 September 1961, Kontingen Jawa Barat (paling kanan) dalam upacara pembukaan PON ke V di Bandung, 30 September 1961, Regu Basket Putri Kontingen Jawa Barat berfoto sebelum bertanding pada PON V, 1 Oktober 1961, dan berkas Pendaftaran benda antik berusia 50 tahun bernama "Piring Cupang Sandang" disertai gambar, 23 Desember 1976.

Keadaan **Lingkungan Hidup dan Pesona Alam** juga banyak digambarkan melalui foto seperti pemandangan Kawah Kamojang di Garut

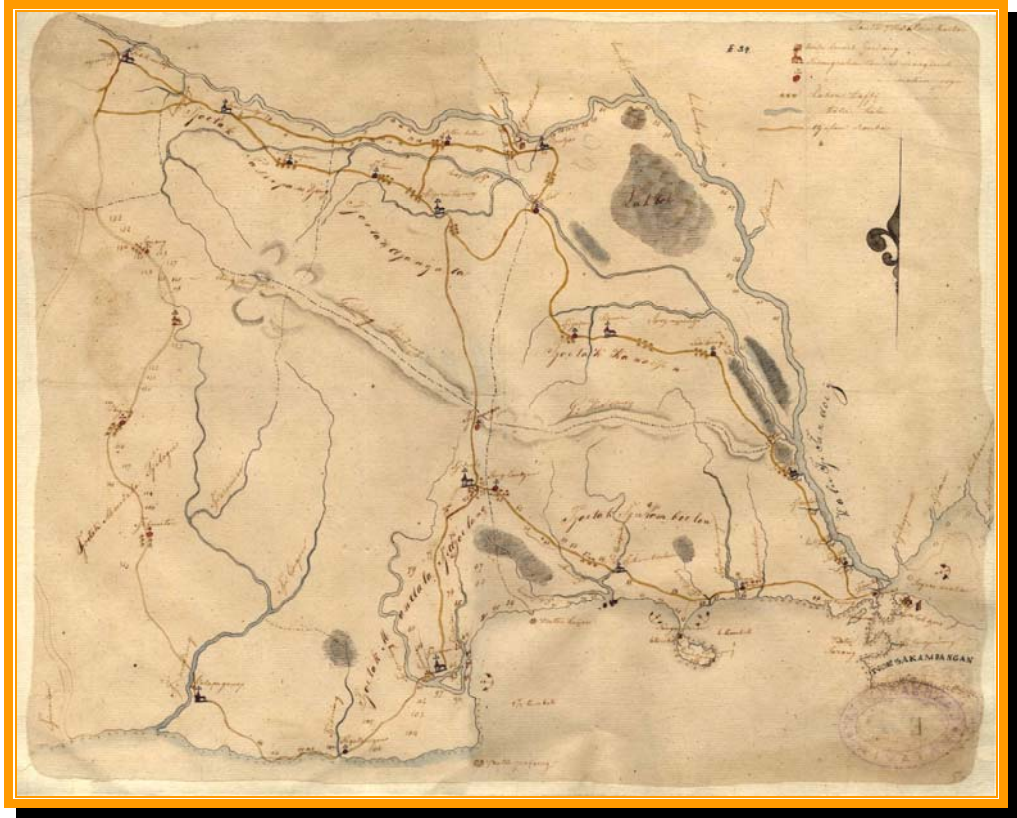
tahun 1949, Pemandian Salabintana Sukabumi 1950, Gunung Tangkuban Perahu sedang mengeluarkan lahar panas di Lembang 1950, Pemandangan di dalam Kebun Raya Bogor tanggal 27 Mei 1951, Pemandangan air terjun Maribaya Bandung 1958, Laporan Asisten Residen Bogor tentang banjir Kali Ciliwung yang menghancurkan bendungan dan rumah-rumah, 1895, tanggul Kali Cimanuk di Desa Panjindangan Wetan Kecamatan Sindang, Indramayu yang hancur diterjang air bah pada tanggal 14 Desember 1957, Rumah-rumah penduduk di Desa Panjindangan Wetan Kecamatan Sindang, Indramayu yang runtuh akibat banjir di kali Cimanuk 1957, Pidato Presiden Soekarno pada Rapat Umum Pemberian Hadiah atas kemenangan Kota Garut sebagai Juara Pertama dalam Lomba Kebersihan Kota pada tanggal 16 Desember 1960 serta pada bagian akhir ditampilkan Bencana alam tanah longsor akibat hujan yang terus menerus di Sukabumi, 19 Januari 1965

DAFTAR PUSTAKA

- Cribb, Robert B. *Gejolak Revolusi di Jakarta 1945 – 1949*. Jakarta: Grafiti, 1990.
- Djayusman. *Bandung Lautan Api*. Bandung: Angkasa, 1986.
- Kementerian Penerangan. *Republik Indonesia Kotapraja Djakarta Raja*. Jakarta, 1952.
- Kementerian Penerangan. Republik Indonesia. *Provinsi Jawa Barat*. Jakarta, 1952.
- Kosoh, S. et.al. *Sejarah Daerah Jawa Barat*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984.
- Musin, Emilia B. "Persetujuan Renville". *Seminar Sejarah Nasional II*. Yogyakarta, 1970.
- Nasution, A.H. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*. Jilid II. Bandung: Angkasa, 1978.
- Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat. *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat*. Bandung: Pemda Tingkat I Jawa Barat, 199.
- Poesponegoro, Marwati D. dan Nugroho Notokusanto. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Smail, John R.W. *Bandung in Early Revolution 1945 – 1946*. New York: Ithaca, 1964.
- Sutanto, Himawan. *Perintah Presiden Soekarno: "Rebut Kembali Madiun"* Jakarta: Sinar Harapan, 1994.
- Taylor, Alastair M. *Indonesian Independence and United Nations*. London: Stevens and Sons, 1960.
- Tuhuteru, J.M.A. *Riwayat Singkat Berdirinya Negara Pasundan*. Jakarta: Jawa tan Penerangan Pemerintah, t.t.
- Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara. *Profil Provinsi Republik Indonesia : Jawa Barat*. Jakarta, 1992.

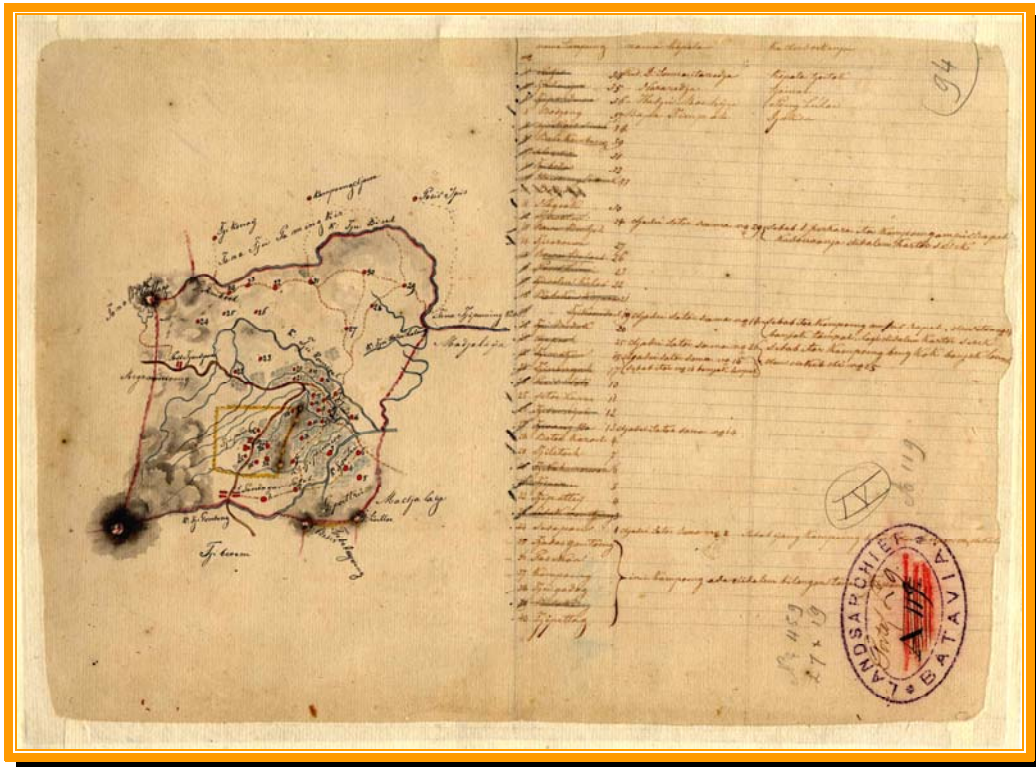
CITRA JAWA BARAT DALAM ARSIP

Geografi



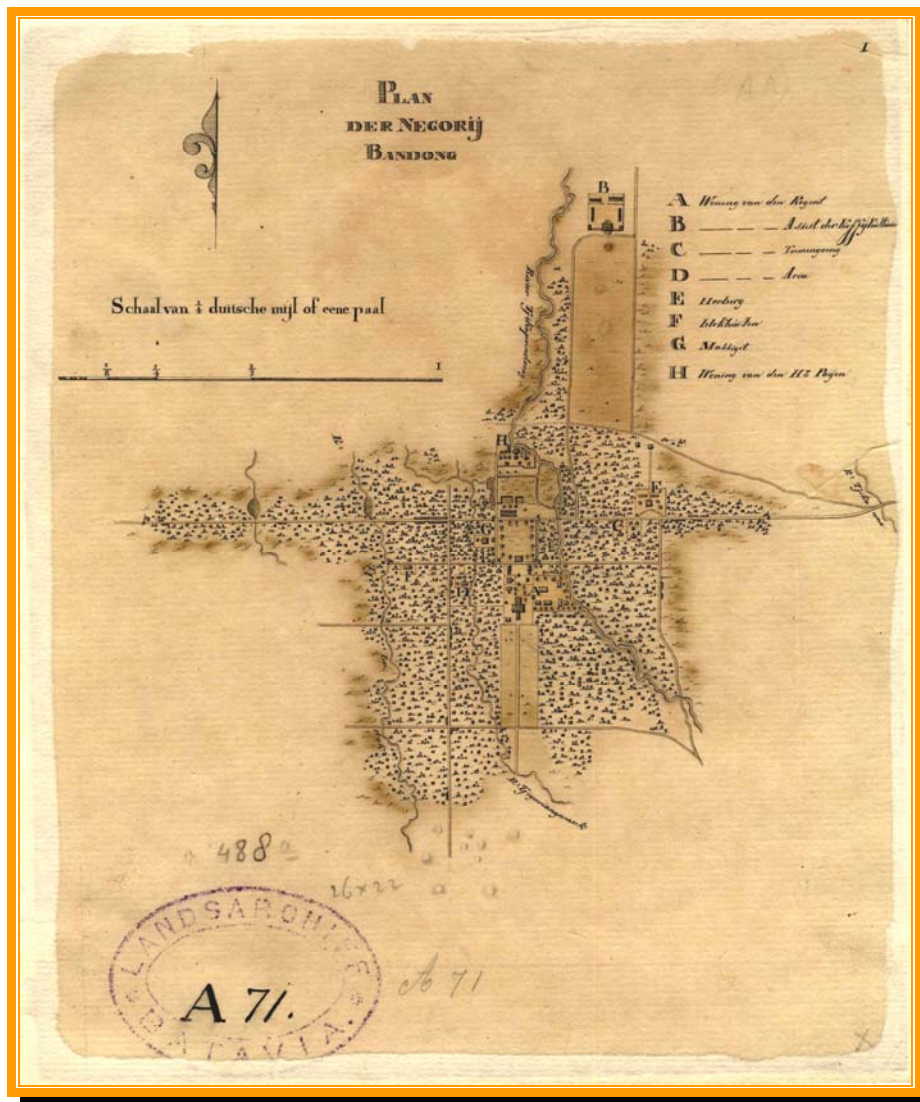
Peta bagian barat Priangan di bawah aliran
Sungai Citandui,
tahun 1830.

ANRI : F. de Haan No. E.34



Sketsa Cipanas Distrik Ciputri Kabupaten Cianjur Karesidenan Priangan, tanpa tahun.

ANRI : F. de Haan No. A. 119



Peta Rencana Kota Bandung,
tanpa tahun.
ANRI : F de Haan No A. 71

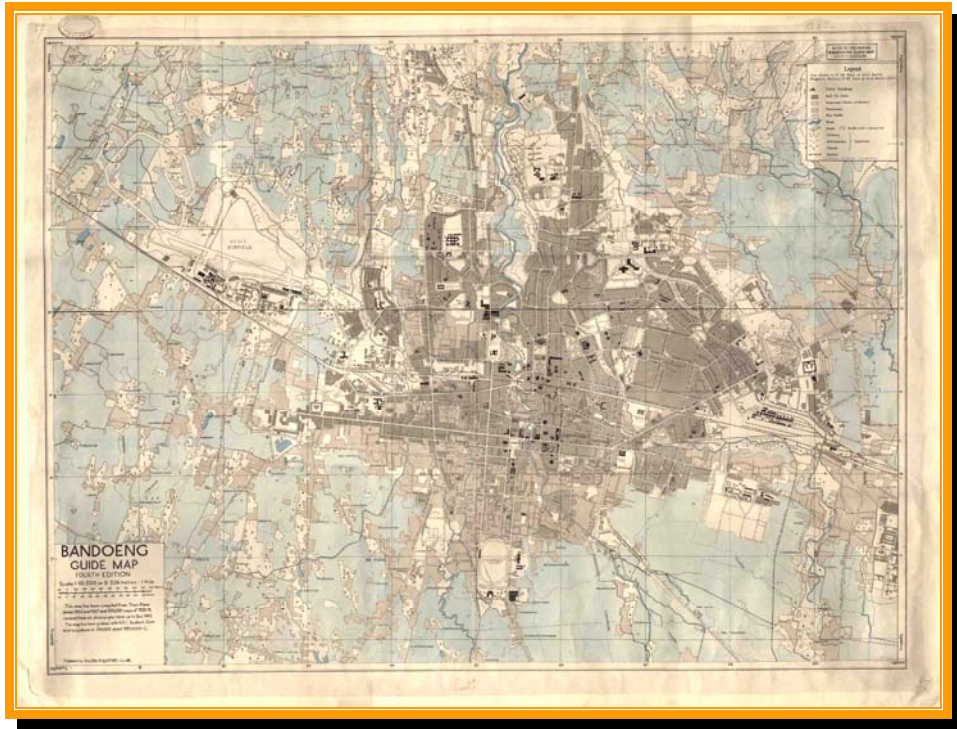


Peta Daerah Cirebon,
tanpa tahun.
ANRI : F de Haan No K. 13



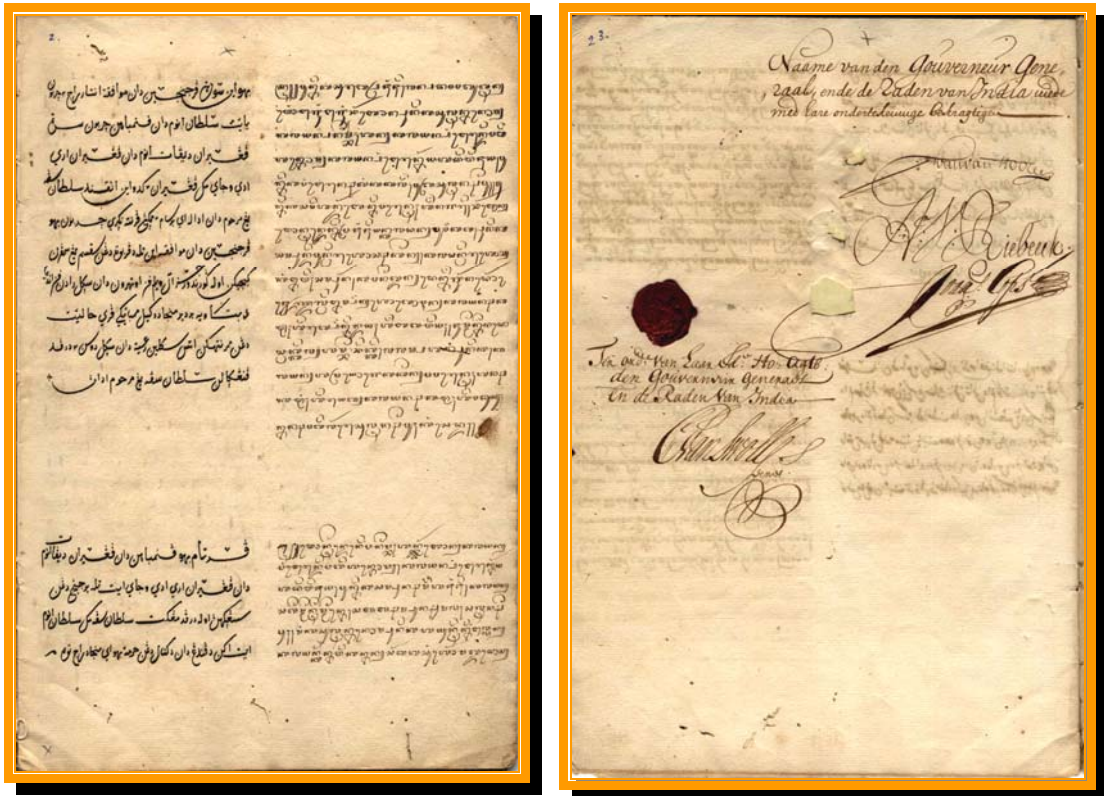
Sketsa Wilayah Puncak,
tanpa tahun.

ANRI : F de Haan No E.35



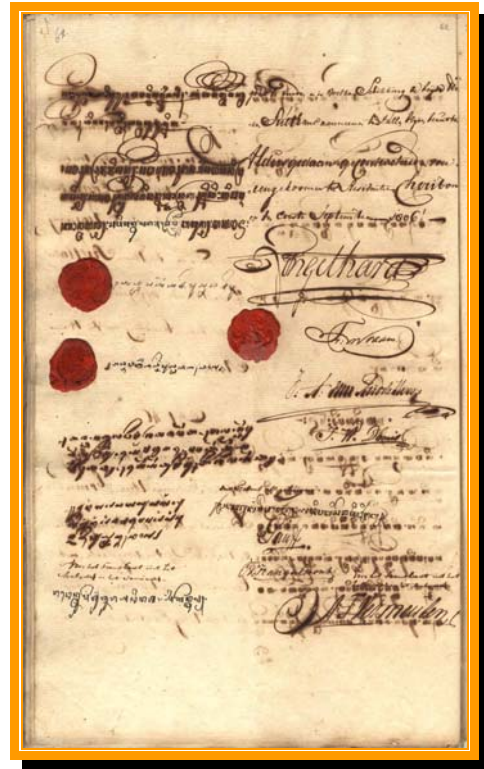
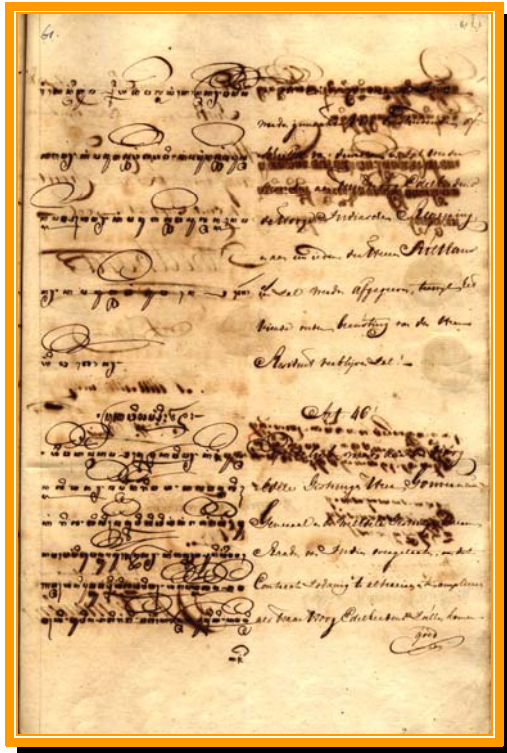
Peta Kota Bandung,
Februari 1946.
ANRI : Topografi No 1282

Pemerintahan



Akta perjanjian nomor 6 tahun 1699 tentang mufakat raja-raja Cirebon antara lain : Sultan Anom, Panembahan Cirebon, Pangeran Dipati Cirebon dan Pangeran Arya Adiwijaya untuk pembagian kekuasaan pemerintahan atas Negeri Cirebon, 4 Agustus 1669.

ANRI : Cirebon No. 38/5



Akte Perjanjian antara Pemerintah Belanda dengan Sultan Kasepuhan dan Sultan Anom dari Cirebon tentang pengakuan kekuasaan Belanda atas Negeri Cirebon, 1 September 1806.

ANRI : Cirebon No.38/8

Model 1.

ALGEMEENE SECRETARIE.

, den 6den September 1925.-

No. 5.-

Gelet op de brieven van den Gouvernements Secretaris en den 1sten Gouvernements Secretaris onderscheidenlijk van 19 September 1923 en 2 September 1924 Nos. 2201/II en 1960/II;

Gelezen de brieven:

- a. van den Minister van Koloniën van 23 Augustus 1924, 4de Afdeling, No. 6/1096;
- b. van den wd. Adviseur voor de decentralisatie van 21 Januari 1925 No. 114/Z;
- c. van den Regeerings-Commissaris voor de bestuurs hervorming van 8 Augustus 1925 No. 143;

De Raad van Nederlandsch-Indië gehoord (advies van 28 Augustus 1925 No. XIV);

Is goedgevonden en verstaan:

Te schrijven als volgt:

Aan

No. 666/5.-

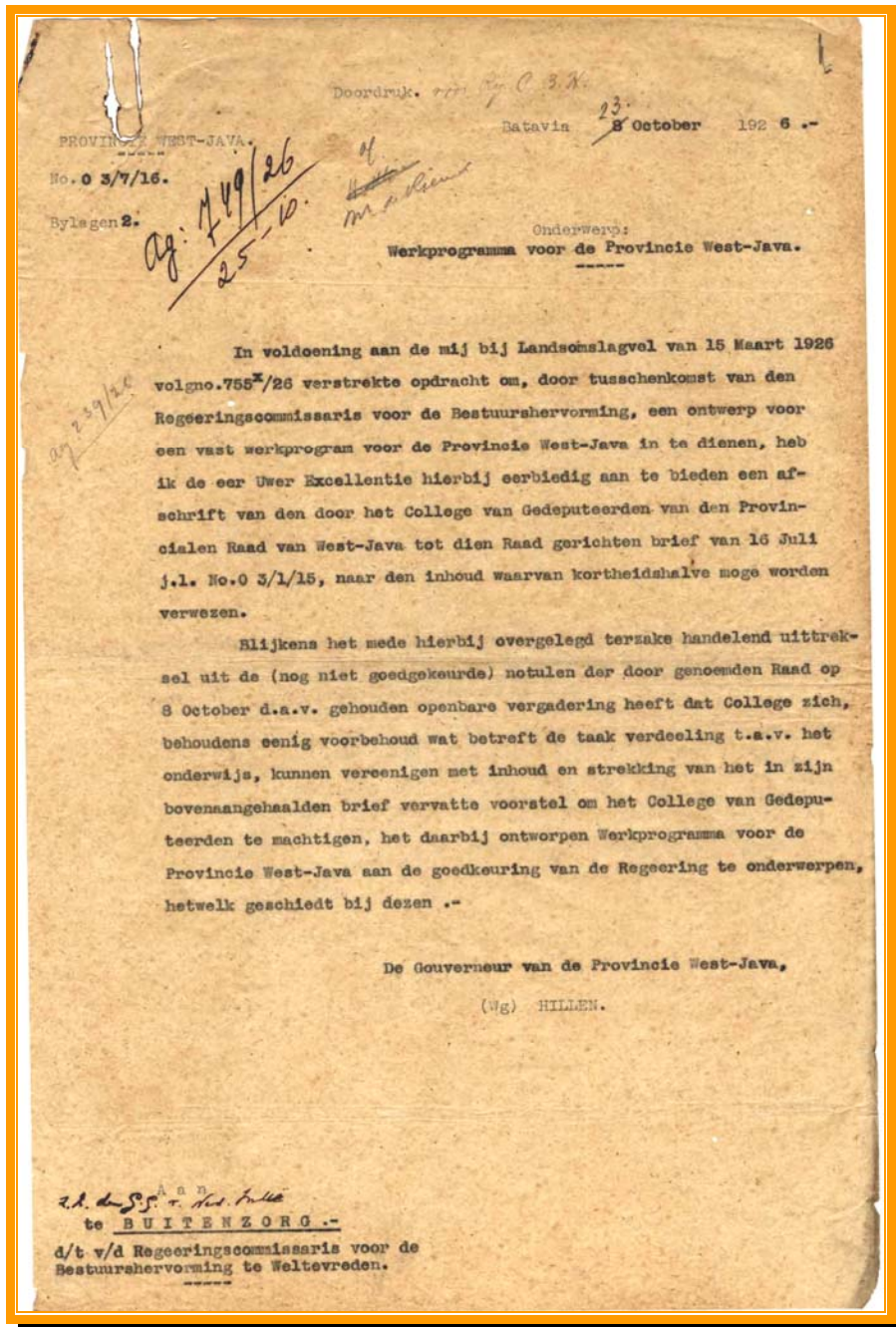
den Heer Minister van Koloniën.-

By schrijven van 23 Augustus 1924, 4de Afdeling No. 6/1096 heeft Uwer Excellenties ambtvoorganger uitdrukkelijk bekend gesteld dat naar zijne meening de stadsgemeenten in de provincie zullen moeten worden omgevormd tot gemeenschappen op de basis van artikel 67 c van het Regeeringsreglement. Naar aanleiding hiervan heeft de toenmalige wd. Adviseur voor de Decentralisatie in zijn onder nummer 1876 van het loopend mailrapport in afschrift overgelegden brief van 21 Januari j.l. No. 114/Z met betrekking tot de wijze waarop de positie der stadsgemeenten in het provinciaal verband moet worden geregeld in overweging gegeven om te beslissen dat in beginsel wordt aangenomen de gemeenten in de provincies te brengen onder de werkingssfeer van evengenoemd artikel van het Regeeringsreglement en dat eerst na de instelling van de provinciale en de regentschapsraden in West-Java de herziening van de decentralisatie-wetgeving met het oog op de evenbedoelde principieele beslissing aan de orde behoeft te komen.

Notens

Notulen *Besluit* No. 5, Tanggal 6 September 1925
tentang pembentukan Provinsi Jawa Barat .

ANRI : Notulen Besluit No. 5 -7 September 1925



Program kerja Provinsi Jawa Barat di bidang pendidikan,
pertanian, peternakan, dan kesehatan,
13 Oktober 1926.

ANRI : Binnenlands Bestuur No. 923

Afschrift.

G E H E I M

No. 29 X.

Buitenzorg, den 24sten Januari 1928.-

Onderwerp: Verslag over ervaring en resultaten
der bestuurs hervorming in West-Java.

Naar aanleiding van het telegram van den Minister van Koloniën van 29 December 1927 No. 1150 houdende verzoek om toezending ten behoeve van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van een overzichtelijk en voor publicatie geschikt up-to-date rapport over de werking van de provincie West-Java en de daarmee opgedane ervaringen heeft U HoogEdelGestrenge bij schrijven van 4 dezer No. 6 betoogd, dat inmenging van de Staten-Generaal in de doorvoering van de bestuurs hervorming h.t.l. in strijd met de Grondwet zou zijn. De desbetreffende beschouwingen en opmerkingen vervat in Uw aangehaalden brief kan de Gouverneur-Generaal niet onderschrijven; Zijne Excellentie is echter van meening dat het geen nut heeft daarop in te gaan omdat Zij zich zonder meer verplicht acht aan de wenschen van den Minister gevolg te geven. Waar evenwel, gelijk ook door U HoogEdelGestrenge werd gereleveerd, tegenover een zelfde verzoek van den Volksraad een afwijzende houding is aangenomen, zou het naar het oordeel van den Landvoogd zeer bezwaarlijk aangaan indien thans vanwege de Indische Regeering ten behoeve van de Tweede Kamer wel een verslag als hier bedoeld zou worden samengesteld. In verband hiermede deelde Zijne Excellentie bij telegram van 7 dezer No. 4, hetwelk werd bevestigd bij den U in afschrift toegezonden Indischen brief van 9 dezer No. 2/ix, aan den Minister mede, dat Zij aan het onderwerpelijk verzoek

Aan
den Regeerings-Commissaris voor de
Bestuurs hervorming (Eigenhandig)
(Afschrift verl. a/d Raad van N.I. (Secr.)
en den Gouverneur West-Java) (Geh.Eig.)

Laporan mengenai akibat adanya pembentukan Pemerintahan
di Jawa Barat ,
24 Januari 1928.

ANRI : Binnenlands Bestuur No. 1384



Peristiwa penyerahan Belanda pada Jepang tanpa syarat di Kalijati, Subang, 8 Maret 1942.

www.gimonca.com



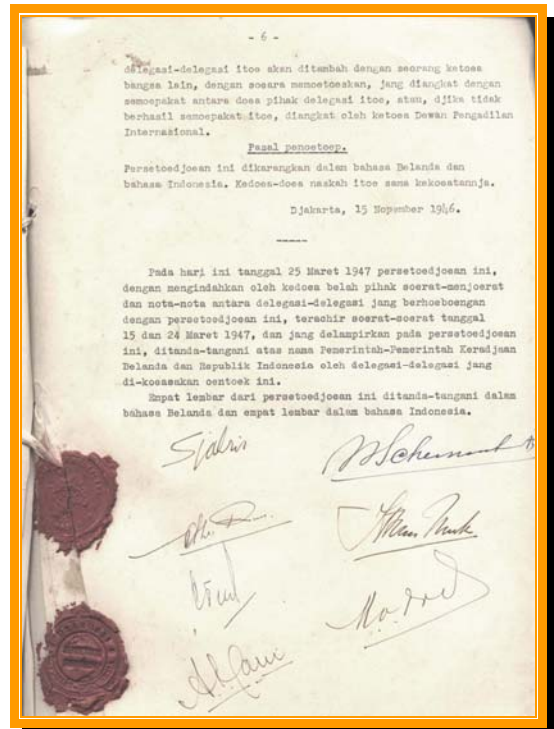
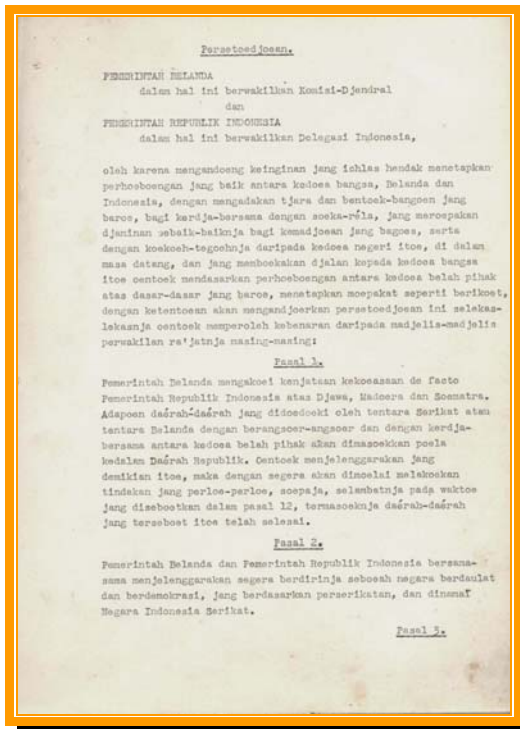
Gedung tempat perundingan Perjanjian Linggarjati antara
Indonesia dengan Belanda di Kuningan, Jawa Barat ,
11 November 1946.

ANRI : IPPHOS, 1946



Penandatanganan Perjanjian Linggarjati
oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir,
25 Maret 1947.

ANRI : IPPHOS, 1947



Perjanjian Linggarjati,
25 Maret 1947.

ANRI : Koleksi Khusus

MEMORANDUM.

copie:Dir.Kab.

16 Februari 1948

copy

ALGEMENE SECRETARIE No. 1215 Ingekomen 28-2-48 Bundel 1917	Van : C.H.V. de Villeneuve Aan : Zijne Excellentie den Lt.Gouverneur-Generaal. d.t.k.: D.G.A.Z.
---	---

10/2

Ingevolge modelinge opdracht van U.E. heb ik heden middag de sultan Anom van Cheribon tesamen met de "eren Raden Soetedjo en Tjan Soen Kioe, beiden lid van het comité tot instelling van een Daerah Istimewa, ontvangen.

Ieder der genoemde Heren heeft een inleidend betoog gehouden over de wenselijkheid van het instellen van een Daerah Istimewa Keresidenan Tjirebon. Vervolgens werd mij bijgaand request d.d.8 dezer, gericht tot den Landvoogd, overhandigd.

Ik heb de Heren mede gedeeld dat ik hun verzoek aan den Lt.G.G. ter hand zou stellen en hen verder duidelijk gemaakt dat de "egering deze aangelegenheid thans niet in behandeling zal kunnen nemen, daar eerst dient te worden afgewacht welke resultaten de a.s. West-Java Conferentie zal opleveren. Ik heb daaraan toegevoegd dat dit niet betekent dat het verzoek na de West-Java Conferentie (en de eventuele vorming van een Negara Djawa Barat) wèl in gunstige overweging zal worden genomen. Ik heb er daarbij op gewezen dat versnippering van krachten ongewenst is, hetgeen in casu te meer geldt waar de zg. sultanaten Sepoe en Cheribon er ieder ook nog een eigen standje opna houden.

Op mijn vraag hoeveel leden de in het request genoemde Partai Ra'jat Tjirebon (P.R.T.) telde, werd mij een getal van 3 000 genoemd; het in het request genoemde aantal van 300 000 vormt blijkbaar de vermeende aanhang.

Tjg/13

Permohonan pembentukan Daerah Istimewa Karesidenan
Cirebon,
16 Februari 1948.

ANRI : Algemene Secretarie No.1215

PROCES - VERBAAL

Op heden Zaterdag, de vier en twintigste April negentienhonderd acht en veertig, des voormiddags te elf uur, is voor mij, Raden Toemenggoeng Djoevara, Voorzitter van het Parlement Pasoendan, ter openbare vergadering van dit Parlement in zijn vergaderzaal, gelegen aan de Wilhelmina-Boulevard No.9 te Bandoeng, verschenen:

RADEN ADIPATI ARIA WIRANATAKOESUMAH,

die door genoemd Vertegenwoordigend Lichaam in zijn openbare vergadering van de vierde Maart negentienhonderd acht en veertig tot Wali-Negara van de Staat Pasoendan is verkozen;

En is vervolgens door mij aan Hem voorgehouden de eed, als voorgeschreven bij artikel 33 van de Regeling Staatkundige Organisatie van de Negara Pasoendan, luidende als volgt:

"Saja bersumpah, bahwa saya oentoeok dapat terpilih mendjadi Wali-Negara, baik setjara langsoeng macepoen dengan djalan tidak langsoeng, atas nama atau dengan djalan apa djoega, kepada siapapoen tidak akan atau telah memberikan atau mendjandjikan apa-apa".

"Saja bersumpah, bahwa saya dalam djabatan ini oentoeok melakoekan atau menoeenda sesoeatoe, dari siapapoen djoega tidak akan menerima sesoeatoe perdjandjian atau hadiah, baik setjara langsoeng macepoen dengan djalan tidak langsoeng".

"Saja bersumpah, bahwa saya akan taat kepada peratoeran-peratoeran Oendang-oendang Negara, dan bahwa saya akan melindoengi kemerdekaan oemoem dan istimewa, begitoe-poen hak-hak dari sekalian pendoedoek Negara, serta oentoeok memelihara dan memadjoekan kesedjjahteraan oemoem dan kesedjjahteraan istimewa akan mempergoenakan segala oesaha, jang diberikan kepada saya oleh Oendang-oendang dan peratoeran-peratoeran lain, sesoeal dengan kewadajiban seorang Wali-Negara jang baik".

"Ik zweer (verklaar), dat ik, om tot Wali-Negara verkozen te worden, middellijk noch onmiddellijk onder welke naam of welk voorwendsel ook, aan niemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven of beloofd of geven zal".

"Ik zweer (beloef), dat ik om iets in deze bediening te doen of te laten, van niemand hoegenaamd enige belofte of enig geschenk zal aannemen, middellijk noch onmiddellijk".

"Ik zweer (beloef), dat ik de voor de Staat geldende wettelijke bepalingen zal eerbiedigen en dat ik de algemene en bijzondere vrijheden en rechten van alle inwoners van de Staat zal beschermen en tot instandhouding en bevordering van de algemene en bijzondere welvaart alle middelen zal aanwenden, welke de wetten en andere regelingen te mijner beschikking stellen, zoals een goed Staatshoofd schuldig is te doen".

"Zo waarlijk helpe mij God Almachtig".
("Dat verklaar en beloef ik").

waarna door hem op de wijze zijner Godsdienstige gezindheid de eed in mijn handen is afgelegd.

Van deze beëdiging is dit proces-verbaal, in viervoud, opgemaakt om te dienen waar zulks behoort.

Aldus gedaan ter openbare vergadering van 24 April 1948 te Bandoeng.-

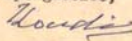
De Beëdigde,



De Voorzitter van het Parlement Pasoendan,



De Hoofdpenghoeloe,



Proses verbal sumpah Wali Negara dari Pasundan
Adipati Arya Wiranata Kusumah,
10 Mei 1948.

ANRI : Algemene Secretarie No.1230

A F S C H R I F T.

TERRITORIAAL TS TROEPENCOMMANDO
WEST-JAVA.

BANDOENG, 15 Januari 1949.

No. G/183/1308/ VERTR/ZEER VEEL SPOED.

Onderwerp: Verming Residentie Poerwakarta.

Mijn telegram nr.: GS/22/VERTR, dtgr. 121830.

1. Ter verduidelijking en aanvulling van b.a. telegram, heb ik de eer Uwer Excellentie als volgt te berichten.

2. Onderwerpelijke maatregel werd ongeveer 4 maanden geleden aangekondigd door de toenmalige Recomba van W-Java, waarbij als vermoedelijke datum van invoering werd aangegeven Nov./Dec. 1948.

3. Dsz. is hierop min of meer gerekend bij de maatregelen om te komen tot een zo goed mogelijke samenwerking tussen BB. en militairen, in het bijzonder v.w.b. de vaststelling van de grens tussen 1e en 2e Inf.Brig.Gp. en van die tussen verschillende bataljonsvaksen. Hierbij is uitgegaan van het principe om het brigadevak te doen samenvallen met de residentie en het bataljonsvak met het regentschap.

4. Hoewel in feite de geprojecteerde troepenverschuivingen niet zouden behoeven te wachten op de tot standkoming van de nieuwe residentie, is dit m.h.o. op de samenwerking met het BB en politie wel zeer gewenst, aangezien dit gebied thans uit Batavia wordt bestuurd en de functionarissen aldaar en het Federale gebied alsook dit gedeelte van het Pasoendan-gebied dienen te behartigen.

5. Een spoedige uitvoering van onderwerpelijke aangelegenheid zal daarom medewerken aan een snellere pacificatie en zal daarom dsz. zeer op prijs worden gesteld.

typ.: GW/GK.
Coll.

De Territoriaal- ts Troepen-
commandant West - Java,
De Generaal-Majoor,
w.g.

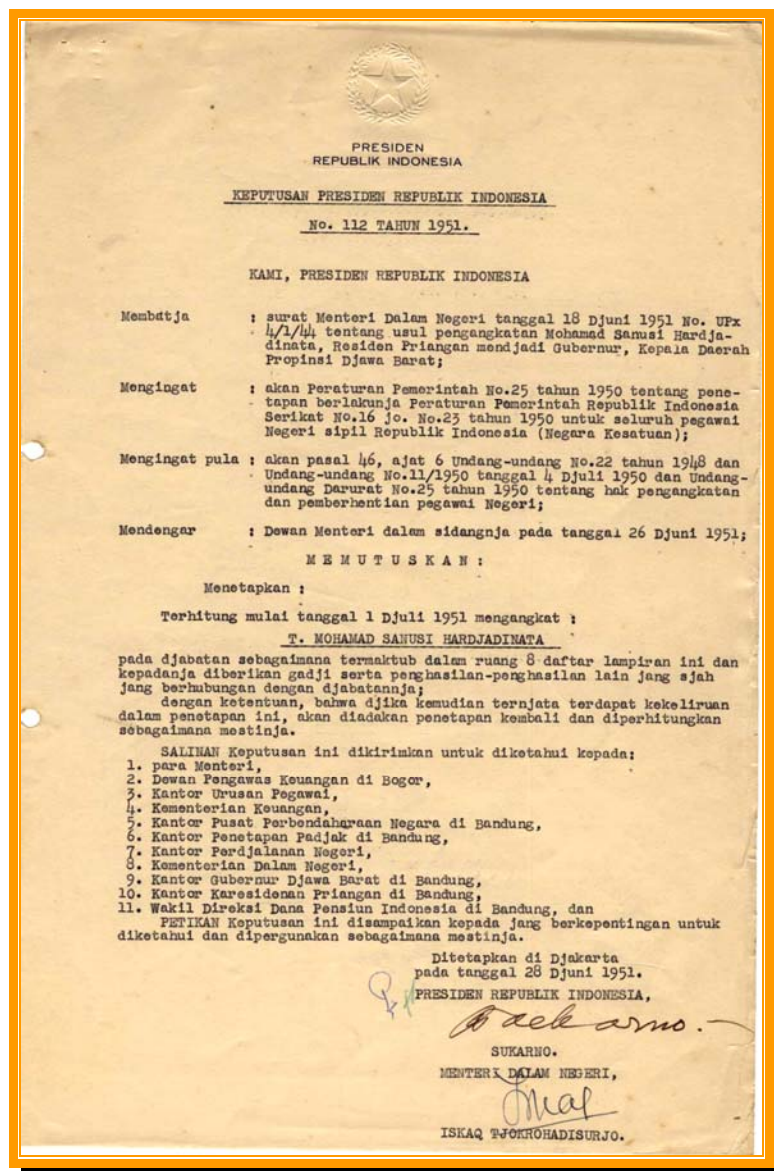
E.ENGLES.

AAN: Z.E. de Legercommandant.

Ddr.: Chef Generale Staf.
C.-1 Inf.Brig.Gp.
C.-2 Inf.Brig.Gp.

Salinan surat tentang pembentukan
Karesidenan Purwakarta,
15 Januari 1949.

ANRI : Algemene Secretarie No .1216



Keputusan Presiden RI nomor 112 Tahun 1951 tentang pengangkatan T. Mohamad Sanusi Hardjadinata (*Sic.*), Residen Priangan menjadi Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat , terhitung mulai tanggal 1 Juli 1951, 28 Juni 1951.

ANRI : Sekkab, Keputusan Presiden No. 331



R. Mohamad Sanusi Hardjadinata sedang diambil sumpahnya
dalam pelantikan sebagai
Gubernur Provinsi Jawa Barat ,
1 Juli 1951.

ANRI : Kempen 514474



R. Mas Soetardjo
Kartohadikoesoemo
Gubernur Jawa Barat
Periode 19 Agustus 1945
Deppen No. 45.01



Mr. Datuk Djamin
Gubernur Jawa Barat 1945-
1946
Periode *Deppen No.A 46.01*



Mr. Mas Sewaka
Gubernur Jawa Barat Periode
1947-1948
dan 1950-1951
Deppen No.A 85.02



R. Muhamad Sanoesi
Hardjadinata
Gubernur Jawa Barat Periode
1951-1956
Deppen No. 56.01



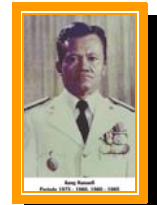
Ipik Gandamanah
Gubernur Jawa Barat Periode
1956-1960
Deppen No.A 85.03



Mashudi
Gubernur Jawa Barat Periode
1960-1965 dan 1965-1970
Deppen No. 70.01



Solihin G.P
Gubernur Jawa Barat Periode
1970-1975
Deppen No. 75.01



Aang Kunaefi
Gubernur Jawa Barat Periode
1975-1980 dan 1980-1985
Deppen No.A 85.04



Yogi S.M
Gubernur Jawa Barat Periode
1985-1990 dan 1990-1993
Deppen No. 93.01



H.R Nuryana
Gubernur Jawa Barat Periode
1993-1998 dan 1998-2003
Deppen No. 03.01



Dani Setiawan
Gubernur Jawa Barat Periode
2003-Sekarang
Deppen No.06.01

Foto-Foto Gubernur Jawa Barat
Basipda Jawa Barat : Deppen No.1



Perjalanan Presiden Soekarno ke Tasikmalaya,
terlihat sambutan rakyat sangat meriah sepanjang
jalan raya di Tasikmalaya,
10 Juli 1951.

ANRI : Kempen 514438

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 39 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Propinsi
Djawa Barat tanggal 22 Agustus 1951 No. 16/X/51,
jang menetapkan "Pedoman untuk Dewan Pemerintah
Daerah Propinsi Djawa-Barat";

Membatja pula : surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Barat
tanggal 24 Nopember 1951 No. 3622/23G/Huk/Perum/51
dengan perantaraan Menteri Dalam Negeri, jang me-
minta agar Pedoman tersebut diatas disahkan;


Mengingat : pasal 15 dari Undang-undang No. 22 tahun 1948;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan "Pedoman untuk Dewan Pemerintah Daerah Propinsi
Djawa-Barat", sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwa-
kulan Rakjat Daerah Propinsi Djawa-Barat tanggal 22 Agustus 1951
No. 16/X/51.

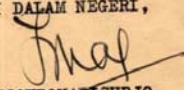
Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 13 Februari 1952.

 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI,


ISKAQ TJOKROHADISURJO.

Keputusan Presiden RI nomor 39 tahun 1952 tentang
Pengesahan Pedoman untuk Dewan Pemerintah Daerah
Provinsi Daerah Jawa Barat ,
13 Februari 1952.

ANRI : Sekkab Keputusan Presiden No. 511

SIDANG HARIAN S.B.P.U. TJABANG SOREANG

MENJOKONG PERNJATAAN KONGRES KESATU SOBSI DAERAH
DJAWA-BARAT TENTANG PENGOPERAN DJAWATAN PEKERDJAAN
UMUM OLEH DAERAH OTONOM PROPINSI DJAWA-BARAT.

Sidang harian Dewan Pimpinan S.B.P.U. Tjabang Soreang pada hari Senin tanggal 8 Maret 1954 dan dihadiri pula oleh wakil SOBSI Tjabang Bandung Selatan, telah mendiskusikan dengan mendalam Pernyataan Kongres ke I SOBSI Daerah Djawa-Barat tentang pengoperan Djawatan Pekerdjaan Umum oleh Daerah Otonom Propinsi Djawa-Barat yang diselenggarakannya pada tgl. 7 s/d 11 Februari 1954 di Bandung dengan kutipannya sebagai berikut:

= Penjerahan Djawatan Pekerdjaan Umum setjara integral kepada Daerah otonom Propinsi Djawa-Barat pada tgl. 17 Oktober 1953 dengan surat no.P.30/2/6 serta penarikan kekuasaan Pekerdjaan Umum Propinsi mengenai kepegawasian dengan disetujui oleh Menteri Dalam Negeri dengan suratnya tgl. 5 Agustus 1953 No.Dec./29/10/16, atas jawaban dari Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga tgl. 8 Djuli 53 yang mengatur pelaksanaan penjerahan sbb:

- a. Pegawai dari golongan Va keatas tetap mendjadi pegawai Negri, dan kedudukannya ialah tenaga diperbantukan.
- b. Pegawai golongan IVc kebawah otomatis mendjadi pegawai-otonom dan ketjuaiikan tenaga2-ukur.
- c. Pegawai golongan IVc kebawah boleh tidak pindah kedaerah otonom dengan idzin Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga.

Berdapat:

Kemungkinan pelaksanaan surat2 keputusan tsb. diatas dapat mengakibatkan :

- a. Memberikan kesan memetjsh-belah dikalangan Pegawai-negri, disebabkan akan merugikan Pegawai Golongan IVc kebawah yang merupakan bagian/djumlah terbesar.
- b. Tidak dipekerdjakan seluruh pekerdja-harian akan menimbulkan massa onslag dan pengangguran.
- c. Pengoperan itu akan menimbulkan kesulitan pelaksanaan masalah2 perburuhan yang telah ditjapai antara Djawatan Pekerdjaan Umum dan S.B.P.U.

Berdasarkan keterangan2 serta pendapat2 tersebut diatas, maka Kongres dengan suara bulat berpendirian:

" BAHWA PELAKSANAAN/PEMINDAHAN DJAWATAN PEKERDJAAN UMUM KEPADA DAERAH OTONOM PROPINSI DJAWA-BARAT TIDAK BOLEH MERUGIKAN KAUM BURUH "

Maka sjarat2 dibawah harus diperhatikan :

1. Supaja pengoperan kedaerah otonom Propinsi tidak dihubungkan dengan masalah biaya dan formasi, sehingga tidak perlu merubah status dan gadjih para pegawai/buruh.
2. Penerimaan setjara integral harus sonder sjarat.

3. Djuga

Sokongan dari Serikat Buruh PU cabang Soreang terhadap pernyataan SOBSI Jawa Barat tentang pengoperan Jawa tan Pekerjaan Umum oleh Daerah Otonom Provinsi Jawa Barat , 8 Maret 1954.

ANRI : Kabinet Presiden No 869



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 216 TAHUN 1954.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja** : surat bersama dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tanggal 6 Agustus 1954 No. Des.45/2/44 yang mengusulkan agar kepada Kota Ketjil Sukabumi diperkenankan memakai lambang Kota seperti yang ditetapkan dalam keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Kota Ketjil tersebut tanggal 28 Oktober 1953 No. 27/1953/DPRD.;
- Menimbang** : tidak berkeberatan memperkenankan kepada Kota Ketjil Sukabumi untuk memakai lambang seperti ditetapkan dalam keputusan tersebut diatas;
- Mengingat** : a. pasal 1 dari ordonantie tanggal 7 September 1928 No. 68 (Staatsblad 1928 No. 394); dan
b. pasal 142 dan 85 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Memperkenankan kepada Kota Ketjil Sukabumi untuk memakai lambang Kota seperti ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Sementara Kota Ketjil Sukabumi tanggal 28 Oktober 1953 No. 27/1953/DPRD.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan,
2. Menteri Dalam Negeri,
3. Menteri Kehakiman,
4. Arsip Negara,
5. Kota Ketjil Sukabumi.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 30 Oktober 1954.

Presiden REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno

SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI c.i.,

Zainul Arifin

ZAINUL ARIFIN.

MENTERI PENDIDIKAN, PENGADJARAN
DAN KEBUDAJAAN

Muhammad Yamin

MUHAMMAD YAMIN.

Keputusan Presiden RI No 216 tahun 1954 tentang Penggunaan
Lambang Kota Sukabumi,
30 Oktober 1954.

ANRI : Sekkab Keputusan Presiden No.1107

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 134 TAHUN 1958.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. peraturan-daerah Daerah Swatantra tingkat II Tjandjur tanggal 23 Djuli 1957, yang diadakan untuk merubah peraturan tentang pemungutan opsen atas pokok-pokok pajak Verponding dan rumah Tangga;
b. surat Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Mei 1958 No.Des. 9/19/23 yang mengusulkan agar supaya peraturan-daerah Daerah Swatantra tingkat II Tjandjur tanggal 23 Djuli 1957 disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah Daerah Swatantra tingkat II Tjandjur tersebut diatas;
- Mengingat : a. pasal 20 Undang-undang Darurat Pajak Daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No.56);
b. pasal 85 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan peraturan-daerah Daerah Swatantra tingkat II Tjandjur tanggal 23 Djuli 1957, yang diadakan untuk merubah peraturan tentang pungutan opsen atas pokok-pokok pajak Verponding dan Rumah Tangga.

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
4. Dewan Pemerintah Daerah Daerah Swatantra tingkat I Djawa Barat di Bandung (2x).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 2 Djuli 1958.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno

SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI,

Sanoesi Hardjadinata

SANOESI HARDJADINATA.

Keputusan Presiden RI Nomor 134 Tahun 1958 tentang
Pengesahan Peraturan Daerah Swatantra TK II Cianjur
tanggal 23 Juli 1957 yang berisi
Peraturan Pungutan Pajak, 2 Juli 1958
ANRI : Sekkab Keputusan Presiden No.1703

Politik dan Keamanan



Pembakaran Kota Bandung yang kemudian dikenal sebagai Bandung Lautan Api, 24 Maret 1946.

ANRI : IPPHOS, 1946



Bandung Lautan Api, Jawa Barat ,
24 Maret 1946.

ANRI : IPPHOS, 1946



Mochamad Toha, tokoh yang juga dikenal sebagai
Pahlawan Bandung Selatan,
24 Maret 1946.

Bapisda Jabar : Deppen No.45.07

27. INGGERIS MAMUKSI SOEPAJI KALDAAN
MENDJADI KEROSH.

Tragedi di Bandoeng.

Jogjakarta 27-3 ("UNT RI").

Sedah berdjalan berboelan2, atas persatoedjoean pihak Indonesia den Ingeris, kota Bandoeng dibagi atas 2 bagian, yakni bagian selatan didoedoei oleh pemerintah Indonesia, pihak utara oleh tentara Ingeris dibentoe oleh belande. Seperti sedah galib terjadi dimene2 (Djakarta, Semarang, Soerabaja, Palembang dsb.) maka ditempat jg. didoedoei oleh tentara Ingeris itoe tidak aman, pendoedoei selaloe mendapat ganggoean2 dari pihak Nica jg. bernacang dibawah kekeasaan Ingeris/Nica, begitoe poen didaerah Bandoeng Ootera. Pamboeanhan, pentjoelikan, penganiajaan, panggalodohan reemah setjara so-wenang2 adalah boekan soal jg. gendjil lagi. Pihak Indonesia didaerah sebelah Selatan jg. mengetahoei semoes itoe tetap tenang, den semakin insjaf, bahwa dalam benjak2 hal orang Indonesia ternjata lebih tinggi partideban den derdja2 kamahoesiatjana dari sementara bangsa jg. manngaken dirinjie bangsa kelas atas. Pendooek poen semakin teringat akan tragedie2 di Soerabaja, Semarang den Djakarta, kerna perboestan tentara Ingeris jg. terenggan membantoe belandie itoe. Marak poen mendjadi semakin insjaf akan bahwa jg. mengantjam ketenteraman hidoepnj

4 pada

Ingeris moelei lebih doeloe.

Dari Djakarta dikaberkan bahwa pendooek didaerah Bandoeng Selatan moelei gelisah, ketika pada tg. 19-3 tentara Ingeris mendooeki djalan Fokker jg. termasuk daerah pendooekoean pemerintah Indonesia, dg. tiada setahoe pembesar2 Indonesia. Karena peristiwa tsb. terdjadilah tambak-menambak antara pihak Indonesia den tentara Ingeris jg. menggoenakan artilierie, disamboet oleh pihak Indonesia dg. mortier.

Pada tg. 20-3 ternjata lk. 50 orang Indonesia tiwas kena peloe-roe Ingeris, diantaranya 30 orang adelah pekerdja tehnik djawatan telepon Tegallega. Sementara itoe pihak Ingeris mengatakan, bahwa mortier jg. dilapaskan oleh pihak Indonesia mengenai kamp Rapwi sehingga menjebakkan tiwasnja beberapa orang.

Kedatangan Djenderal Major Didi Kartasmita dan Mr. Sjafroeddin.

Menceroet berita dari Djakarta, pada tg. 22-3 Djenderal Major Didi Kartasmita dg. diiringkan T. Mr. Sjafroeddin wakil menteri Kedeangan pergi ke Bandoeng oentoek memeriksa koadan jg. genting itoe serta mengadakan peroendingan dg. pihak jg. bersangkoeatan. Setiba di Bandoeng Major Didi tidak depat bertemoe dg. pemimpin tentara Ingeris, poen tidak diberi kesempatan pergi ke daerah Bandoeng Selatan. Djenderal Major tsb. kemoedian balik ke Djakarta, oentoek kembali lagi ke Bandoeng pada keesokan harinje tg. 23-3.

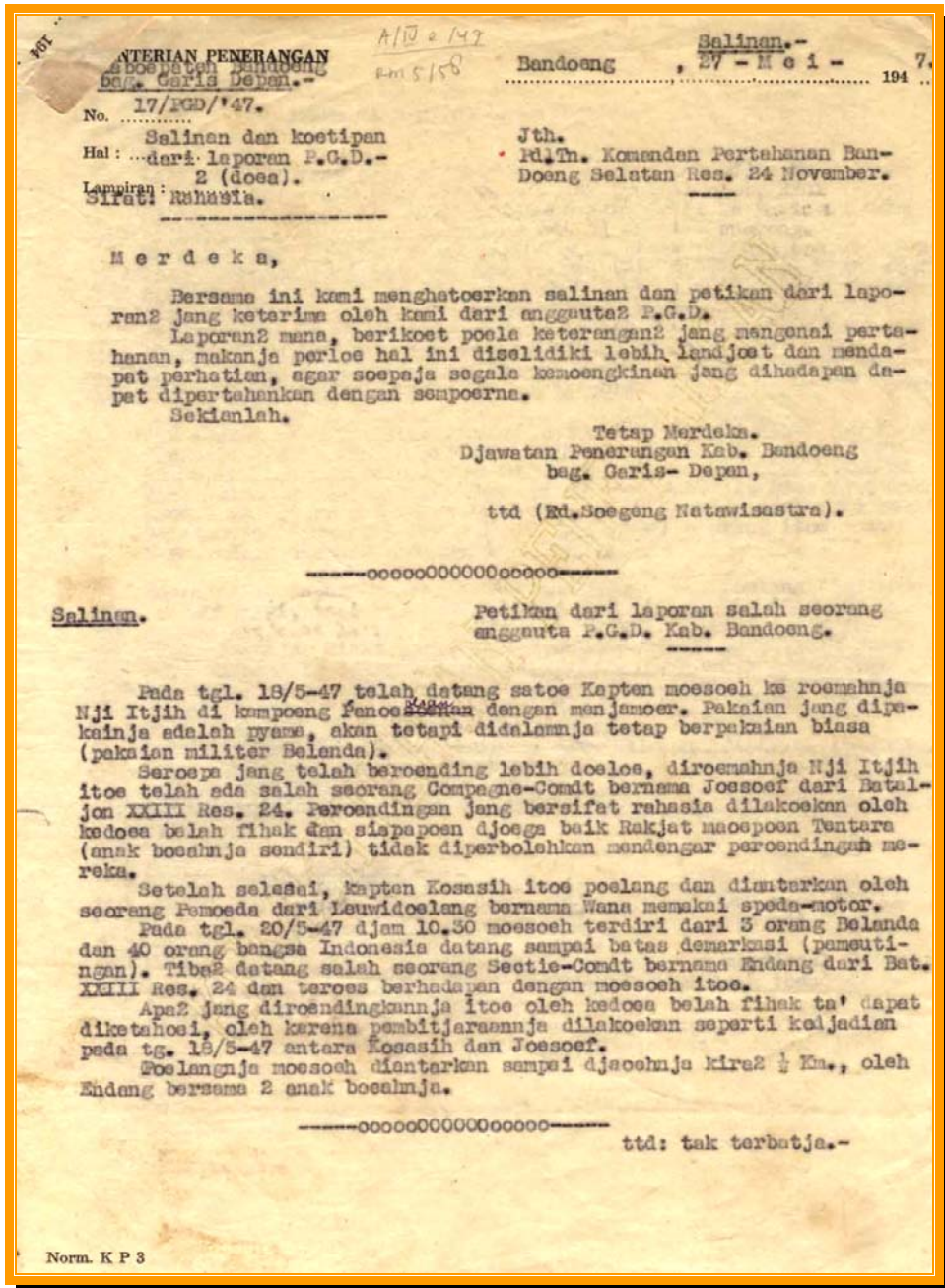
Sementara itoe menceroet berita dari Bandoeng disaboetkan, bahwa dg. perantaraan pemerintah Poesat pihak tentara Ingeris pada tg. 23-3-1946 menjampaike ultimatum kepada pemerintah Indonesia di Bandoeng, yakni soepaja pasoeakan2 bersendjata (T.R.I., Polisi dll.) meninggal-kan kota Bandoeng djarak radius 11 km. dg. pemberitan tempo sampai tg. 24-3 malam djam 12.00. Setelah disadekan peroendingan antara Residen Priangan, Kepala Kota Bandoeng den Komandan Divisi ke III T.R.I., soal ultimatum itoe tidak depat dipoetoeskan sendiri, karena jg. berhak ialah pemerintah Poesat Djakarta.

Oesoel Indonesia memperboesiki soeasana ditolak.

Oleh kerna itoe Komandan Divisi ke III dg. persatoedjoean Ingeris berangkat dg. pesawat Ingeris ke Djakarta. Setelah beroending dg. Pemerintah Poesat, komandan tsb. kembali ke Bandoeng pada tg. 24-3. Pihak kita di Djakarta mengoesoelken soepaja tempo berlokoenja ultimatum itoe dioendoeer, yakni oentoek kepatioan pengoesoeran kita. Oesoel itoe tak depat dipoetoeskan oleh Letnan Djenderal Stopford, sabeloem beroending dg. Letnan Djenderal Hawthorn, komandan divisi Ingeris di Bandoeng. 4 terbung

hari

Berita Peristiwa Bandung Lautan Api tanggal
24 Maret 1946 di Bandung Selatan.
ANRI : Berita Antara 27 Maret 1946



Laporan keadaan keamanan di daerah Dayeuh Kolot,
Bandung Selatan, 21 Mei 1947.

ANRI : Kempen No. 388

Belaporan.

Jang bertanda tangan dibawah ini, kami M.Sastrodihardjo, Pembantu Inspektur Kl.II jang dikerdjakan di Kantor Kepolisian Karesidenan Djakarta di Subang, mengatarkan pelaporan tentang pengalaman kami selama ada penjerbuan Belanda untuk dapat dipergunakan balamana perlu.

Ketika pada tg. 22 Juli 1947 kota Subang mulai mengadakan bumiangus karena Tentara Belanda sudah dekat dan akan masuk kota Subang. Dan pada tg. 23 siang k.l. jam 11 tentara Belanda masuk kota Subang. Pada waktu itu semua pegawai bubar, tinggal R.Soepardi Pemb.Insp.I dan kami sendiri dengan Sdr. Jusrin A.P.III.

Pada tanggal 25 Juli 1947 pukul 6 kami bersama-sama dengan Sdr, Jusrin pergi menuju ke Koetoardjo. Pada tg. 26 Juli 1947 kami berdua bermalam di kmp. Songgom. Tg. 27 kami sampai di Tjawitali dan bermalam disitu. Ketiga harinja kami bermalam di kmp. Buah 2. Esok harinja melanjutkan per djalanan kami sampai kmp. Tjipolang. Loerah desa Tjipolang mengabarkan bahwa desa Kadipaten tidak dapat dilalui lagi, karena mendjadi pusat pertempuran. Kemudian kita kembali lagi k.l. 1 km, lalu mengambil djalanan ketjil jang menuju ke Djindjing dan tg. 30 Juli kita bermalam di kmp. tersebut.

Selama per djalanan kita tersebut kami mengetahui dengan mata kepala sendiri tentara Belanda jang dengan truck dari Sumedang menuju ke djurusan Kadipaten.

Pada esok harinja tg. 31 kita melanjutkan per djalanan kita dan sorenja bermalam di Situradja dan kira2 djam 12 siang sampai di setasiun Malangbong. Dari situ kita naik kereta api menuju ke Koetoardjo. Djam 10 malam sampai di Bandjar dan bermalam disana. Kemudian esok harinja tg. 1 Agustus 1947 ada pengumuman dari kereta api, bahwa perhubungan sudah putus Saja menunggu sampai kl. djam 12 dan kebetulan pada waktu itu ada Tentara dari Djawa Barat jang akan pergi ke Djokja. Saja lalu turut kereta api jang dinaiki Tentara tersebut ke Maos. Sesampai kita di djembatan Tjitandui spoorbaan telah diangkat oleh Tentara kita sedang kita sekalijannja digrada oleh anggota Tentara kita jang sedang djaga disitu. Sesudahnja itu, maka kita melalui djembatan itu dengan djalan kaki. K.L. 1 km dari Djembatan kita berdjumpa dengan kereta api jang dinaiki oleh pasukan P.T. jang akan ke Tasik. Kemudian mereka turun sedang kita naik kereta api tersebut ke djurusan Timur. Sesampai kita di Lebeng kita tidak melanjutkan per djalanan kita, karena djembatan telah rusak.

Maka terpaksa kita melanjutkan per djalanan kita djalan kaki dan pada tg. 2 Agustus kita sampai didesa Parakan (Maos) dan bermalam disitu selama dua malam, karena disampingnja badan sudah letih djaga tentara Belanda baru mengadakan gerakannya menuju ke djurusan Djokja.

Kemudian kita melanjutkan per djalanan kita dan sorenja kita sampai di Tambak dan bermalam di Assistenan. Esok harinja kita berangkat lagi menuju ke Gombong dan k.l. 12 siang kita tiba di kota Gombong. Pada waktu itu pohon kenari disepanjang djalan telah dirobokkan untuk merupakan rintangan djalan.

Kemudian dari Gombong dapat naik kereta api menuju ke Koetoardjo dan dapat di Koetoardjo dengan selamat. / datang.

Oleh karena saja lalu mendapat sakit selama 1 bulan, maka saja ta' dapat segera menghadap di Djawatan. Kemudian pada bulan September saja menghadap di Djawatan untuk menggabungkan diri, akan tetapi dapat djawaban bahwa pada waktu itu belum dapat menerima pegawai, hingga terpaksa saja kembali lagi.

Sekianlah laporan pengalaman kami selama meninggalkan kota Subang. Sjahadan laporan ini dibikin sesungguhnya dengan mengingat sumpah waktu menerima djabatan.

Laporan keadaan Daerah Subang, Jawa Barat
akibat Agresi Militer I, Juli 1947.

ANRI : Kepolisian Negara No.526

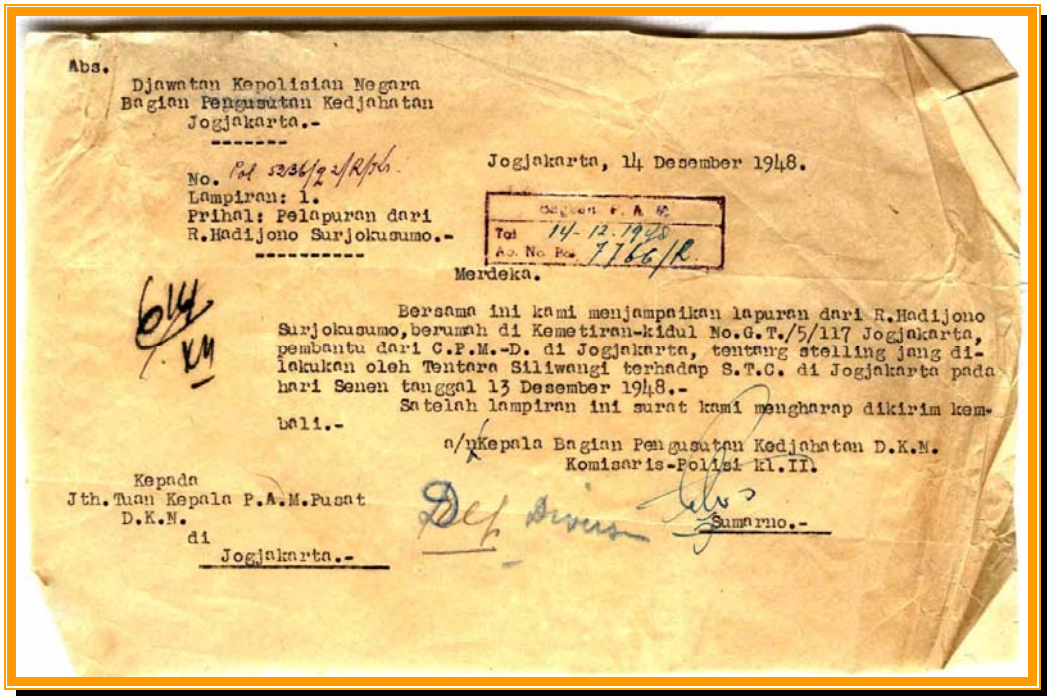


Peristiwa Agresi Militer Belanda ke I di Jawa Barat ,
12 Juli 1947.

ANRI : IPPHOS, 1947



Suasana Kota Bandung pasca Agresi Militer I, 1947.
ANRI :Siliwangi



Laporan tentang pertahan yang dilakukan oleh Tentara Siliwangi terhadap Sub Teritorial Comando di Jogja, 13 Desember 1948.

ANRI : Kepolisian Negara No. 686



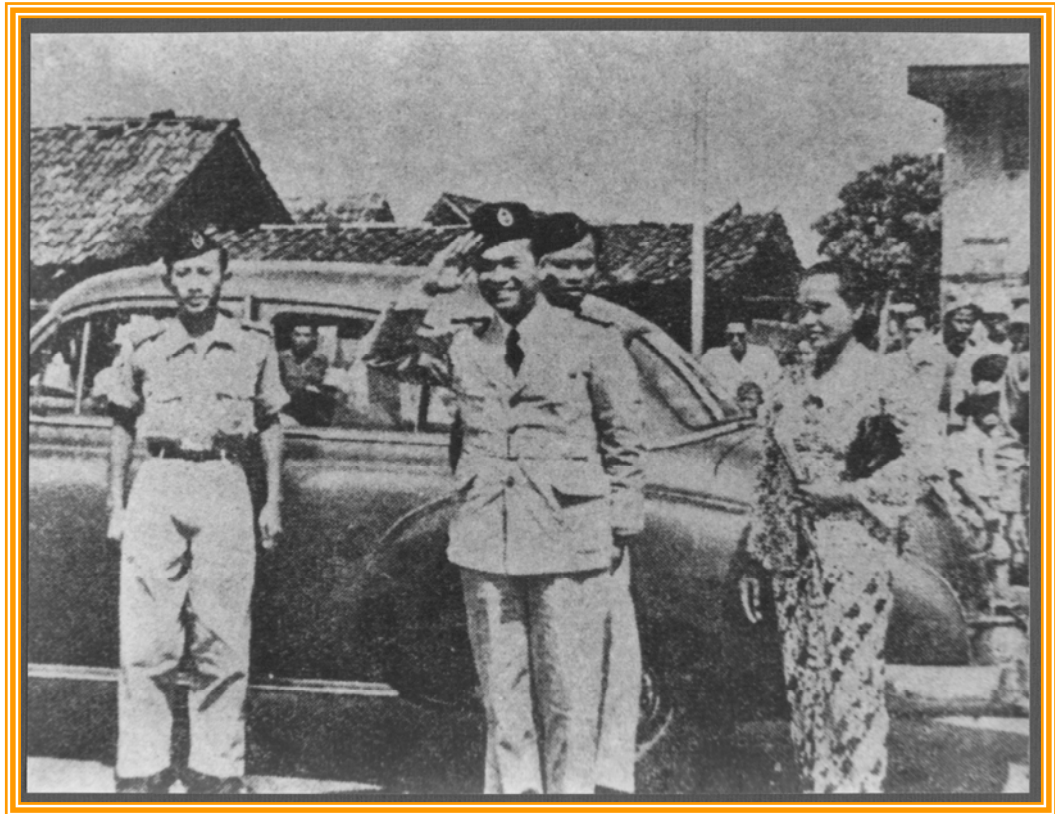
Pasukan TNI dari Siliwangi, Brigade Suryakencana, Batalion Sujono di Sukanegara menjelang hijrah ke Jogja, 1948.

ANRI : Siliwangi



Anggota TNI dari Divisi Siliwangi berkumpul di daerah Cicalengka, Bandung untuk hijrah ke Jogja, 1948.

ANRI : Siliwangi



Panglima Siliwangi, Kolonel Sadikin memasuki Kota Bandung menjelang pengakuan kedaulatan RI, 1949.

ANRI : Siliwangi

SALINAN

Tjibaroesah 18/6-50.

Kapada Jth. Padoeka Kangdjeng toean
Persident Soekarno jang maha moelja
dilapang Gambir Djakarta.

Jang bertanda tangan dibawah ini Kami atas nama rajat
Tjibaroesah kamp. Bodjongmangoe dan Pasirkoepang sekarang
Ini waktoe sangat geulisah saking kabanjakan garong dan
rampog dan tentara tida ada sakali dari bagian jang resmi
sakarang rajat semoeah Moehoen kapada jang berwadjab soepaja
diadakan T.N.I. Siliwangi dari bagian bt.1.oe.1. anak
Pamajor Darsono barangkali Tjibaroesah dengan kampoeng2 bisa
aman djangan sampe rajat melarikan diri sebab rajat banjak
jang korban harta banda dan raga djiwa tjabalah kami Minta
pertoeloengan selekas moengkin soepaja dikaboel kami poenja
permintaan dan ini tentara2 jang ada di Tjibaroesah moehoen
soepaja dipindahkan kelain tempat sebab adanja tentara itoeh
rajat banjakan mendjadi takot sebab kasatu oleh garong
Itoeh sebab njah ini rajat jang poenja permintaan djoea
adanja sabelon dikasih kami poenja permintaan kami matoerkan
perbanjak terima kasih.

Dessa Bodjongmangoe

1. H. Mangsoer
2. H. Goesen
3. Djamsoepe
4. Nasilan
5. Rasilan
6. Salip
7. Katoeh
8. Masdjid
9. Ropi
10. Moestopa

desa Pasirkoepang

1. Raan
2. Nairin
3. Sarwa
4. Itong
5. Ijan
6. Arneng
7. Denjen
8. Itong
9. Sahali
10. Ipong

Adoeh Goesti dhg: teh aja persident
aja bopati aja wadana aja tjamat loerah2.
aja sagala ngaran pangeroes aja kabeh
oge ari tentarana njaita anoe disebut
pasoekan satrija kembar dipisi Pakoe Alam.

Sesuai dengan jang aseli.
KABINET PRESIDEN,
Bagian Expedisi,

bd.

Surat rakyat Cibarusah kepada Presiden Soekarno tentang
permohonan agar dikirim TNI Siliwangi untuk menjaga
keamanan daerah tersebut,
18 Juni 1950.

ANRI : Kabinet Presiden RIS No. 123

MEMORANDUM MENGENAI ATJARA KONPERENSI BOGOR

1 - Mengenai atjara konperensi jang akan diadakan di Bogor hendaknja dari sekarang dipertimbangkan pendirian Indonesia, agar nanti dipertahankan sebaik2-nja. Atjara jang diusulkan adalah sbb:

I. Kapan konperensi akan diadakan

II. Negara2 mana jang akan diundang

III. Bentuk atjara jang akan dimajukan kepada negara2 peserta lain untuk dipertimbangkan.

Undangan jang dikirimkan kepada negara2 jang nanti disetujui konperensi lima Perdana Menteri untuk diundang akan berdasarkan hasil2 jang diperoleh dari pemitjaraan di Bogor.

2 - Mengingat reaksi jang diperoleh atas dasar aide-memoire jang disampaikan kepada negara2 jang diapproach, dapat diambil kesimpulan, bahwa konperensi Afro-Asia sebaiknya diadakan pada permulaan tahun 1955. Dari pengalaman mengenai persiapan konperensi Bogor, maka untuk persiapan konperensi Afro-Asia jang djauh lebih luas akan diperlukan waktu paling sedikit tiga bulan, sehingga sebaiknya waktu untuk mengadakan konperensi ditetapkan dalam bulan Maret 1955.

3 - Mengenai dimana konperensi akan diadakan, sebaiknya Indonesia berpendirian, bahwa soal ini sudah beres dan tidak perlu dibitjarkan lagi. Tjukup kiranja, djika Indonesia menerangkan sebagai suatu "statement", bahwa sesuai dengan hasil approach jang dilakukan, konperensi Afro-Asia akan diadakan di Indonesia. Sungguhpun menurut kawat dari New York ada saran untuk mengadakan konperensi Afro-Asia di Colombo, tetapi sebaiknya "proefballon" ini resmi tidak diambil au sérieux dalam arti, bahwa pada konperensi Bogor soal dimana konperensi Afro-Asia akan diadakan tidak dijadikan pokok perundingan dan dianggap selesai dengan pernyataan Indonesia. Moral right Indonesia sebagai pengambil inisiatip konperensi Afro-Asia amat besar dan sebetulnja sulit dapat diterima adanya kemungkinan, bahwa Birma, Ceylon, India atau Pakistan akan mengemukakan negara lain sebagai tempat untuk mengadakan konperensi. Djuga dalam aide-memoire sudah dikemukakan usul untuk mengadakan konperensi di Indonesia, usul mana praktis disetujui oleh semua negara jang diapproach.

4 - Mengenai atjara kedua, jaitu negara2 mana jang akan diundang, perlu dipertimbangkan akibat2-nja. Atjara ini dapat dibagi2 sbb:

a. Apakah akan diundang penindjau2 disamping negara2 peserta?

Memorandum mengenai acara Konferensi Bogor,
8 Desember 1954.

ANRI : LN. Palar No 287



Perdana Menteri India Shri Jawa harlal Nehru, Perdana Menteri Birma U Nu bertemu dengan Presiden Soekarno dalam rangka Konferensi Panca Negara di Istana Bogor, 27 Desember 1954.

ANRI : Kempen 541227 FG 1-2

SHORT REPORT ON THE FIRST SESSION OF THE
CONFERENCE OF THE PRIME MINISTERS OF THE
FIVE COLOMBO COUNTRIES AT BOGOR ON
TUESDAY, DECEMBER 28, 1954.

=====

The Conference was opened by the
Prime Minister of Indonesia at 14.30.

After welcoming the Prime Ministers of
Burma, Ceylon, India and Pakistan, the Indone-
sian Prime Minister recalled the most important
developments in the world, especially in Asia,
since the first Prime Ministers' Conference in
Colombo eight months ago. Afterwards he
reported to the Conference on the preparatory
work done by Indonesia in connection with the
Afro-Asian Conference. Finally the Indonesian
Prime Minister suggested the items to be con-
sidered by the Conference (see appendix I).

The Prime Minister of Burma suggested
in his statement that the purpose of the Afro-
Asian Conference should not be towards the
formation of a new bloc. Rather should it be
to invite the prime ministers of countries in
Asia and Africa to come and sit down together
in a free and candid exchange of views. All
that the participants should attempt to do is
to seek each others' views so that they can
understand each other. When such an under-
standing is brought about it would facilitate
the enlargement of the area of peace. Their
efforts ought to be directed towards economic
and social uplift (see appendix II).

In his

Laporan singkat session I Konferensi
Lima Perdana Menteri di Bogor,
28 Desember 1954.

ANRI : LN. Palar No 289

No.2363/4

Rk.05.00

RAJU, 29 DESEMBER 1954.

D A L A M N E G E R I

Konferensi Pantjanegara di Bogor

BOGOR, 28 Desember (PIA).- Kelima perdana menteri negara Asia yang pada petang hari Selasa bertempat diistana Bogor untuk kedua kalinya tahun ini mengadakan permusjawaratan, pada akhir permusjawaratan petang itu djuga mengumumkan, bahwa mereka akan mengadakan suatu konferensi negara2 Afro-Asia pada minggu terakhir bulan April tahun 1955.

Pengumuman itu telah dikeluarkan dalam sebuah komunike bersama yang dikeluarkan selesai sidang pertama dari para perdana menteri India, Pakistan, Birma, Lonka dan Indonesia. Dikatakan selanjutnja dalam komunike tadi, bahwa para perdana menteri dalam sidangnya yang akan diadakan pada hari Rabu akan meninjau aspek2 selanjutnja untuk mengadakan konferensi sematjam itu serta "soal2 lain".

Komunike tersebut telah dikeluarkan selesai sidang pertama, yang dimulai pada djam 14.30 dan berlangsung lebih dari satu setengah djam.

Sidang tersebut telah dilaksanakan didalam sebuah ruangan diistana Bogor. Dimanang2 ruangan ditempatkan sebuah meja yang panjangnja 7 meter dan lebarnya 2 1/2 meter. Ditengah2 pada meja itu duduk perdana menteri Ali Sastroamidjojo dan disebelah kanannja duduk menteri luar negeri, dr Sunario.

Perdana menteri India, Nehru duduk disebelah kiri PM Ali Sastroamidjojo dan disebelah Nehru berturut2 PM Kotelawala dari Lonka, PM Moh Ali dari Pakistan dan PM U Nu dari Birma.

Pada dinding dibelakang perdana menteri Indonesia digantungkan kelima bendera dari negara2 peserta konferensi.

Ruangan konferensi didjaga dengan keras. Orang2 yang tidak berhak tidak dibolehkan masuk didalam istana. Demikian pula para wartawan tidak dibolehkan masuk halaman istana mulai dari pagi hari Selasa.

Sebelum konferensi dimulai hanya diperbolehkan djumud potret selama beberapa menit untuk mengambil gambar2, sedangkan para wartawan berketumun didekat pintu masuk keistana, tetapi tidak diperbolehkan masuk oleh anggota2 polisi militer. Dari djauh diluar hanya dapat dilihat berkibarnya kelima negara peserta yang dipasang didalam halaman istana.

3020.

Spozi
Bj.

Ulasan berita mengenai Konferensi Pancanegara
di Bogor,

29 Desember 1954

ANRI : Berita Antara Bulan Desember 1954

4. EMPAT TUJUAN-POKOK KONPERÉNSI
ASIA-AFRIKA.

Dalam komuniké-bersama jang disetudjuí oléh per-
temuan para-perdana-menteri dari pantja-negara Birma,
Sailan, India, Indonésia dan Pakistan jang berlang-
sung pada tanggal 28 dan 29 Desémber 1954 dikota, Bogor
ditetapkan maksud Konperénsi Asia-Afrika:

1. untuk memadjukan goodwill dan kerdja-sama antara bangsa-bangsa Asia dan Afrika, untuk mendjeladjan serta memadjukan kepentingan-kepentingan meréka, baik jang silih-ganti, maupun jang bersama, serta untuk menetapkan dan memadjukan persahabatan serta perhubungan sebagai tetangga baik;
2. untuk mempertimbangkan soal-soal serta hubungan-hubungan dilapangan sosial, ékonomi dan kebudajaan dari pada negara-negara jang diwakili;
3. untuk mempertimbangkan soal-soal jang berupa kepentingan khusus dari pada bangsa-bangsa Asia dan Afrika, misalnyá soal-soal jang mengenai ke-
daulatan nasional dan tentang masalah-masalah racialisme dan kolonialisme;
4. untuk menindjau kedudukan Asia dan Afrika, serta rakjat-rakjatnja didalam dunia dewasa ini serta sumbangan jang dapat meréka berikan guna memadjukan perdamaian serta kerdja-sama didunia.

Empat tudjuan-pokok konperénsi Asia-Afrika itu ber-
bunji dalam bahasa Ingeris:

The four purposes of the Asian-African
Conference.

1. to promote goodwill and cooperation among the nations of Asia and Africa, to explore and advance their mutual as well as common interests and to establish and further friendliness neighbourly relations;
2. to consider social, economic and cultural problems and relations of the countries represented;
3. to consider problems of special interest to Asian and African peoples, e.g. problems affecting national sovereignty and of racialism and colonialism;
4. to view the position of Asia and Africa and their peoples in the world of today and the contribution

Vet Besar

Vet kecil

Naskah Kerja Delegasi RI pada Konferensi Asia Afrika
di Bandung,
18 -23 April 1955.

ANRI : M.Yamin No.177

pengawasan internasional yang efektif. Dengan tjara ini, perdamaian internasional dapat dimedjukkan tenaga nuklear dapat semata-mata dipergunakan bagi tudjuanj damai. Hal ini akan membantu memberi djawaban bagi kebutuhan, terutama kebutuhan Asia dan Afrika, sebab apa yang mendesak diperlukan oleh Asia dan Afrika ialah kemajuan sosial dan tinggatan kehidupan yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas. Kemerdekaan dan damai bergantung satu sama lain. Hak menentukan nasib sendiri mesti dinikmati oleh semua bangsa dan kemerdekaan serta kebebasan mesti diberikan kepada bangsa yang masih belum merdeka dengan pertanggungan yang sedikit mungkin.

Sesungguhnya, segala bangsa harus mendapat hak untuk dengan bebas memilih sistim politik dan ekonomi mereka sendiri dan tjara hidup mereka sendiri dan tjara hidup mereka sendiri, sesuai dengan tudjuanj dan prinsip2 dari Piagam P.B.B.

Kemerdekaan dari ketjurgaan, ketakutan, dan dengan keterjaraan dan kemauan baik yang satu terhadap yang lain, bangsa harus mempraktekkan toleransi dan hidup bersama-sama dalam perdamaian yang satu dengan yang lain sebagai tetanggaj yang baik dan mengembankan kerdja-sama setjara persahabatan atas dasar prinsip2 yang berikut:

1. Penghormatan terhadap hak2 azasi manusia dan terhadap tudjuanj dan prinsip2 dari Piagam P.B.B.
2. Penghormatan terhadap kedaulatan dan kebulatan teritorial dari semua bangsa.
3. Pengakuan terhadap persamaan semua bangsa dan persamaan semua negara besar dan ketjil.
4. Penghindaran dari intervensi dan tjampurtangan dalam soal2 dalam negeri2 dari negeri2 lain.
5. Penghormatan terhadap hak tiap2 bangsa untuk mempertahankan diri setjara sendiri atau kolektif, sesuai dengan Piagam Persekutuan Bangsa2.
6. a) Penghindaran diri dari penggunaan susunan2 pertahanan kolektif yang melajani kepentingan tertentu dari negara2 besar yang mana sadja.
b) Penghindaran oleh negeri mana sadja dari penggunaan tekanan terhadap negara2 lain.
7. Pengjauhan diri dari perbuatan2 atau antjaman2 agresi atau pemaksaan kekerasan terhadap kebulatan teritorial atau kemerdekaan politik dari negeri mana sadja.
8. Penjelesaian segala pertikaian2 internasional dengan djalan damai, seperti perundingan2, perdamaian, arbitrase atau penyelesaian menurut hukum maupun dengan tjara2 damai sebagai yang dipilih oleh pihak2 yang bersangkutan sesuai dengan Piagam P.B.B.
9. Memadjukan kepentingan2 bersama dan kerdjasama.
10. Penghormatan terhadap kendilan dan kewadjuan2 internasional.

Konferensi I/4A menjatakan kejakinannya bahwa kerdja-sama setjara persahabatan sesuai dengan prinsip2 tsb. diatas akan memberi sumbuhan yang efektif bagi pemeliharaan dan usaha mendjukan perdamaian dan keamanan internasional, sedang kerdja-sama dalam lapangan2 ekonomi, sosial dan kebudayaan akan membantu mendatangkan kemakmuran bersama dan kesedjahteraan semua.

Bandung, 24 April 1955.

Dasasila Bandung merupakan hasil rumusan Konferensi Asia Afrika.

ANRI : Djamal Marzuki 120



Gedung Dwi Warna tempat Sidang Ekonomi, Politik,
Kebudayaan pada Konfrensi Asia Afrika yang dilaksanakan di
Bandung,
20 April 1955.

ANRI : Kempen 550420 FP 73



Hotel Preanger dan Hotel Savoy Homan di Jalan Asia Afrika
tempat penginapan Delegasi peserta
Konfrensi Asia Afrika, Bandung,
20 April 1955.

ANRI : Kempen 550420 FP 4-56, 4-52



Perdana Menteri RI Mr Ali Sastroamidjoyo menyambut
kedatangan Sir John Kotelawala dari Srilangka
di Bandung,
18 April 1955.

ANRI : Kempen 550418 FP 1



Pemandangan pada Sidang Pleno Konferensi Asia Afrika, tanggal
18 – 24 April 1955, Bandung,
20 April 1955

ANRI : Kempen 550420 FP 38



Pemandangan Sidang Pleno pada Konferensi Mahasiswa Asia
Afrika, Bandung,
3 Juni 1956.

ANRI : Kempen 560603 FP 1-7

UNCORRECTED

nst.625/61.

SPEECH BY HIS EXCELLENCY PRESIDENT SUKARNO
AT THE OPENING OF THE ASIAN-AFRICAN
SOLIDARITY COUNCIL CONFERENCE; BANDUNG,
10 APRIL 1961.

Excellencies, Ladies and Gentlemen, Comrades, Sisters and Brothers,

Let me first give my greetings to the Islamic Delegates of this Conference: Assalamu alaikum Warachmatulahi Wabarakatuh!

My dear friends, many of the delegates of this Asian-African Solidarity Conference have asked me to make a little speech in English. Now here I am, with my very bad English. I have to address you in a language which is a foreign language for me, which is neither my language nor yours. But very often I already said: "Better than the language of the spoken word, is the language of the heart." And I am speaking with the language of my heart. The language of my heart, full of love of freedom, full of love of justice, full of love of the brotherhood of men, to your heart, which are also full of love of freedom, of justice, of the brotherhood of men.

Six years ago, the Asian-African Conference was held at Bandung, this beautiful city and since then the idea of Asian-African solidarity has not vanished but it has grown, grown, grown, grown and has become stronger.

So many things have already been said by our brother Siradjuddin Abbas, our good old comrade Siradjuddin Abbas and also by our comrade Sibay. I shall not repeat them but there are a few things which I want to stress upon in this conference of ours. Look here, -- as also has been said by Siradjuddin Abbas and I have said it already many, many, many times -- imperialism, colonialism is not yet dead. Imperialism, colonialism is only dying. And here I say again: when all the peoples of Asia and Africa and Latin America are united in their struggle against imperialism and colonialism, when all progressive people in the world are united in their struggle against imperialism and colonialism, then we shall give a death blow to colonialism and imperialism. Then we shall live in a peaceful world; then we shall live in a world of brotherhood; then we shall live in a world of prosperity. But now, how is the situation, my dear friends and comrades? Comrade Siradjuddin Abbas has already told you in his opening speech that there are still so many countries and so many people under the domination of colonialism and imperialism.

A few months ago when I was in New York, addressing the General Assembly of the United Nations, and then also addressing a special

meeting of

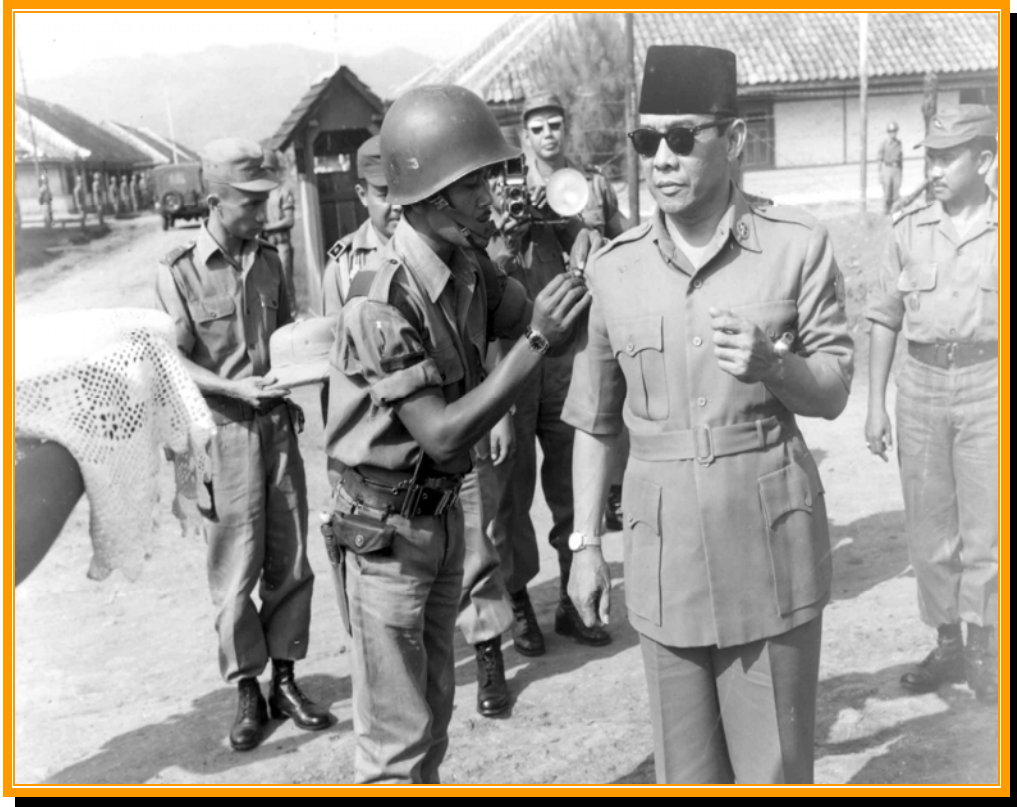
Pidato Presiden Soekarno pada pembukaan Konferensi Dewan
Solidaritas Asia Afrika di Bandung,
10 April 1961.

ANRI : Pidato Presiden No.294



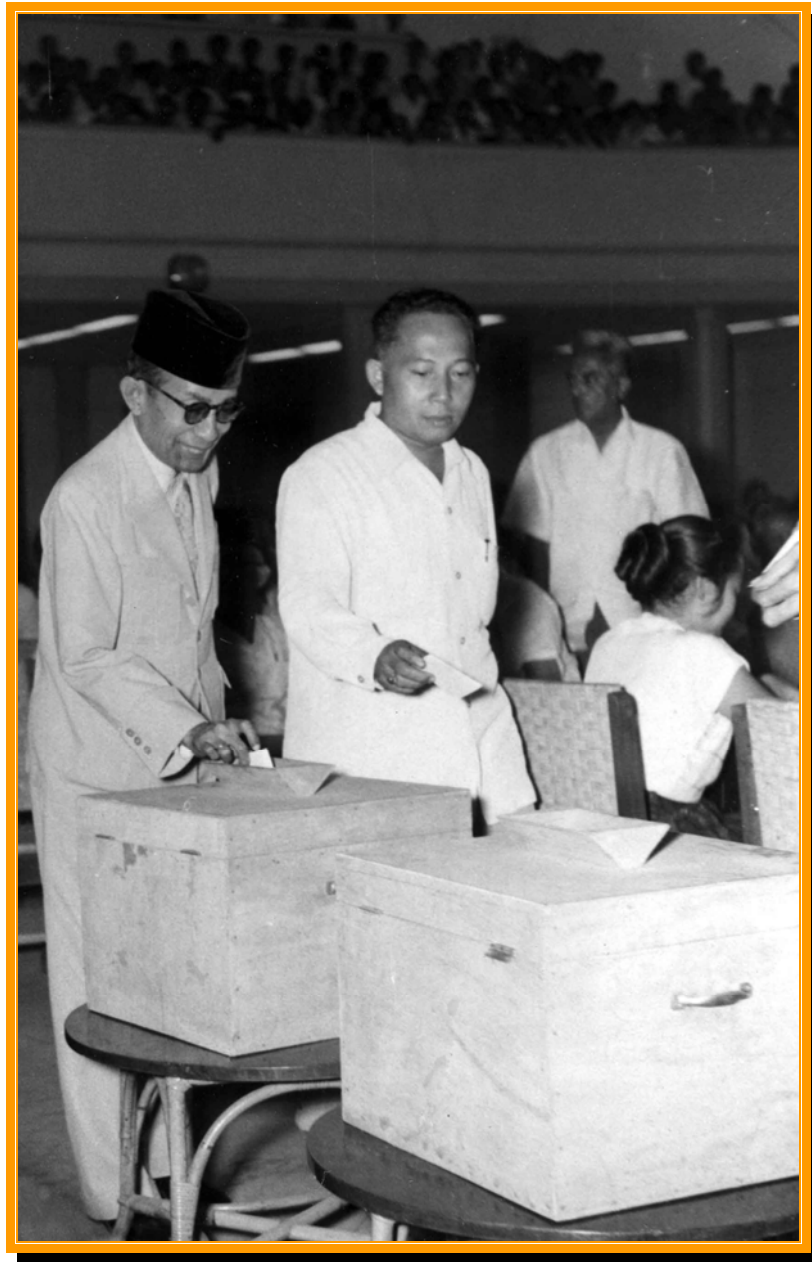
Gubernur Jawa Barat Ipik Gandamana sedang memasukkan suaranya pada pemungutan suara untuk DPRD Jawa Barat ,
Bandung,
10 Agustus 1957.

ANRI : Djapenpro Djabar 570810 FP 1



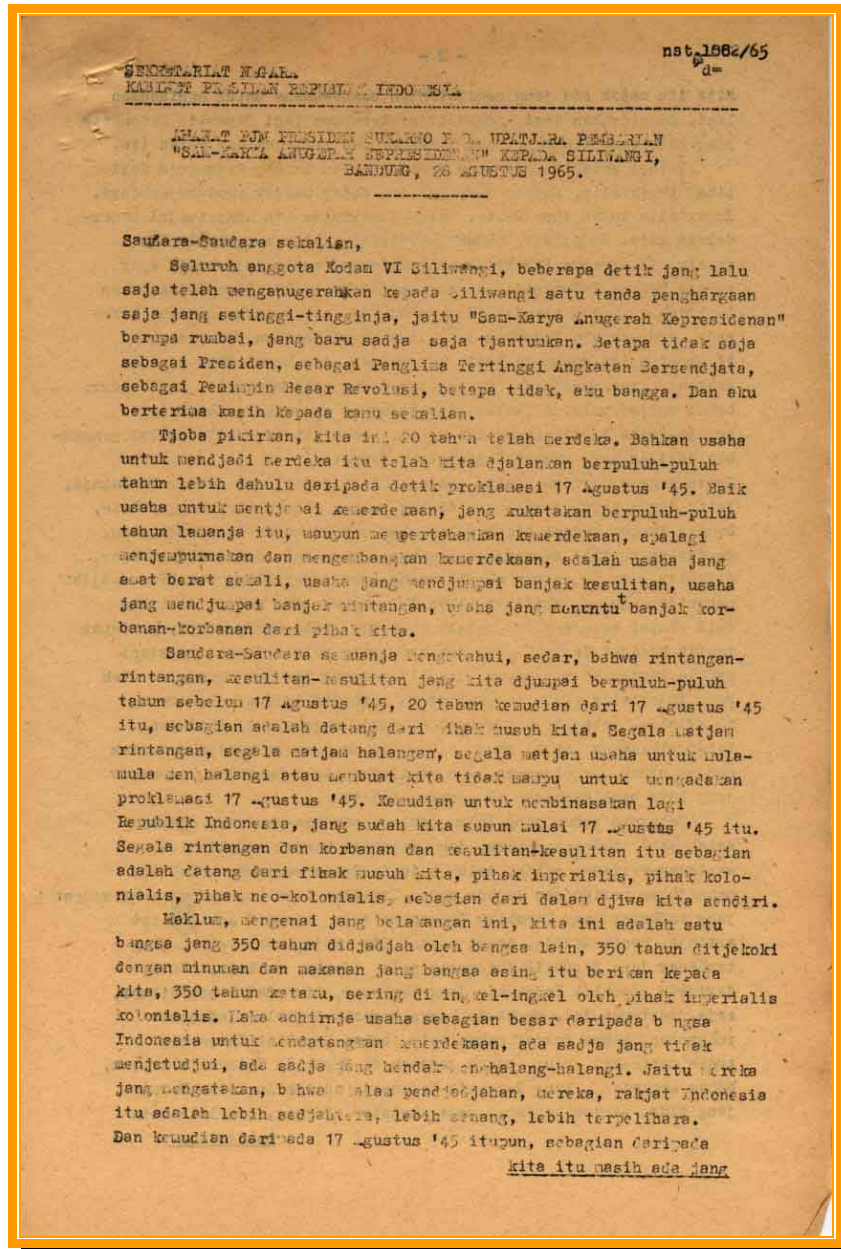
Presiden Soekarno menerima emblem Batalyon Infantri
330 TT III Siliwangi, Bandung,
21 Mei 1958.

ANRI : Kempen 580521 FP 20



Raja Keprabonan sedang memberikan suara
pada pemungutan suara ke II kembali ke UUD 1945
oleh Dewan Konstituante di Bandung,
1 Juni 1959.

ANRI : Kempen 590601 FP 22A – 59



Amanat Presiden Soekarno pada upacara pemberian
"Sam Karya Anugerah Kepresidenan"
kepada Kodam Siliwangi Bandung,
28 Agustus 1965.

ANRI : Pidato Presiden No. 787

Perekonomian dan Perindustrian

Dj. 13203/15

Voorstel van de Directie
van Financien om een
nieuwe Landkas te Ban-
daeng onder te brengen in
het van de Javasche Bank
aldaar te stichten nieuwe
Kantoorgebouw.

Zeer veel spoed

13 $\frac{19}{15}$

Door de Directie
der Javasche Bank is
indertijd bij laas aan den
Directeur van Financien ge-
richt schrijven van 10/1-12-
-05/071 het denkbeeld
aankonzig gemaakt om
den bouw van een nieuwe
Landkas te Bandaeng
in van het nieuwe kantoor
van genoemde Bank al-
daar te vereenigen.
De Inspecteur van Financien
bijla heeft het plan
in zijn aan den Directeur
van Financien gericht brief
van 31/3-15-139 warm
aan in verband met de
daraan

Pembangunan gedung baru Javasche Bank
di Bandung, 21 Mei 1915.

ANRI : *Algemeene Secretarie Mgs. No.1210*



Gedung Javasche Bank di Bandung, 1920.

ANRI : KIT No.85/78



Pekerja wanita sedang memintal benang pada perusahaan
"Yo Sek In" di Bandung,
Maret 1946.

ANRI : RVD A. 27778



Bagian pemintalan dengan mesin kelos bersilang
di pabrik tenun Bandung,
23 Mei 1952.

ANRI : Kempen 520523 FP 13



Para pekerja sedang membuat hiasan payung
di Tasikmalaya,
28 Juni 1948.

ANRI : RVD 80628 FU 4



Seorang pekerja wanita sedang membuat keramik pada
perusahaan keramik di Plered,
12 Februari 1953.

ANRI : Kempen 530212 FN 1-5



Pemandangan di depan pasar Depok,
11 Juni 1949.

ANRI : RVD 90611 FJ 3



Pembangunan Pasar Pengalengan hasil gotong royong rakyat
desa Pengalengan, Bandung,
25 Agustus 1958.

ANRI : Kempen 580925 FP 3-96 Da/Kab



Pembuatan tikar mendong pada Perusahaan rumput mendong
di Tasikmalaya,
22 Mei 1952.

ANRI : Kempen 520522 FU 6



Para pekerja perempuan sedang membatik
di Koperasi "Mitra Batik" Tasikmalaya,
14 Maret 1956.

ANRI : Kempen 560314 FU 53



Perusahaan sepatu "Persebo" di Bogor,
14 Juni 1951.

ANRI : Kempen 514077



Pembuatan sikat dari ijuk hasil produksi industri
"Sikat Indonesia" di desa Cisaat, Sukabumi,
1955/ 1956.

ANRI : Kempen IX-10



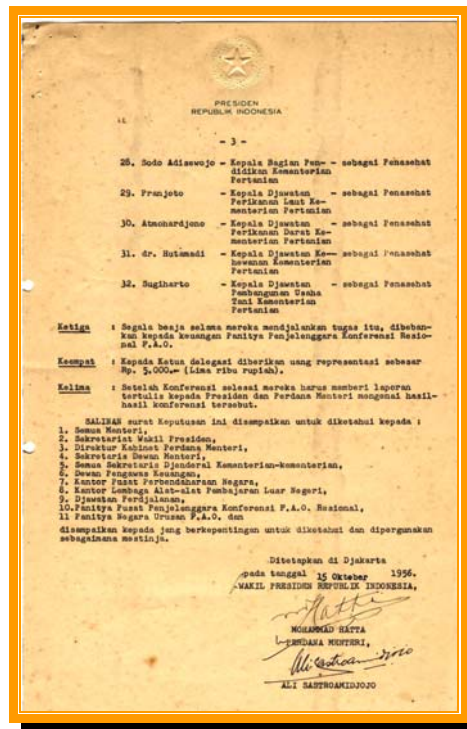
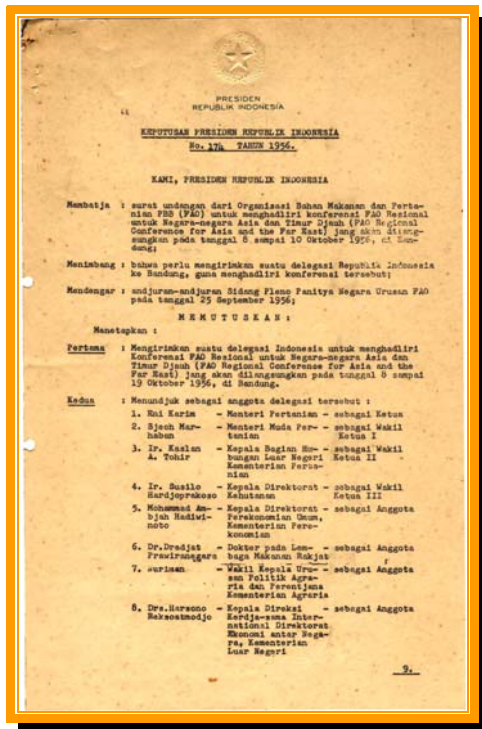
Pemandangan dalam pabrik ban "Good Year" di Bogor,
10 April 1953.

ANRI : Kempen 530410 FJ 13



Kunjungan Wakil Presiden M. Hatta didampingi Ketua Koperasi
Pegawai Negeri, Hasan Wirawatna memasuki gedung KPN,
Bandung,
7 September 1956.

ANRI : Djapenpro Djabar 560907 FP 9



Keputusan Presiden RI Nomor 174 tahun 1956 tentang pengiriman delegasi Indonesia untuk menghadiri Konferensi FAO Regional Negara-negara Asia dan Timur Jauh, di Bandung 15 oktober 1956.

ANRI : Sekkab, Keputusan Presiden No. 1336



Anggota FAO diterima Gubernur Jawa Barat
R. Mohamad Sanusi Hardjadinata, 1956
Basipda Jawa Barat : Deppen No.56.29



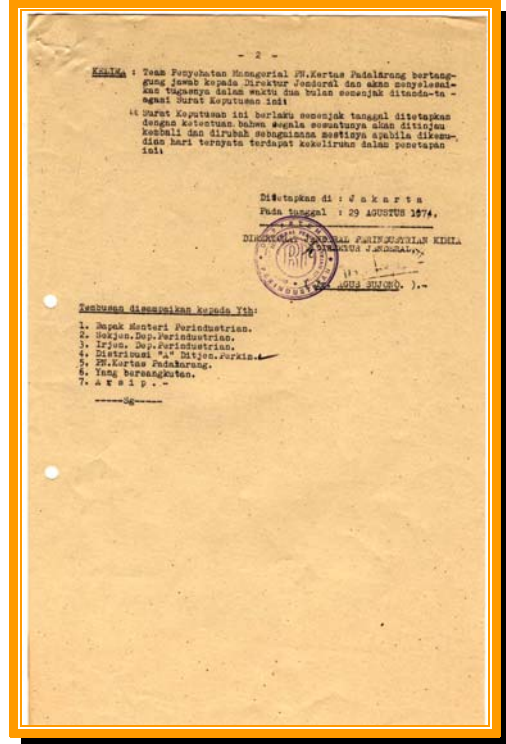
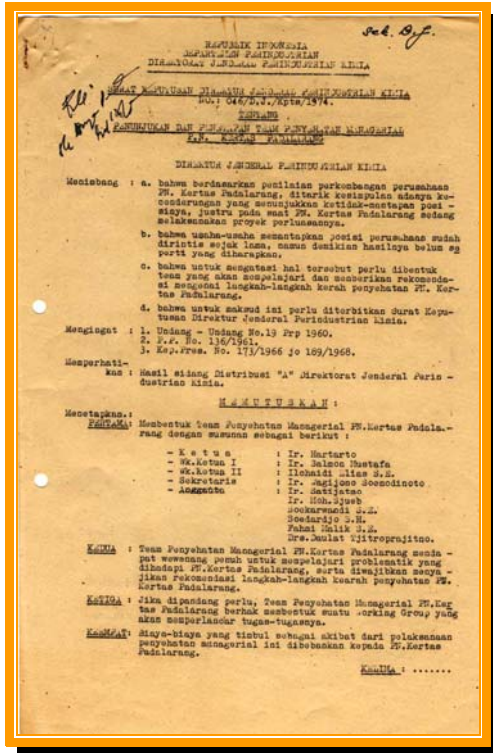
Wakil Presiden M. Hatta mengunjungi Koperasi perusahaan rotan di Cirebon dan perusahaan tembaga di Panyingkiran, Majalengka, 25 Juli 1956.

ANRI : Kempen 560725 FY 5-7, FV 1-5



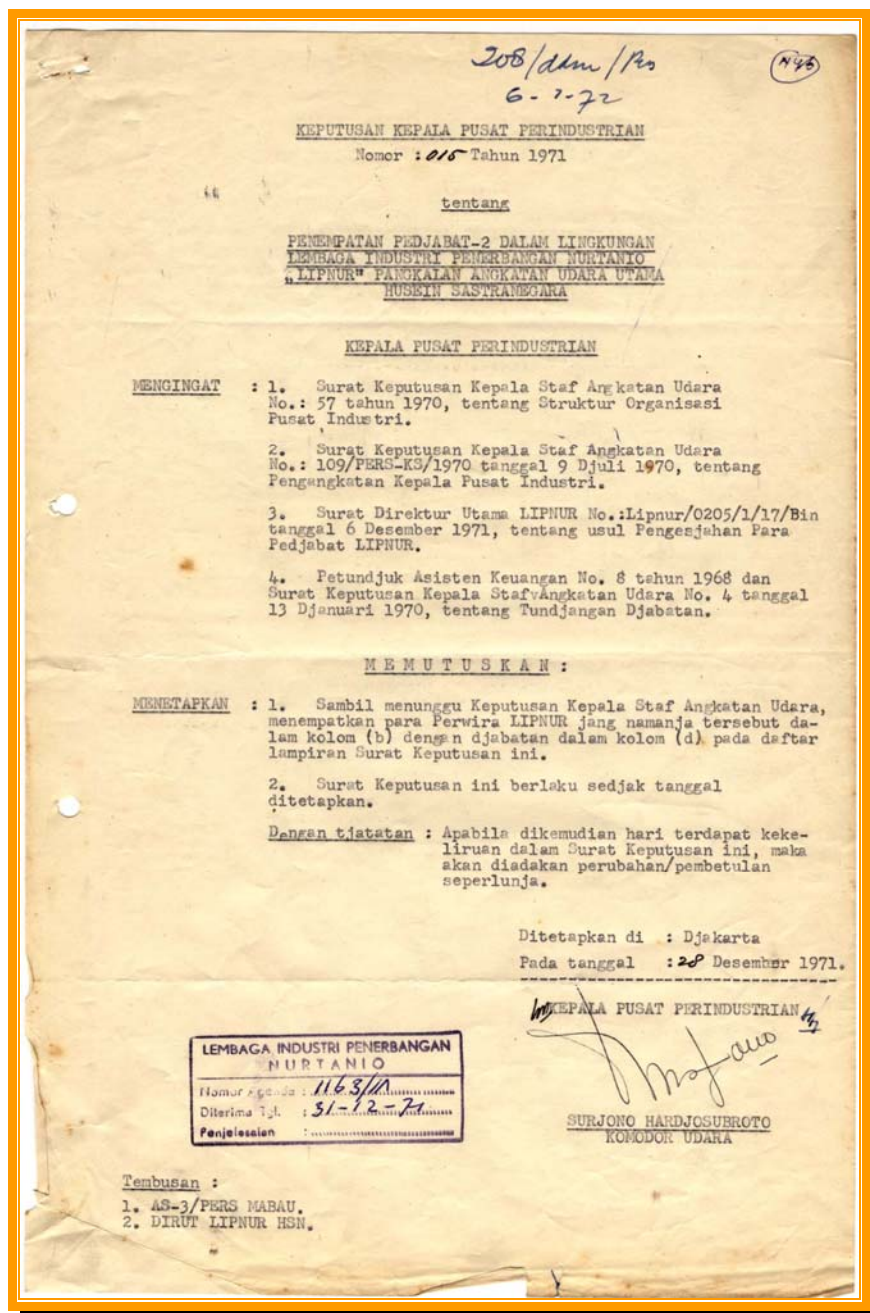
Pemandangan di pabrik tekstil Majalaya, Bandung,
18 September 1963.

ANRI : Kempen 63-12074

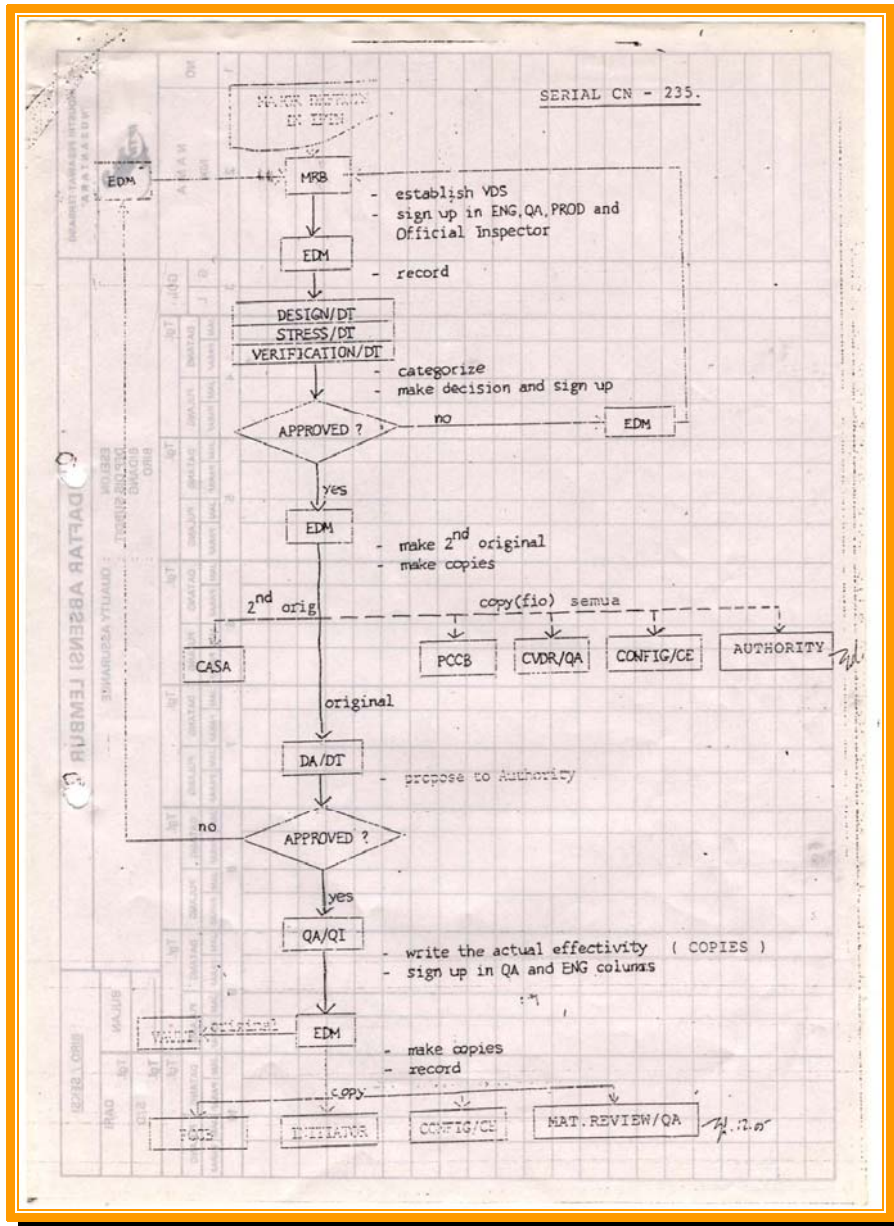


Surat Keputusan Dirjen Perindustrian Kimia tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Penyehatan Managerial PN. Kertas Padalarang, 29 Agustus 1974.

ANRI : Perindustrian No.413



Keputusan Kepala Pusat Perindustrian tentang penempatan
Pejabat-pejabat Lembaga Industri Penerbangan Nurtanio
(LIPNUR) di pangkalan Angkatan Udara Utama
Husein Sastranegara, Bandung,
28 Desember 1971.
ANRI : IPTN No. 1



Flow Charts pembuatan Pesawat CN-235,
13 Juni 1988.

ANRI : IPTN No. 51

Pertanian dan Perkebunan

wijziging bestaat, om de bevolking derzelve met die
 van andere Residentien gelijk te stellen en dat dezelve
 te arm moet blijven, om nog meerder lasten te
 dragen dan thans reeds aan dezelve zijn opgelegd,
 Het is waar dat de weder invoering der Indische
 taksen in sommige districten dezer Residentie op
 den thans bestaanden voet hier en daar de bevolking
 enige meerdere inkomsten bezorgen, dan dit kan
 niet overal van invloed zijn, en in het algemeen
 zal voorzeker de invoering der confium pacht
 een nieuwe last zijn, inderdaad niet algemeen
 drukkende, maar toch door dien de verbruikers
 van dit huulsap als het ware voor de maatschappij
 in den arbeid kunnen worden afgeschreven,
 drukkende op de niet verbruikers, omdat het een
 deel der kosten, in alle verplichte werkzaamheden,
 op de laatste moet overgaan.

Welbesti. zegt voorts dat de Reanger
 Agentschappen voerger konink beschouwd worden
 als de Kroffj Voorraanschijner van Jawa, docht
 dat thans Verschillen andere Residentien met
 deze equaliseren.

Hoogt.

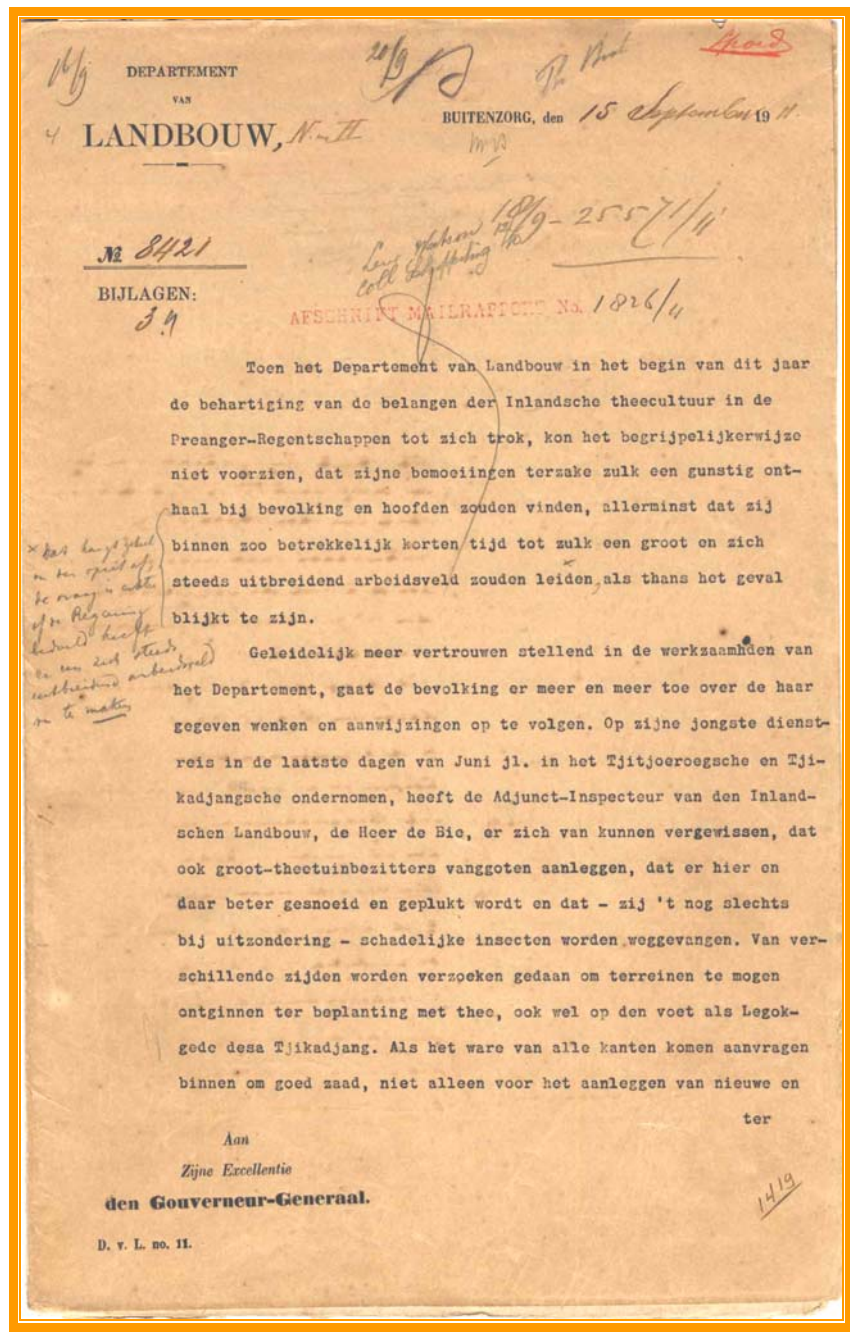
Kalkulasi hasil perkebunan kopi di Karesidenan Priangan,
 18 Januari 1861.

ANRI : Preanger No 29/25

4/3
 20/2 1/12
 N^o 1499/19
 Bandung, 26 Februari 1891
 Agendieren
 4/3 - 4403
 kopi
 R^o 13.75. 7/16
 73
 Ik heb de per Uwer Excellentie te berichten dat op den 14 dezer in de oesja Siangroek district Banjaran afdeling Bandung door aardbeving 450 koffieboomen zijn vernield.
 De Resident der Preanger, Regentochappen bij afwezen.
 De stadjistent - Resident van Bandung
 my
 Aan
 Uwe Excellentie,
 den Gouverneur, Generaal
 van Nederlandsch-Indië.

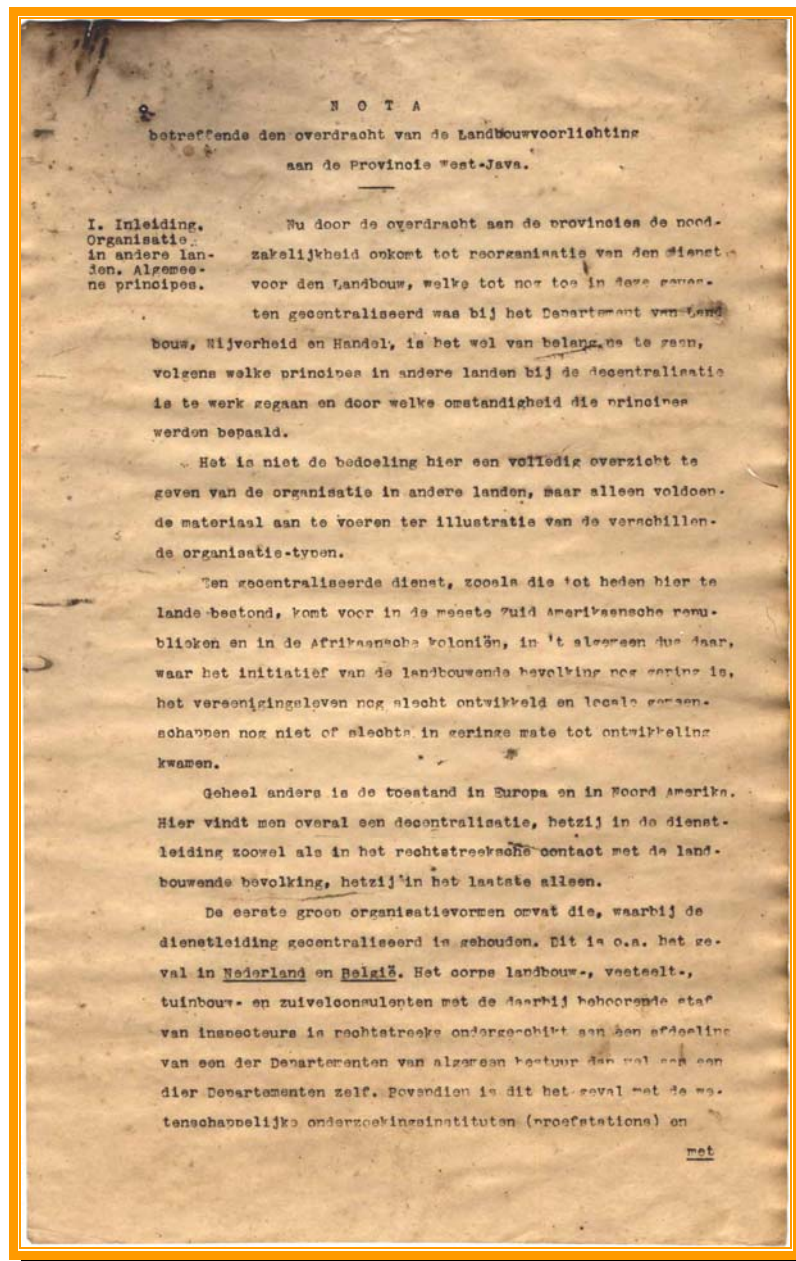
Laporan Kerusakan 450 pohon kopi akibat serangan kumbang tanah di daerah Banjaran, Bandung, 16 Maret 1891.

ANRI : *Algemeene Secretarie* AG.5323/91



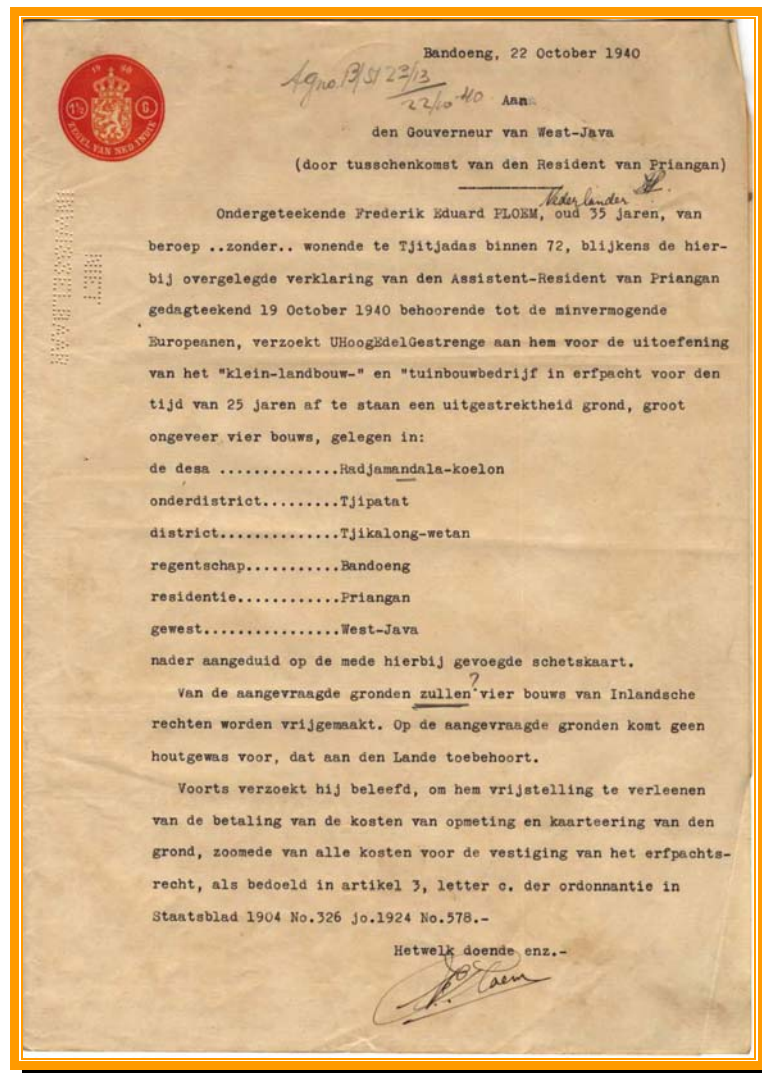
Besluit tanggal 17 Oktober 1911 nomor 55 tentang penyuluhan penanaman teh di Karesidenan Priangan, 7 Oktober 1911.

ANRI : Algemene Secretarie Bt 7 Oktober 1911 No. 55



Nota perjanjian antara organisasi pertanian dengan penduduk Jawa Barat tentang penyerahan bagi hasil pertanian, 10 Maret 1923.

ANRI : Binnenlandsch Bestuur No. 376



Pembebasan tanah untuk pertanian
Agroponik di Karesidenan Priangan,
22 Oktober 1940.

ANRI : Binnenlandsch Bestuur No. 2843



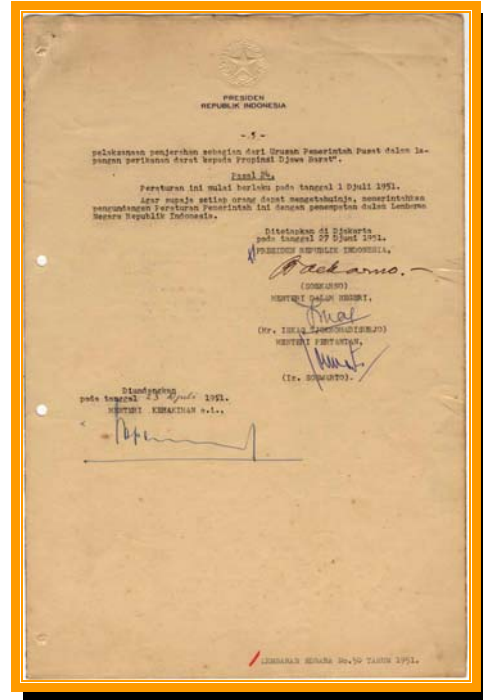
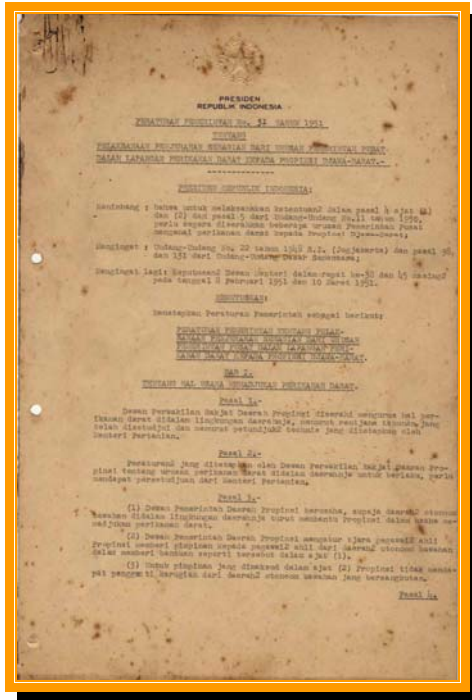
Seorang pekerja sedang menebang
Pohon Kina, Bandung,
8 September 1949.

ANRI : RVD 90908 FP 13



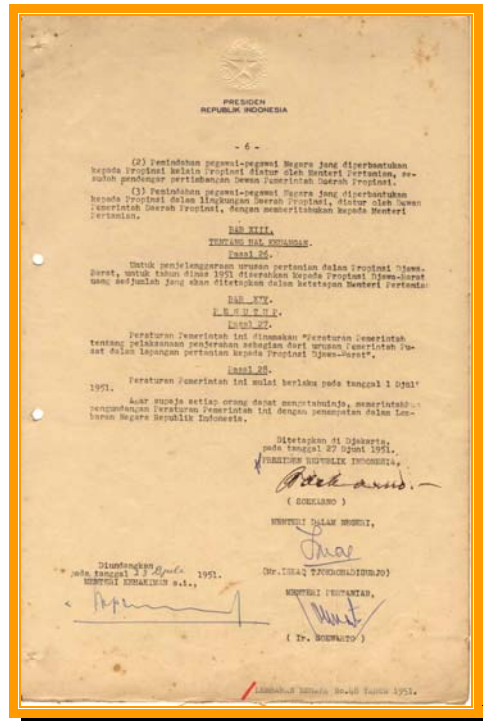
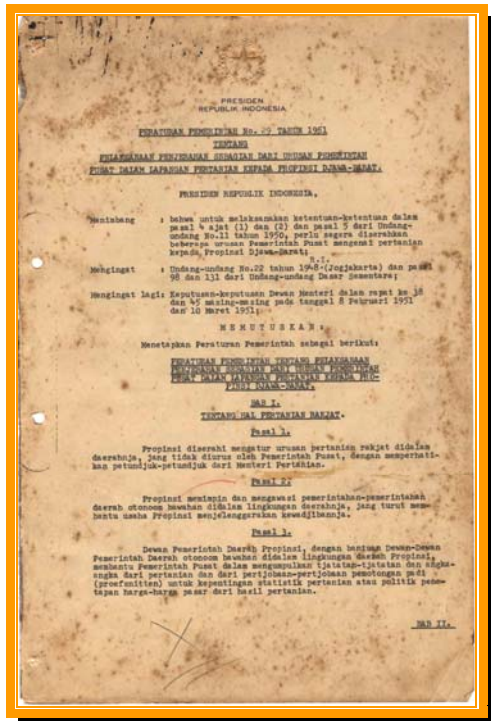
Seorang pemetik teh di Perkebunan Gunung Mas, Puncak,
25 April 1951.

ANRI : Kempen 512558



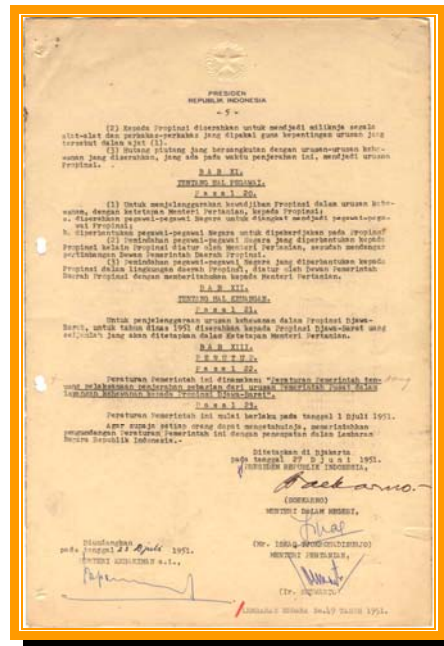
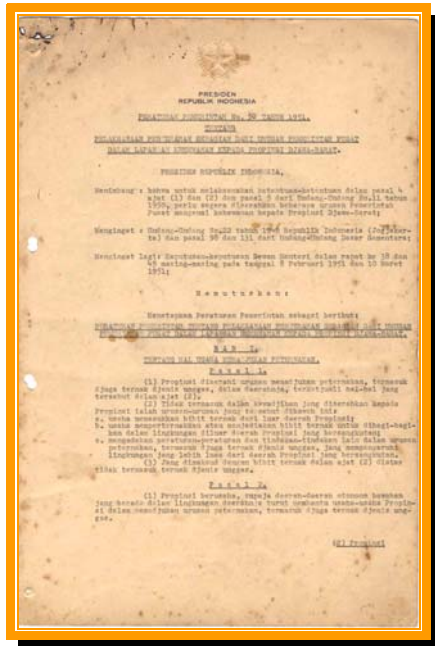
Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan pemerintah pusat dalam bidang perikanan darat kepada Provinsi Jawa Barat , 27 Juni 1951.

ANRI : Sekkab, Peraturan Pemerintah No. 63



Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam bidang pertanian kepada Provinsi Jawa Barat , 27 Juni 1951.

ANRI : Sekkab Peraturan Pemerintah No. 61



Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1951 tentang Pelaksanaan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam bidang kehewanan kepada Provinsi Jawa Barat , 27 Juni 1951.

ANRI : Sekkab Peraturan Pemerintah No.62



Bunga Bangkai di Kebun Raya Bogor,
28 Juli 1952.

ANRI : Kempen 520728 FJ 2



Perkebunan kol di Lembang,
27 Mei 1965.

ANRI : Kempen 65- 4981



Petani sedang menanam padi di sawah, Depok,
26 November 1952.

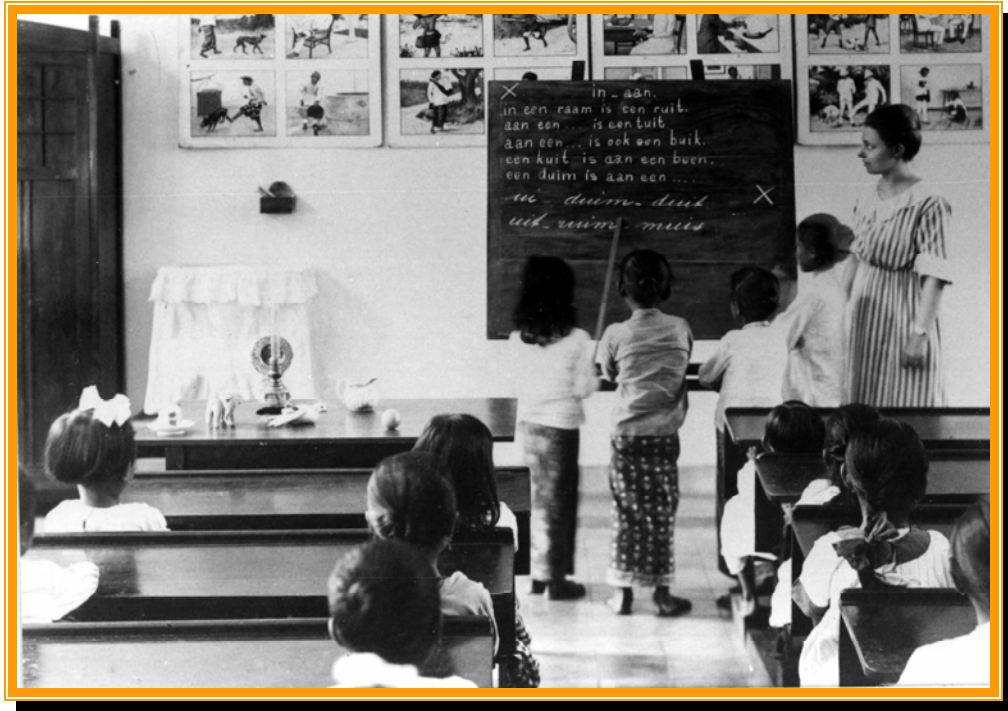
ANRI : Kempen 521126 FJ 10



Wakil Presiden M. Hatta didampingi Menteri Pertanian
Moh. Sardjan meninjau Balai Penyelidikan Karet di Bogor,
1 Agustus 1952.

ANRI : Kempen 520801 FE 8

Pendidikan



Pelajaran pertama di dalam kelas Sekolah Kartini di Bandung,
tanpa tahun.

ANRI : KIT No. 252/66



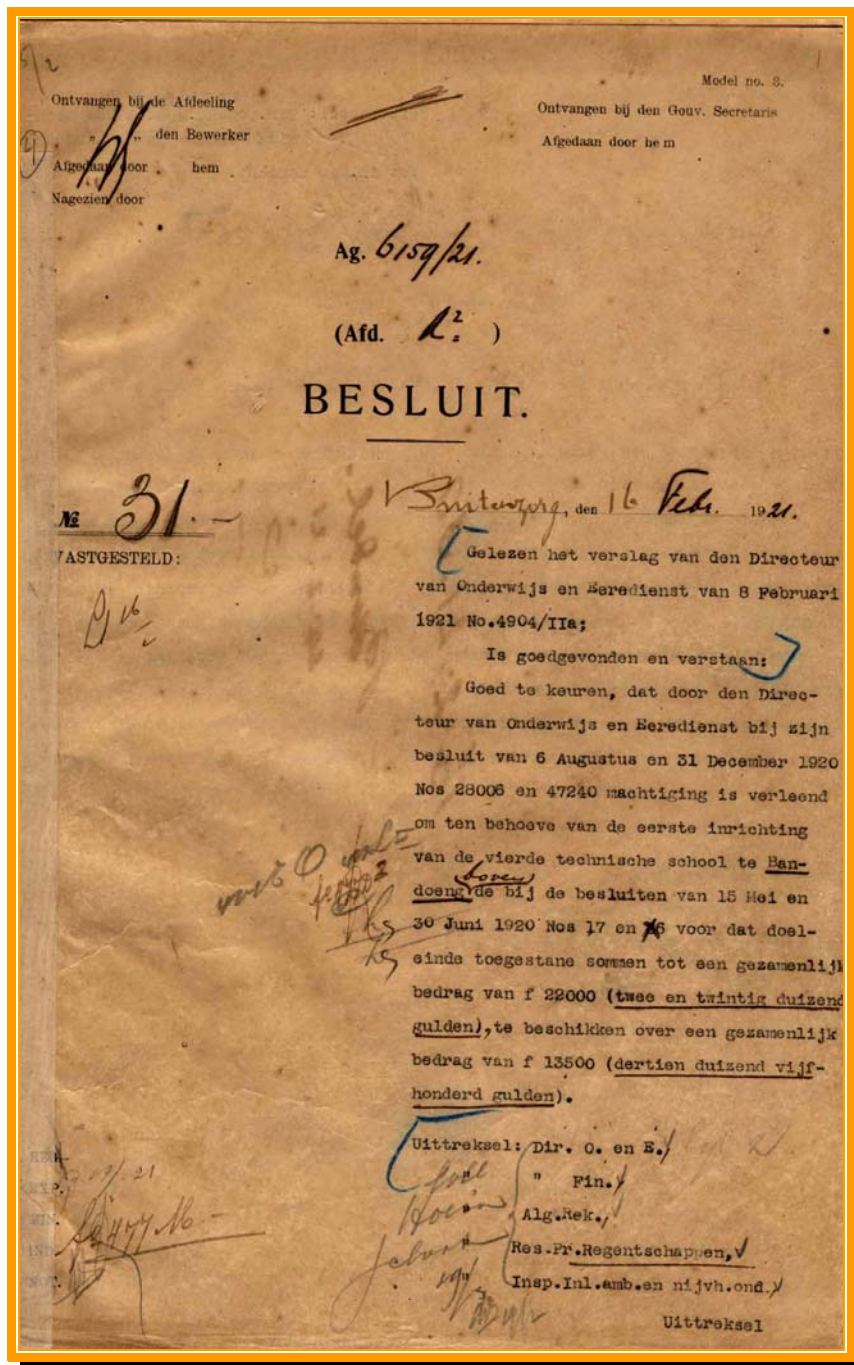
Sekolah Internasional "Taman Siswa" Mr. Soerjo Adipoetra khusus perempuan di Bandung, tanpa tahun.

ANRI : KIT No. 352/16



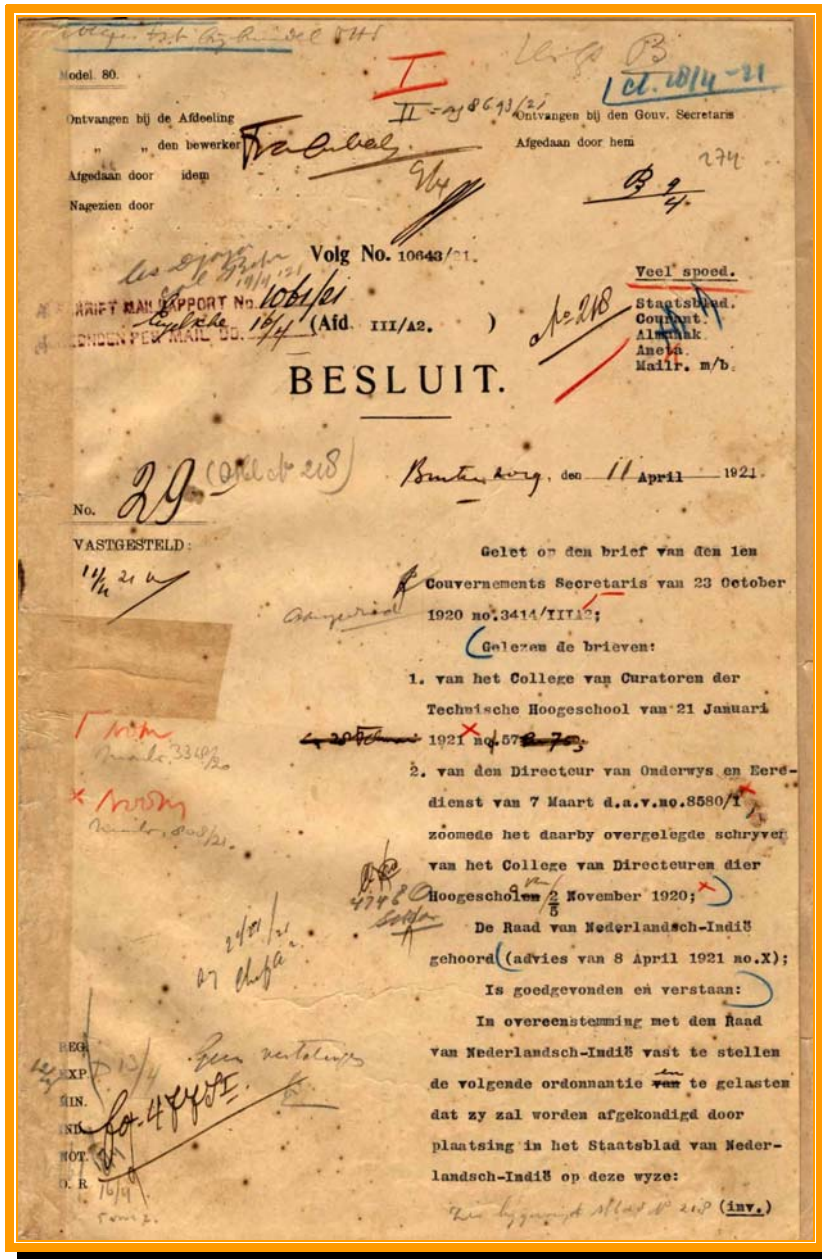
Sekolah swasta pribumi di Bogor, tanpa tahun.

ANRI : KIT No. 353/20



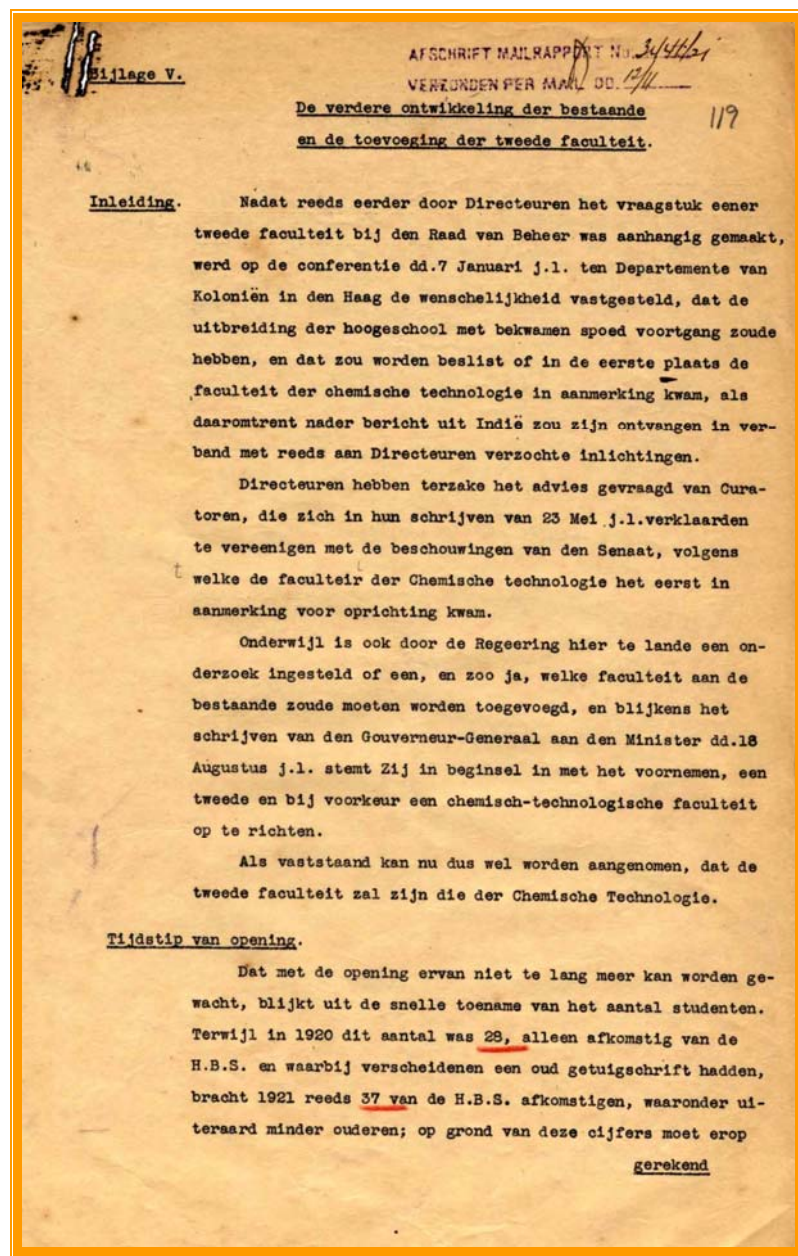
Besluit No. 31 tanggal 16 Februari 1921 tentang perluasan bangunan Technische Hooge School dengan biaya 22.000 Gulden, 16 Februari 1921.

ANRI : Algemeene Secretarie Besluit. No. 31



Besluit No. 29 tanggal 11 April 1921 tentang pengembangan jurusan Teknik Kimia di Technische Hooge School, 11 April 1921.

ANRI : Algemeene Secretarie Mgs. No.2061



Peraturan yang menetapkan Technische Hooge School untuk memberikan gelar insinyur kepada lulusannya, pengangkatan Ketua ITB oleh Gubernur Jenderal, pengangkatan dosen-dosen oleh Minister *van Kolonie* serta rincian pengajiannya, 11 April 1921.

ANRI : Algemeene Secretarie Mgs. No.2061



Para siswa Sekolah Pertanian Atas Bogor sedang berpraktek
tanaman pinus, Bogor,
14 Mei 1949.

ANRI : Kempen 90514 FJ 9



Mahasiswa Technische Hooge School sedang mengukur
kejernihan langit , Bandung,
18 Agustus 1949.

ANRI : RVD 90811 FP 1-10



Technische Hooge School,
14 September 1949.

ANRI : RVD 90914 FP 7



Boscha, Gedung Peneropongan Bintang di Lembang,
15 April 1950.

ANRI : Kempen 500415 FP 2-53



Alat teropong bintang (Boscha), Lembang
9 Februari 1951.

ANRI : Kempen 3-10-6



Presiden Soekarno sedang mengunjungi
Sekolah Kader di Cimahi,
10 Juli 1951.

ANRI : Kempen 514430



Siswa Polisi Wanita yang belajar di Sekolah Polisi Sukabumi,
1951.

ANRI : Kempen 511282



Presiden Soekarno sedang memeriksa barisan kehormatan
ketika mengunjungi Sekolah Polisi di Sukabumi,
31 Agustus 1952.

ANRI : Kempen 520831 FK 1-1



Peletakan batu pertama pembangunan gedung Fakultas
Pertanian oleh Presiden Soekarno, Bogor,
27 April 1952.

ANRI : Kempen 520427 FJ 12



Peletakan batu pertama pembangunan gedung Taman Siswa
oleh Ki Hajar Dewantoro, Bandung,
27 Juli 1952.

ANRI : Kempen 520727 FP 1



Siswa Penerbang Akademi Penerbangan Indonesia sedang
bersiap mengadakan demonstrasi penerbangan, Curug,
3 Mei 1955.

ANRI : Kempen 550503 FE 12

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH NO. 37 TAHUN 1957
TENTANG
PENDIRIAN UNIVERSITAS PADJADJARAN DI BANDUNG.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa hasrat dari rakyat Djawa-Barat pada umumnya dan masyarakat Bandung pada khususnya untuk mempunyai suatu universitas negeri adalah besar sekali, terbukti dengan adanya "Panitia Pendirian Universitas Negeri di Bandung";
2. bahwa atas resolusi Dewan Perwakilan Rakyat Pemerintah pada tanggal 19 Desember 1956 menjatakan dihadapan Dewan tersebut kesediaannya untuk mendirikan suatu universitas negeri di Bandung;
3. bahwa persiapan-persiapan yang perlu yang dilakukan oleh Panitia Persiapan Universitas Negeri di Bandung telah selesai, sehingga universitas itu dapat segera dibuka;
- Mengingat : a. Ordonansi Pengadjaran Tinggi tahun 1946 (Staatsblad 1947 No. 47), yang telah berulang-ulang diubah dan ditambah, terakhir dengan ordonansi termuat dalam Staatsblad 1949 No. 389;
- b. Undang-Undang No. 4 tahun 1950 (Republik Indonesia dulu) pasal 6 dan 7 jo Undang-Undang No. 12 tahun 1954 (Lembaran Negara 1954 No. 38) tentang dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran disekolah;
- c. Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1950 (Lembaran Negara 1950 No. 9) tentang Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan-peraturan Pemerintah :
1. No. 23 tahun 1949 tentang pendirian Universitas Gadjah-mada;
 2. No. 57 tahun 1954 tentang pendirian Universitas Air-langga;
 3. No. 23 tahun 1956 tentang pendirian Universitas Hassan Uddin;
 4. No. 24 tahun 1956 tentang pendirian Universitas Andalas;
- e. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengadjaran & Kebudayaan :
1. tg. 16 Agustus 1954 No. 35693/Kab. tentang pendirian Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Bandung;
 2. tg. 6 Djuli 1956 No. 40719/S tentang Peraturan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnja pada tanggal 6 September 1957;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS
PADJADJARAN DI BANDUNG,
sebagai berikut:

Fasal 1.

Di Bandung didirikan suatu Universitas yang bernama : "UNIVERSITAS PADJADJARAN" dan yang terdiri atas :

- a. Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat;
- b. Fakultas Ekonomi;

a dan b asalnja fakultas dari pada Jajasan Universitas Merdeka di Bandung, yang oleh pengurus telah diserahkan kepada Pemerintah;

e.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (UNPAD) di Bandung, 18 September 1957.

ANRI : Sekkab, Peraturan Pemerintah No. 335



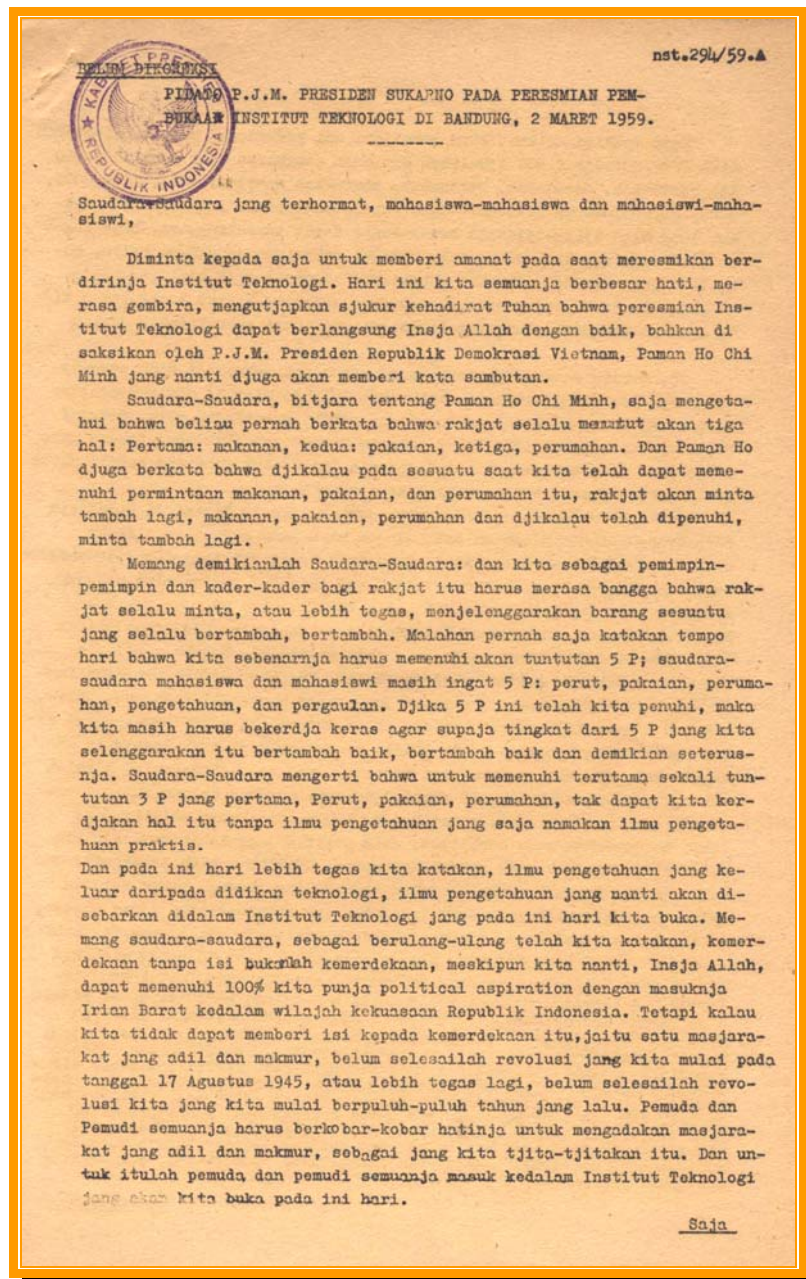
Presiden Universitas Negeri Padjajaran menyerahkan surat pengesahan kepada Dewan Mahasiswa Sdr. Abdul Djabar pada pelantikan Dewan Mahasiswa Universitas Negeri Padjajaran, Bandung, 30 Desember 1957.

ANRI : Djapenpro Djabar 571230 FP 7- 231



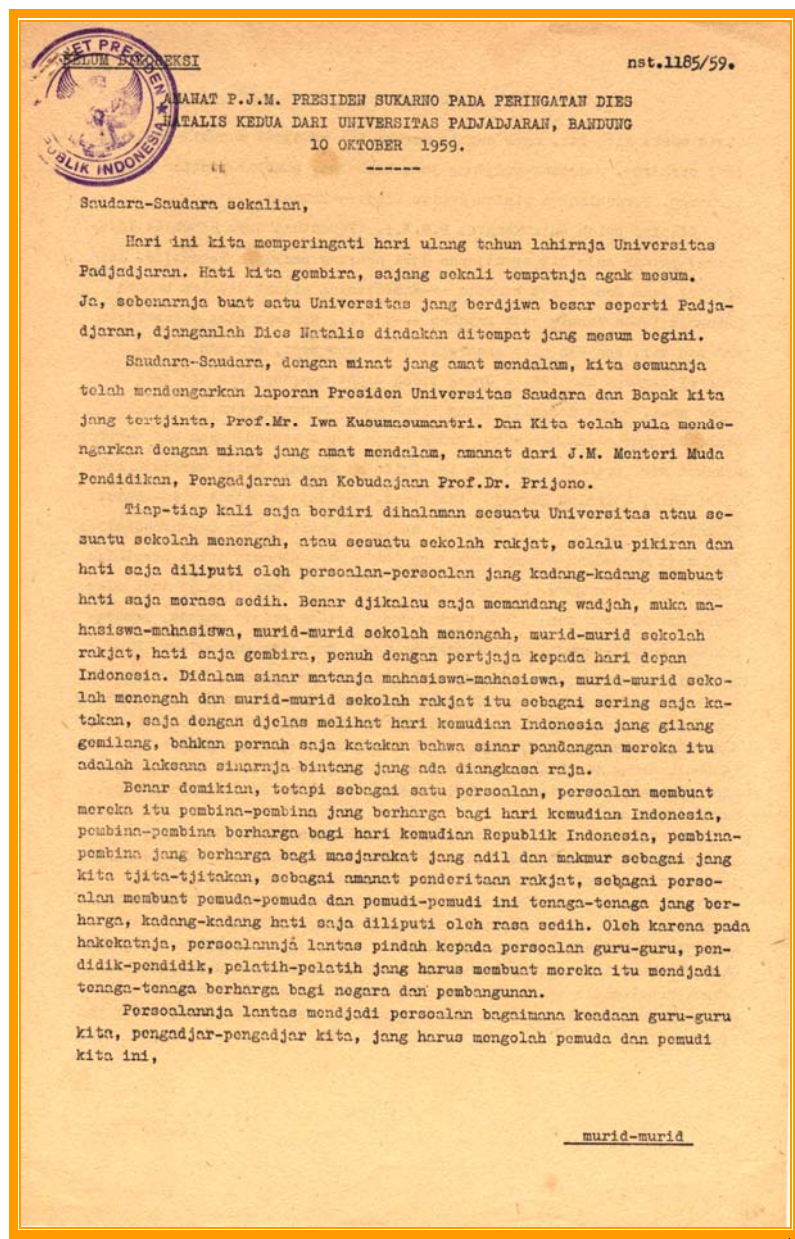
Gedung Universitas Negeri Padjajaran, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Bandung,
6 November 1958.

ANRI : Kempen 581106 FP 1



Pidato Presiden Soekarno pada peresmian
pembukaan ITB di Bandung,
2 Maret 1959.

ANRI : Pidato Presiden No. 64



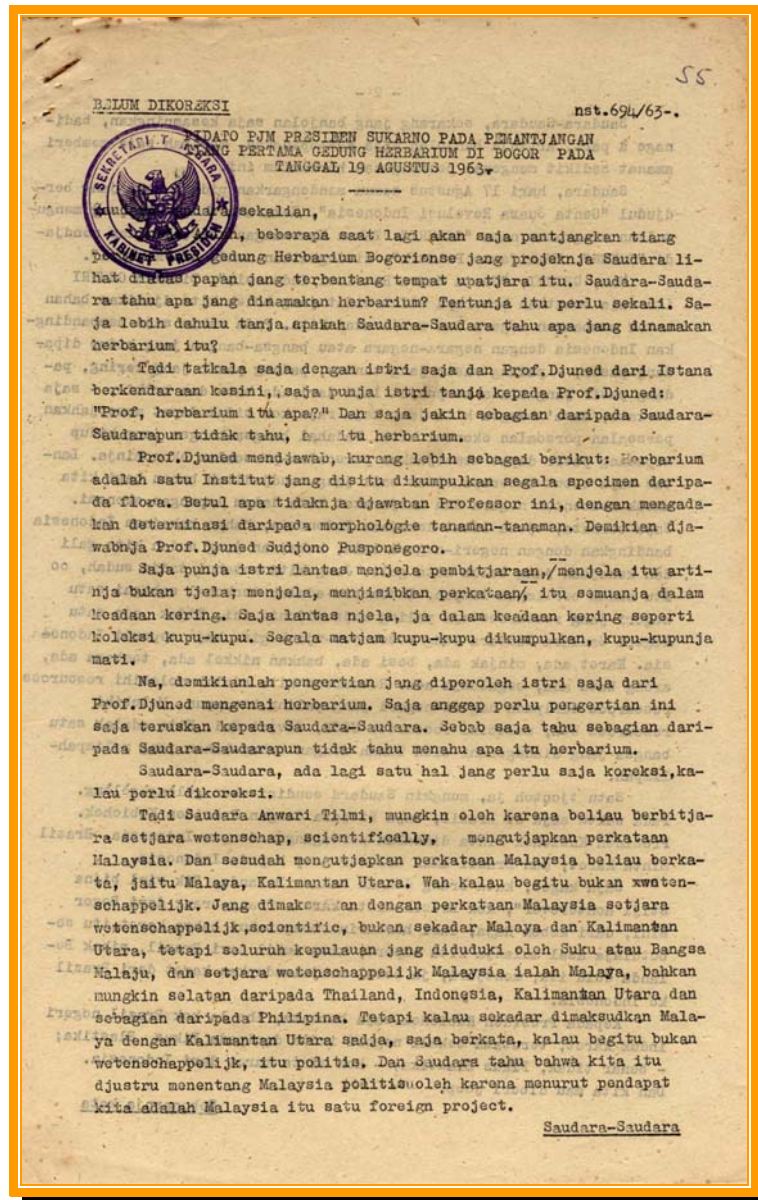
Amanat Presiden Soekarno pada peringatan Dies Natalis ke II
Universitas Padjajaran,
10 Oktober 1959.

ANRI : Pidato Presiden No. 122



Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa dari Institut Teknologi
Bandung kepada Presiden Soekarno, Bandung,
13 September 1962.

ANRI : Djapenpro Djabar 620913 FP 9-62.



Pidato Presiden Soekarno pada pemancangan tiang pertama
Gedung Herbarium di Bogor,
19 Agustus 1963.

ANRI : *Pidato Presiden No.516*

No.29/S/64.

SAMBUTAN DR.H.ROESLAN ABDULGANI, SELAKU WK.KETUA BADAN
PEMBANTU I.K.I.P. DI BANDUNG

1. Dengan amat menjesal, saya tidak dapat memenuhi undangan sdr2 datang ke Bandung, karena beberapa soal2 kenegaraan di Pusat mengharuskan saya beberapa hari ini tetap di Ibu-kota.
2. Dalam pada itu saya ingin mengutipkan selamat dengan terbentuknja Dewan Mahasiswa IKIP jang baru ini, dengan do'a dan harapan semoga sdr2 semua dapat menjalankan tugas dan dharmabakti sdr2 dengan sebaik2nja.
3. Lebih2 dalam situasi Negara kita dewasa ini, dimana Revolusi kita belum selesai dan Rakjat serta Negara kita masih menghadapi berbagai-bagai persoalan, maka sudah sewadjarnja kalau dari setiap mahasiswa Indonesia, sebagai tjalon-sardjana dan tjalon-pemimpin, diharapkan segala amalnja, baik berupa pikiran maupun tenaga, untuk ikut memetjahkan persoalan2 itu se-serius-seriusnja dan se-djudjur-djudjur-nja.
4. Memang kadang2 terdengar pendapat, bahwa seorang mahasiswa jang sedang sibuk2-nja menuntut berbagai ilmu dan peladjaran itu, ta'mungkin tjukup waktunja dan ketjakaannja untuk memberikan sumbangan kepada Negara dan Rakjatnja. Kalau ada pendapat2 jang bernada demikian itu, maka ini adalah atau mentjerminkan suatu "inferiority-complex" atau keluar dari keinginan untuk memetjahkan kesulitannja sendiri lebih dulu menurut tjara dan djiwa individualisme jang sempit.
5. Terhadap pendapat2 demikian ini --andaikata ada-- saya ingin memperingatkan bahwa dalam setiap Revolusi atau setiap pergolakan jang maha-hebat itu, maka tidak mungkin kita bersikap "inferior" dalam djiwa dan berbuat individualistis dalam mental kita. Sebab sikap demikian adalah suatu sikap atjuh-ta'atjuh terhadap Revolusi dan pergolakan masjarakat jang luas itu, sehingga tentu akan mengalami djalan-buntu.
6. Karena itu saya berpendapat, bahwa setiap mahasiswa Indonesia harus ikut aktif terdjun dalam persoalan2 Revolusi dan masjarakat bergamaan dan berbarengan dengan terdjunnja ia didalam lautan ilmu-pengetahuan. Saya menganggap ilmu-pengetahuan dari buku2 dan dari kuliah-kuliah mahaguru kita harus disertai dengan pengambilan ilmu dan pengalaman dari masjarakat kita sendiri dan Revolusi kita sendiri. Dengan lain perkataan: setiap mahasiswa Indonesia harus beladjar dengan tekun dari dua gerba-ilmu-pengetahuan, jaitu Alma-Maternia dan Revolusi Nasionalnja. Kedua sumber ini harus dengan tekun, ulet dan tabah kita gali; dan djangan sampai ada mahasiswa Indonesia jang hanya memikirkan studijnja setjara individualistis sadja; sebaliknya djangan sampai ada mahasiswa jang ingin menutupi tidak-kebetjusannja dan keagalannja dalam studi itu, dengan dalih seakan-akan dia menjadi "korban dari aktivitaanja ditengah-tengah Rakjat dan Masjarakat".
7. Sembojan dan sikap-hidup tiap mahasiswa Indonesia dewasa ini ialah, bahwa ia adalah mahasiswa-nja Revolusi dan mahasiswa-nja Ilmu. Dan kedua-duanja Ilmu dan Revolusi adalah bukan suatu dwi-antagonisme, melainkan suatu dwi-tunggalnja medan-persiapan dan medan-bakti kita sekalian.
8. Apabila hal2 jang saya katakan diatas itu adalah menjangkut semua mahasiswa Indonesia, maka hal2 itu lebih-lebih lagi berlaku bagi tiap mahasiswa IKIP, sebab IKIP adalah djustru setiap hari berketjimpung dalam "Keguruan dan Ilmu-pendidikan",

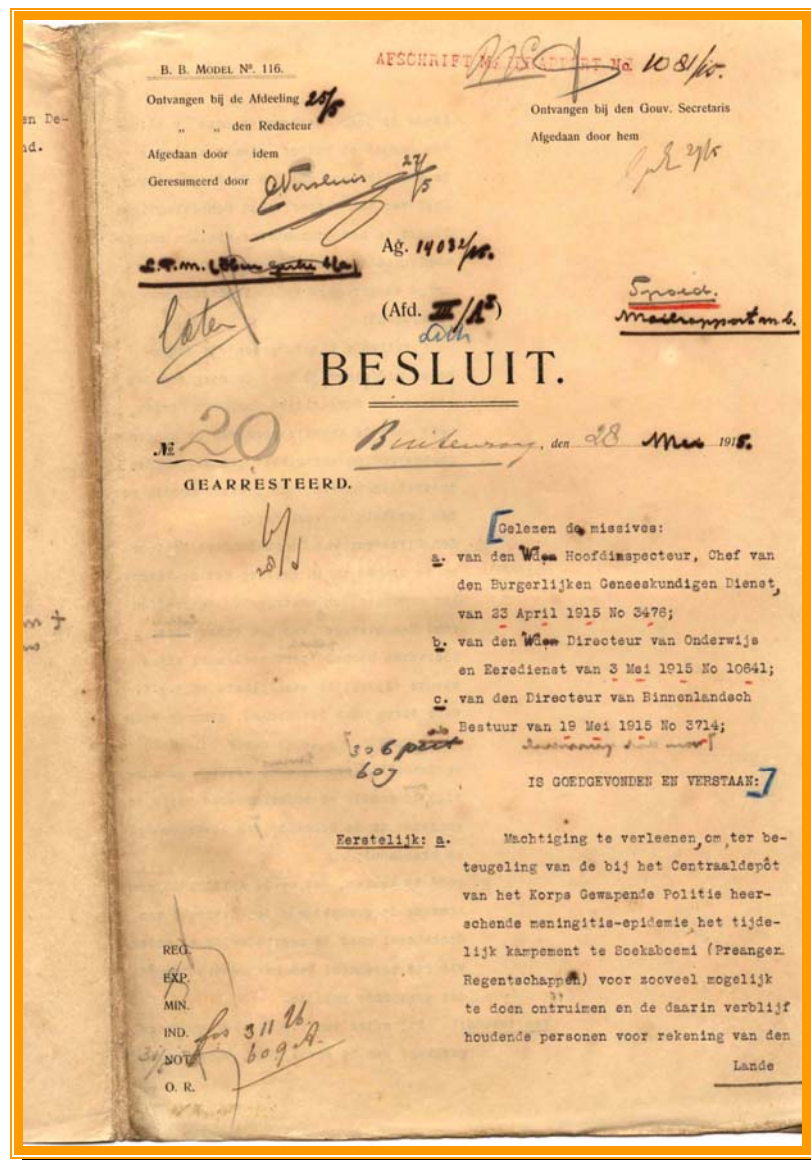
suatu.....

Indo.no.32.3.64 (2).

Sambutan Roeslan Abdulgani selaku wakil Ketua Badan Pembantu IKIP di Bandung tentang perlunya mahasiswa dalam persoalan revolusi,
17 Maret 1964

ANRI : Roeslan Abdulgani No. 434

Kesehatan



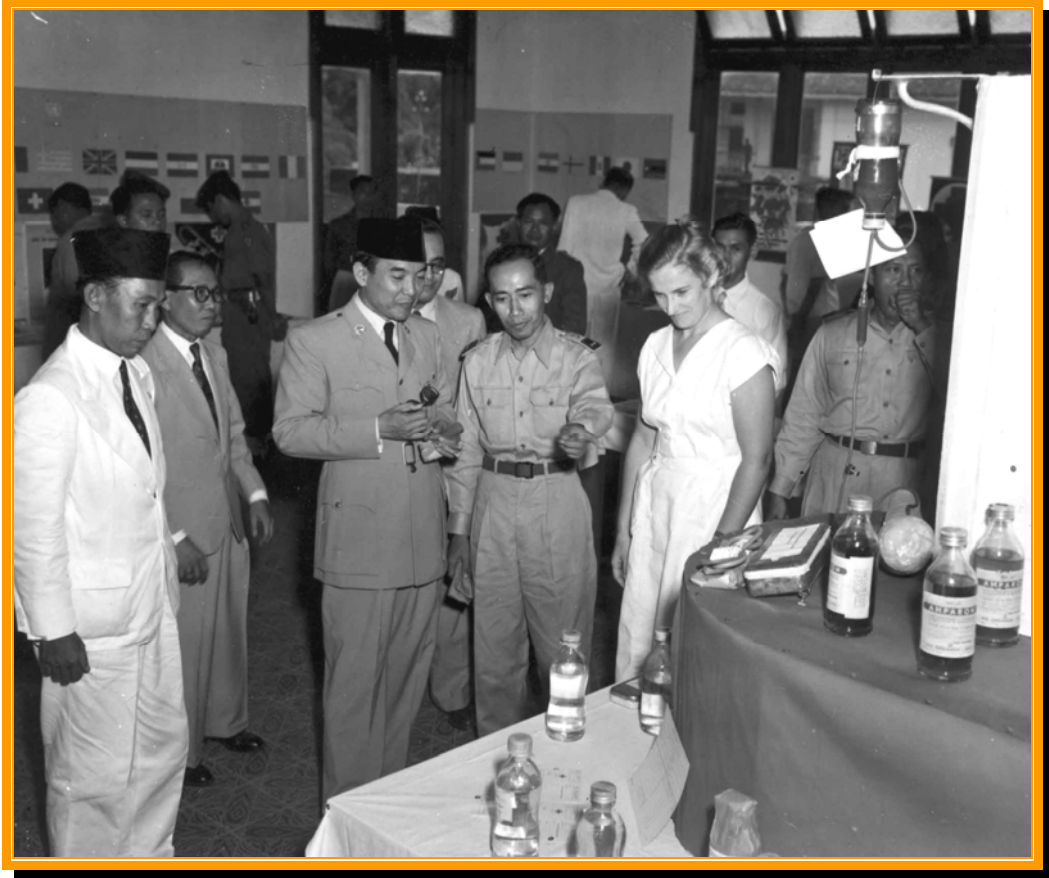
Pembangunan gedung rehabilitasi epidemi di Daerah Sukabumi, epidemi tersebut sedang diteliti oleh Institut Pasteur, Bandung, 28 Mei 1915.

ANRI : Algemeene Secretarie Besluit No.20 tanggal 28 Mei 1915



Sanatorium Cisarua, Jawa Barat ,
4 Oktober 1947.

ANRI : RVD 71004 FJ 1



Presiden Soekarno mengunjungi PMI dalam rangka Konggres
PMI ke V di Bogor,
4 April 1951.

ANRI : Kempen 511906



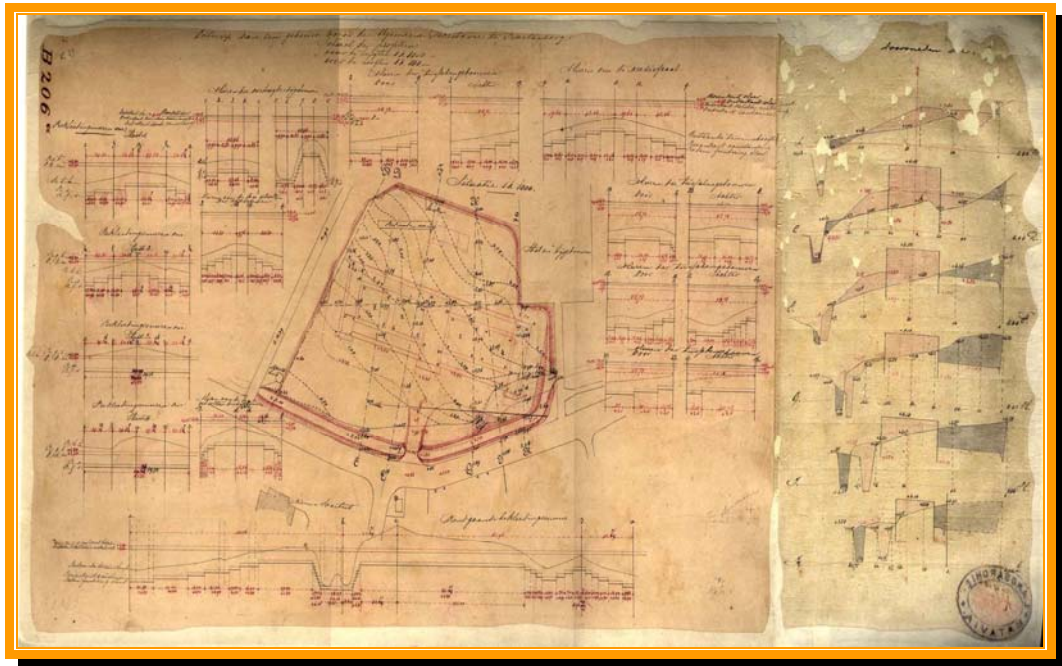
Konferensi WHO di Bandung,
9 Oktober 1956
Basipda Jawa Barat : Deppen No.56.27



Gedung Balai Pengobatan Penyakit Kusta
di Desa Kedaung, Bekasi,
2 Maret 1957.

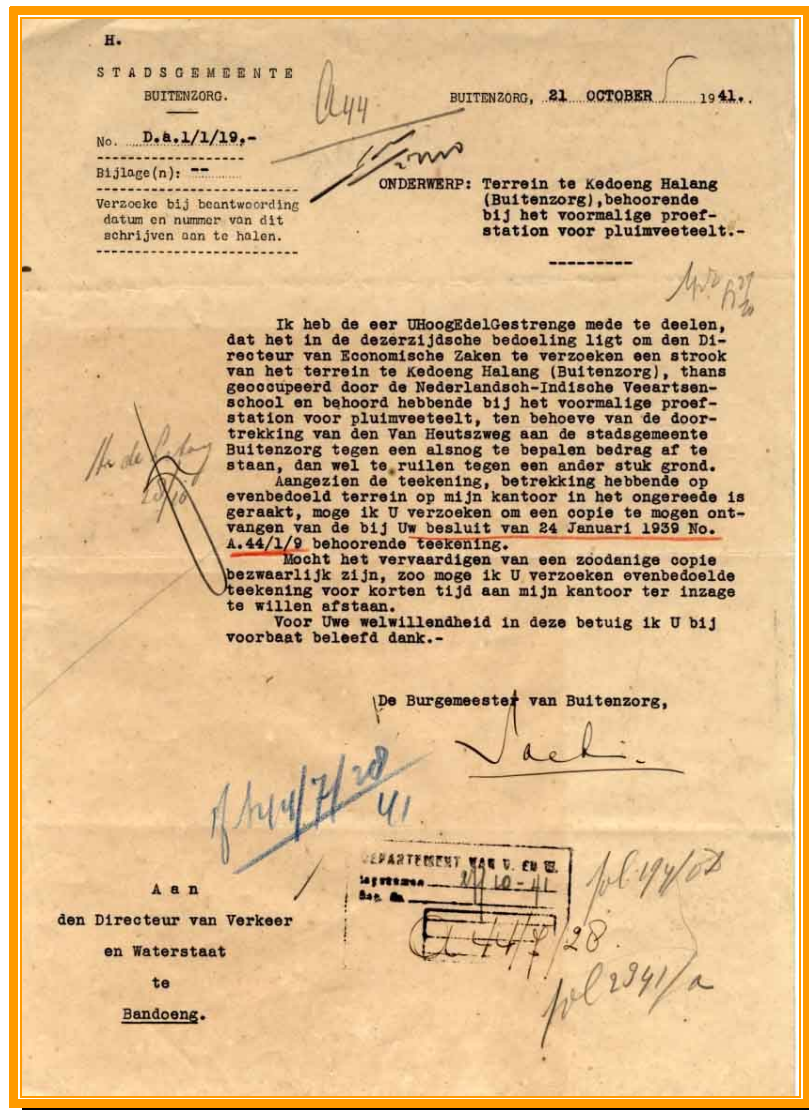
ANRI : Kempen 570302 FL 9

Infrastruktur



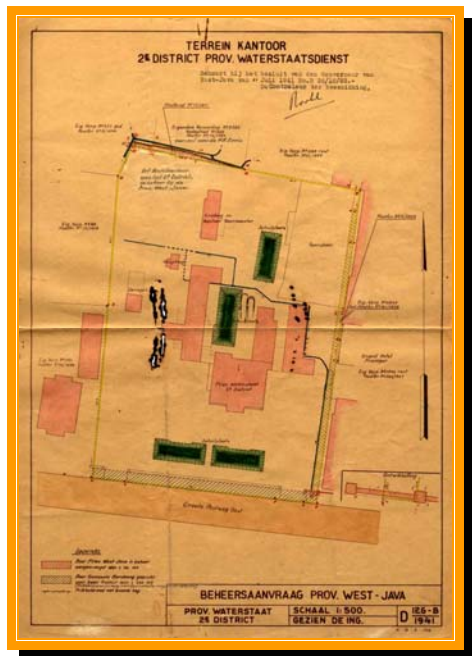
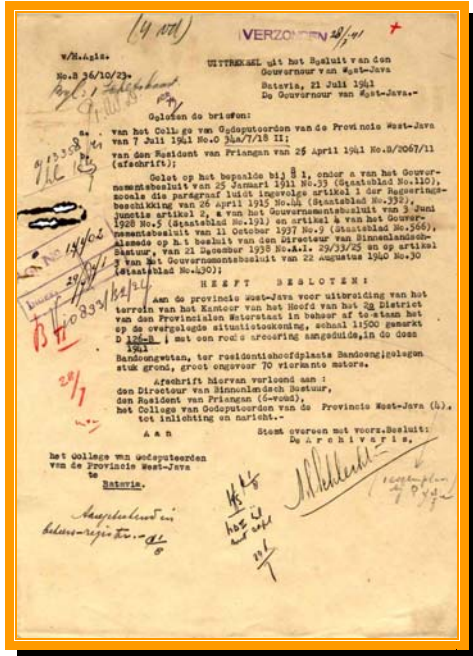
Denah Bangunan *Algemeene Secretarie*, Bogor,
tanpa tahun.

ANRI : F de Haan Nomor K 59



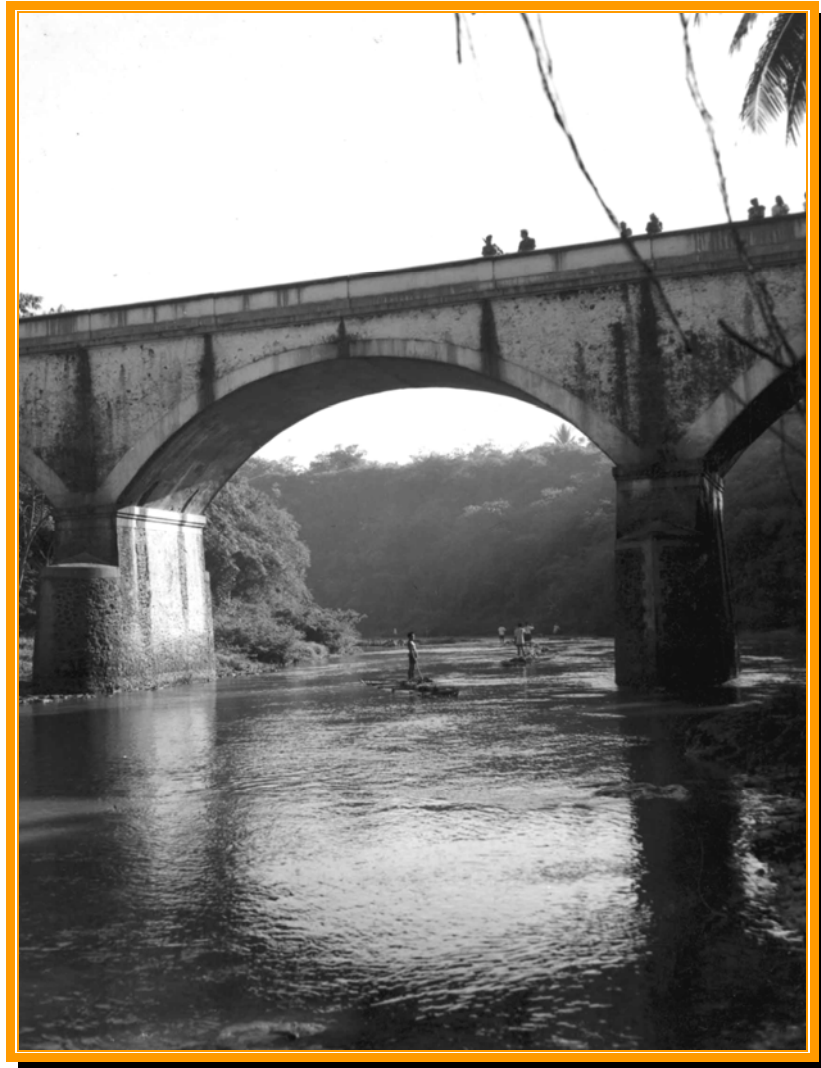
Surat tentang penunjukan daerah Kedung Halang (Bogor) untuk digunakan sebagai laboratorium percobaan di bidang pertanian dan peternakan, Kedokteran Hewan, lampiran Besluit, 29 Oktober 1938.

ANRI : *Burgerlijke Openbare Werken Ax . No.76.*



Salinan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang perluasan kantor Dinas Pekerjaan Umum, Provinsi Jawa Barat, lampiran denah, 21 Juli 1941.

ANRI : Burgerlijke Openbare Werken Ax. No. 115



Jembatan di atas Kali Ciliwung, Puncak,
10 Juli 1949.

ANRI : RVD 90710 FK 1-1



Gedung Fakultas Teknik, Universitas Indonesia, Bandung,
(sekarang ITB), 8 Juli 1953.

ANRI : Kempen 530708 FP 2



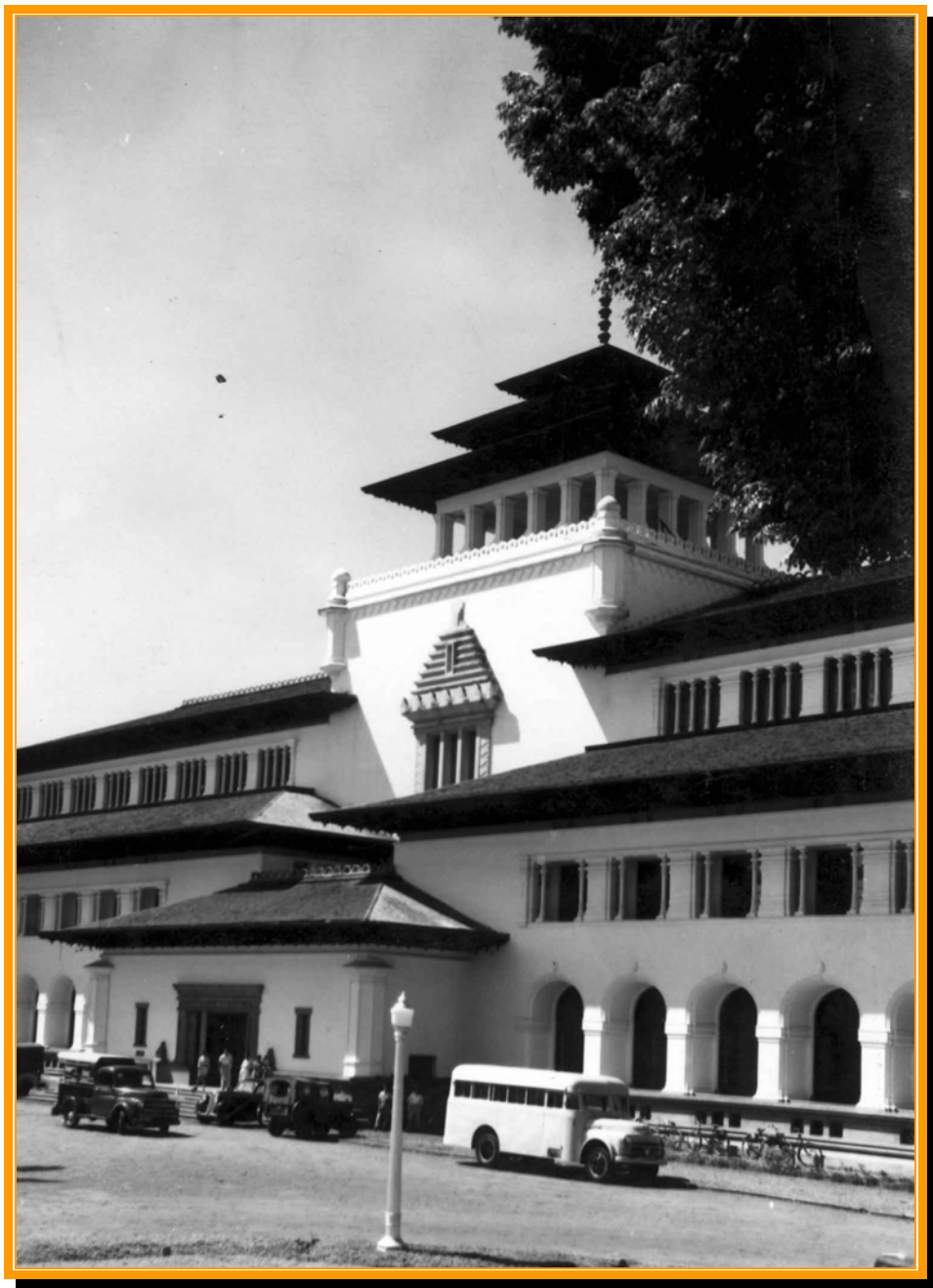
Menteri Perhubungan Prof. Ir. Rooseno, sedang mengadakan pembicaraan pertama melalui sentral telepon otomatis dengan Walikota Bandung R. Enoch, 10 Oktober 1953.

ANRI : Djapenpro Djabar 531010 FP 9



Jembatan Kereta Api sedang diperbaiki dengan tenaga ahli yang dapat diselesaikan dalam waktu 20 menit, Sindanglaut, 18 November 1953.

ANRI : Kempen 531118 FY 1



Gedung Sate, Kantor Kepala Daerah
Gubernur Jawa Barat , Bandung,
22 April 1955.

ANRI : Kempen 550422 FP 4-25



Istana Bogor, tempat pemerintahan Gubernur Jenderal
pada musim panas,
tanpa tahun.

ANRI : KIT No.96/2



Istana Cipanas, tempat peristirahatan
Gubernur Jenderal,
tanpa tahun.

ANRI : KIT No.863/23



Jembatan gantung sepanjang 40 meter, Bekasi,
14 Oktober 1957.

ANRI : Kempen 571014 FL 1-3



Pembangunan kembali jembatan Leuwisapi (Daerah Nanjung)
yang menghubungkan antara Cimahi dan Soreang, Bandung,
15 November 1958.

ANRI : Djapenpro Djabar 581115 FP 1-107 / Da / Kab



Gedung "Merdeka" tempat pemungutan suara ke II
kembali ke UUD 1945 oleh Dewan Konstituante
di Bandung,
2 Juni 1959.

ANRI : Djapenpro Djabar 590602 FP 40 b -59

Irigasi



Denah saluran air ledeng yang berasal dari rawa Cibinong,
29 Januari 1801.

ANRI : F de Haan Nomor E. 22



Pusat tenaga air di Lumajang, Bandung Selatan,
23 September 1949.

ANRI : RVD 90823 FP 3-11



Proyek Pembangunan Waduk Serba Guna Jatiluhur,
18 April 1965.

ANRI : Deppen 64- 4150, 64-4156

AMANAT ENK. PRESIDEN SUKARNO PADA WAKTU BERGUNDUNGJI PROJEK
DJATILUHUR, PURWAKARTA, 19 SEPTEMBER 1965.

Saudara-Saudara sekalian,

Beberapa laporan telah saja terima mengensi pelaksanaan Proyek Djatiluhur. Sehingga saja telah mendapat satu global picture daripada progress pelaksanaan Proyek Djatiluhur ini. Saja tandaskan sekali lagi, saja menghendaki, saja memerintahkan agar supaya Proyek Djatiluhur ini selesai tahun jang akan datang. Kira-kira akhir bulan April. Akhir bulan April harus sudah selesai. Untuk itu maka saja minta semua pihak, seperti mengerojok. Implementasi daripada perintah saja ini, dirojok bersama-sama, gotong rojong bersama-sama. Sebab hanja dengan djalan demikianlah, maka pekerjaan jang besar ini bisa selesai pada waktu jang ditentukan.

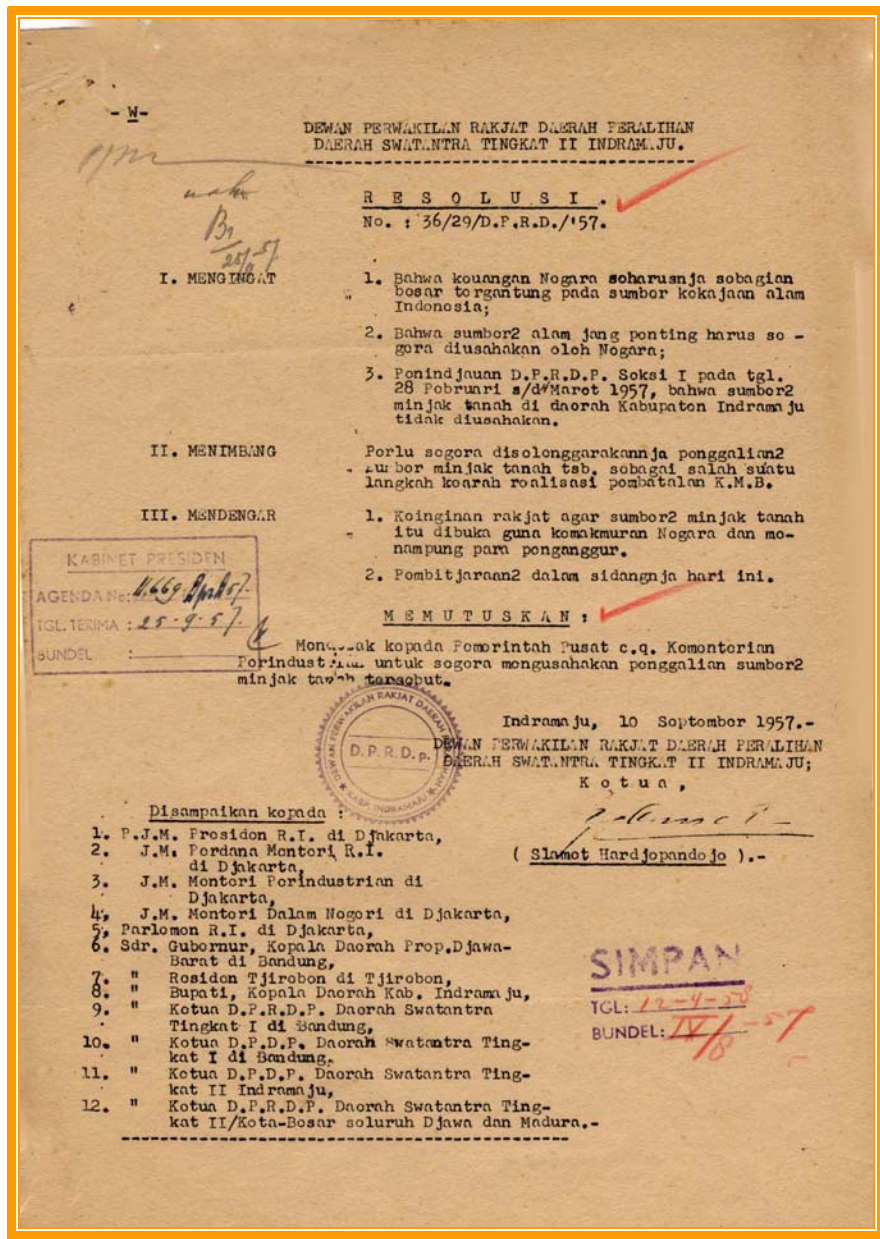
Saja punya pesen kepada pihak kaum buruh pun, supaya kaum buruh memberikan sumbangan tenaga se-penuh-penuhnya kepada pelaksanaan Proyek ini. Ingat, Proyek ini bukanlah proyek milik saja, dan untuk siapa? Proyek ini bukan proyek milik satu usaha kapitalis, bukan proyek milik satu orang kapitalis, tetapi ini adalah Proyek Negara, Proyek Rakyat, Proyek kita semua. Proyek daripada Revolusi kita, ja revolusi Angkatan Bersendjata, ja revolusi daripada Departemen-departemen jang ada, ja revolusi daripada kaum wanita, ja revolusi dari kaum buruh, ja revolusi dari nelayan, revolusi daripada kita semua. Proyek ini adalah proyek Revolusi kita itu. Revolusi kita jeng sebagai djuga saudara-saudara kaum buruh mengetahui, adalah satu revolusi jeng didjalenkan simultan, bersama-sama, satu saat, satu detik bersama-sama. Revolusi kita adalah satu revolusi jang harus diselenggarakan simultan bersama-sama, saat jang bersama-sama, tenaga bersama-sama, prinsip-prinsipnja bersama-sama. Tidak bisa dikatakan, ini proyek adalah hanja untuk pihak kaum listrik saja, tidak. Atau proyek ini hanja untuk, bahkan djawa derat saja. Atau proyek ini hanja untuk bagian Binamagga saja, tidak. Proyek ini proyek kita semua, djuga daripada seluruh kaum buruh. Bukan hanja kaum buruh jang bekerdja di Djatiluhur, tidak. Kaum buruh dari Sabang sampai Merauke. Kaum buruh daripada rakjat Indonesia, kaum tani daripada rakjat Indonesia, kaum nelayan daripada rakjat Indonesia, kaum terpeladjar daripada rakjat Indonesia, opsir-opsir daripada Angkatan Bersendjata Indonesia, predjurit-predjurit daripada Angkatan Bersendjata Indonesia, semuanya, sekali lagi semuanya!

Dus sebagai kukatakan tadi, semua kita ini harus memberikan tenaga kita se-penuh-penuhnya, seperti apa jeng kukatakan tadi, kita
kerojok bersama, agar

Amanat Presiden Soekarno pada waktu mengunjungi proyek
Waduk Serba Guna Jatiluhur di Purwakarta,
19 September 1965.

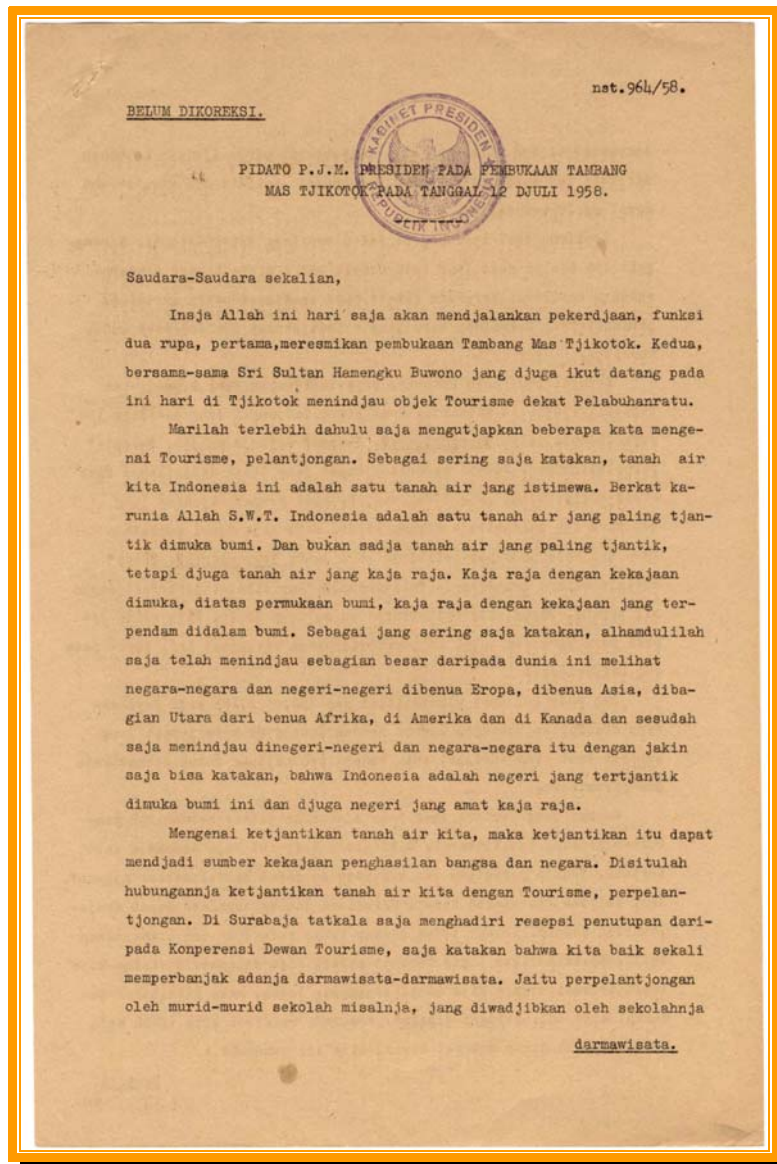
ANRI : Pidato Presiden No. 803

Pertambangan



Resolusi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan Swatantra Tk. II Indramayu kepada Pemerintah Pusat Cq. Kementerian Perindustrian agar segera mengusahakan penggalian sumber-sumber minyak tanah di daerah Indramayu, 10 September 1957.

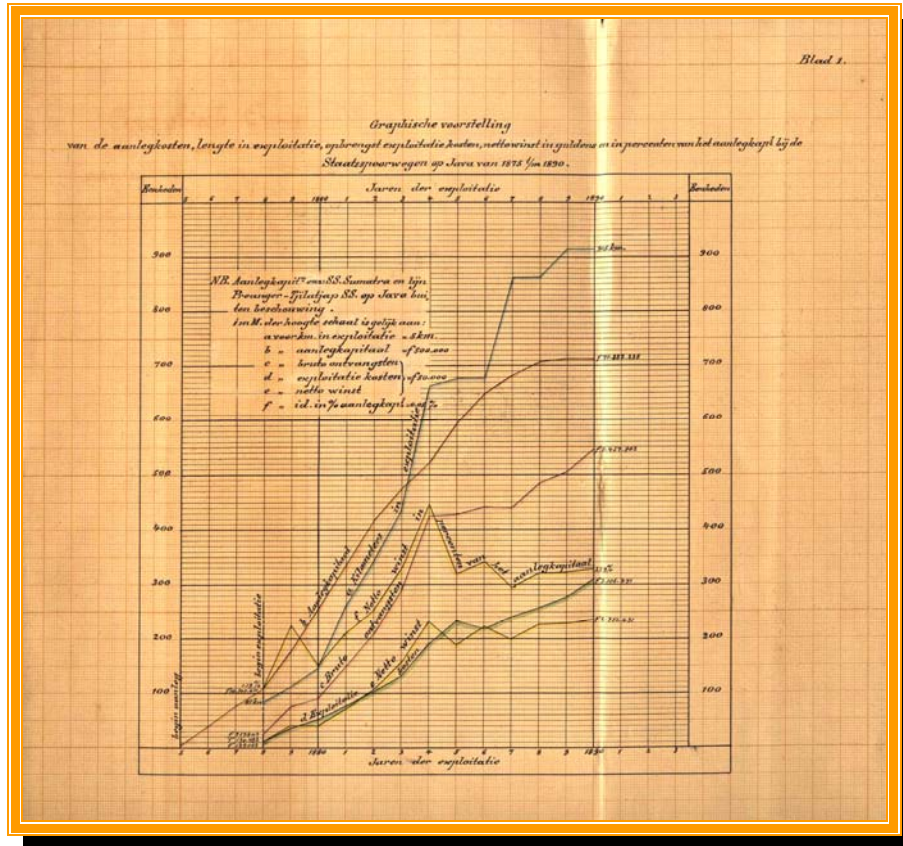
ANRI : Kabinet Presiden No.1676.



Pidato Presiden Soekarno pada pembukaan tambang emas di
Cikotok Sukabumi,
12 Juli 1958.

ANRI : Pidato Presiden No. 012

Transportasi dan Telekomunikasi



Grafik tentang biaya pekerjaan stasiun kereta api Jalur Priangan-Cilacap, 1890.

ANRI: Tzg. 34429



Kereta api sedang langsir di Stasiun Bandung,
12 Juli 1952.

ANRI : Kempen 520712 FP 44



Stasiun Kereta Api Bandung,
27 Juli 1953

ANRI : Djapenpro Djabar 530602 FP 19



Stasiun Kereta Api di Cirebon,
15 November 1953.

ANRI : Kempen 531115 FY 33



Pesawat terbang Garuda Indonesia Airways sedang mendarat di lapangan terbang Andir, Bandung, 10 September 1949.

ANRI : RVD 90910 FP 6



Becak sebagai salah satu alat transportasi
di kota Bandung,
1 Agustus 1953.

ANRI : Kempen K. 530801 FP 2



Pemandangan di sekitar pelabuhan Cirebon, terlihat pangkalan kapal-kapal penarik sampan tempat kapal berlabuh, Cirebon, 14 November 1953.

ANRI : Kempen 531114 FY 6

NOTA betreffende de organisatie van
den Interlocalen dienst.

Ten aanzien van het voorstel van
den C.E.I. merk ik het volgende op.

Ter voorkoming van misverstand stel
ik op de voorgrond, dat ik geen inter-
localen "bedryf" ken, wel een interlo-
calen "dienst", welke met den localen
dienst een onverbrekelyk geheel vormt,
dat het "T E L E F O O N" bedryf wordt
genoemd. Hieromtrent heb ik in myn nota
van 11 Februari j.l. No. 1484 reeds myn
standpunt uiteengezet.

De eerste vraag is nu: Is de gang van
zaken by den Interlocalen dienst van die
dien aard, dat een geheele reorganisatie
van de leiding noodig is? Onder "van
dien aard" kan men in dit verband ook
lezen "zeer slecht". Immers men gaat een
bestaande organisatie niet veranderen,
tenzy die organisatie niet of niet
meer voldoet.

Op de vraag, of de dienst slecht
is en verbetering behoeft door alge-
heele reorganisatie, kan ik niet anders
dan ontkennend antwoorden. Reeds meer-
malen heb ik bewyzen van tevredenheid
aangehaald en vorige week vernam ik
die wederom ongevraagd in een gezels-
schap van handelsmensen, die veel tele-
foneerden en die niet wisten, dat ik by
den Telefoondienst werkte.

Als deze personen nu tevreden zyn,
wat wil men dan eigenlyk nog meer.

Uit gesprekken met de C.E.I. is

my

Nota Kepala Dinas Interlokal tentang
Organisasi Dinas Interlokal,
15 Mei 1925.

ANRI : Pos Telegraaf dan Telefoon No. 45

1931

BUREAU

Agenda No. _____

Ontvangen bij het Hoofdbureau P. T. & T.	Ontvangen bij het Archief	Overgeschreven
Ontvangen bij Bureau	Ontvangen bij de Expeditie	
Afgegaan door den Beveiligingswachter	Vormden	
Afgegaan door den Beveiligingswachter	Inkuis	Kasieren
Afgegaan door den Administrateur		

No. *2747* / *Geheim*. BANDOENG, den *9 Oktober* 1931

Met Hoofd van den
Post-, Telegraaf- en Telefoon dienst,

VASTGESTELD *1931*
2747
25/10

Onderwerp: *Vergrooten van den
Hoofst-telegraafkantoor
te Bandoeng*

HEEFT BESLOTEN:

*Met het Hoofd van den
Post-, Telegraaf- en Telefoon dienst*

1931

te schrijven

BILLAGEN: *1. plan van de uitbreiding*

*den Architect.
P. W. Brinkman
Linnata - straat 33
Bandoeng.*

April 1929 - 20.000 no. (No. 11).
(Druk 1929, no. 405)



Surat tentang perluasan gedung Kantor Pos Besar di Bandung,
lampiran denah,
9 Oktober 1931.

ANRI : Pos Telegraaf dan Telefoon No. 45



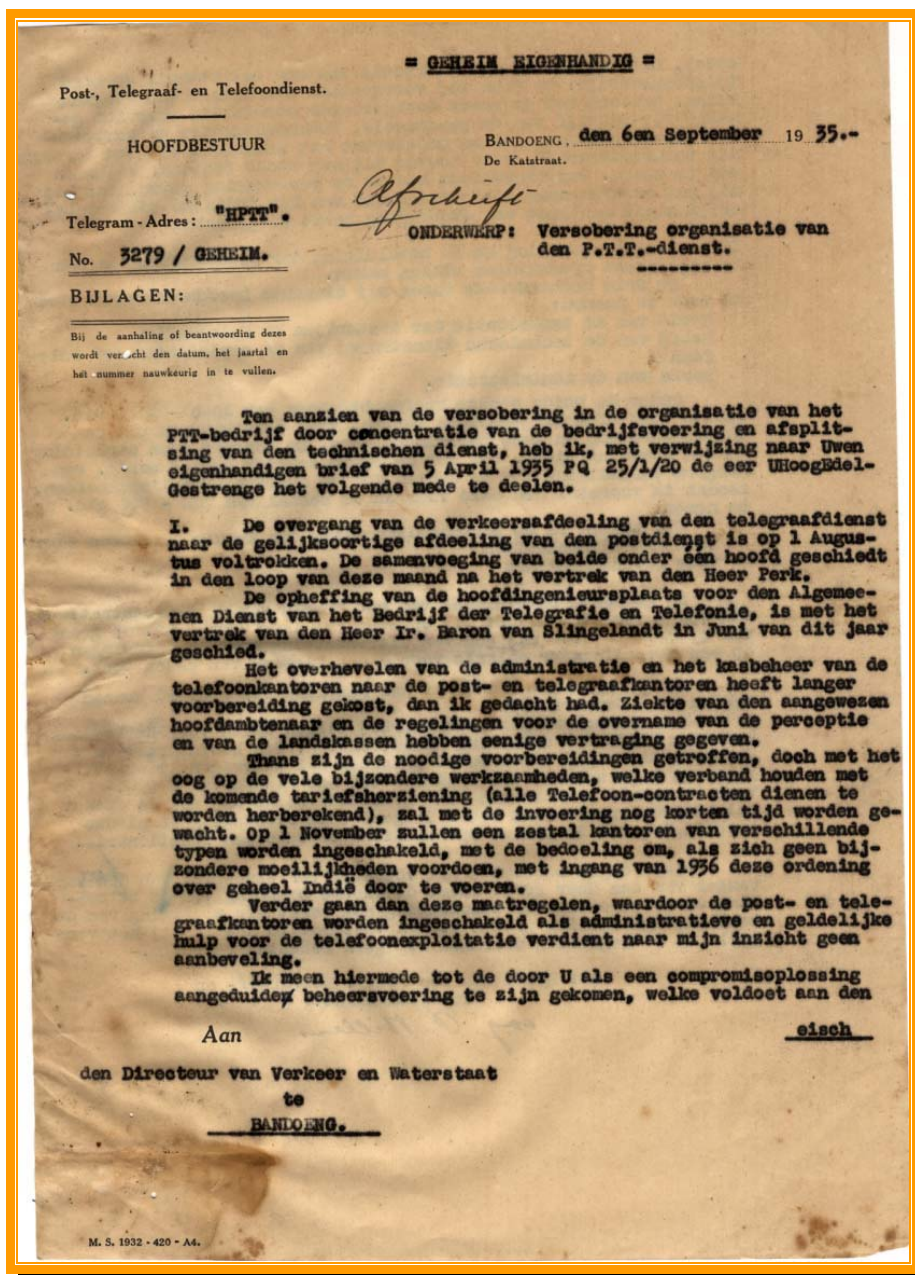
Kantor Pos Besar di Bandung,
27 Juli 1953.

ANRI : Djapenpro Djabar 530418 FP 7



Kantor Pos dan Telepon di Bandung,
27 Juli 1953.

ANRI : Djapenpro Djabar 530708 FP 2



Penyederhanaan Organisasi Post, Telegraaf dan Telefoon (PTT), 6 September 1935.

ANRI : Pos Telegraaf dan Telefoon No. 30



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 1984

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) POS DAN GIRO

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Perseroan (PERSERO), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983, maka pengaturan Perusahaan Umum (PERUM) Pos dan Giro yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1978 perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk mengatur kembali Perusahaan Umum (PERUM) Pos dan Giro tersebut;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);

4. Undang-undang.....

Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1984 tentang pendirian
Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro,
4 September 1984.

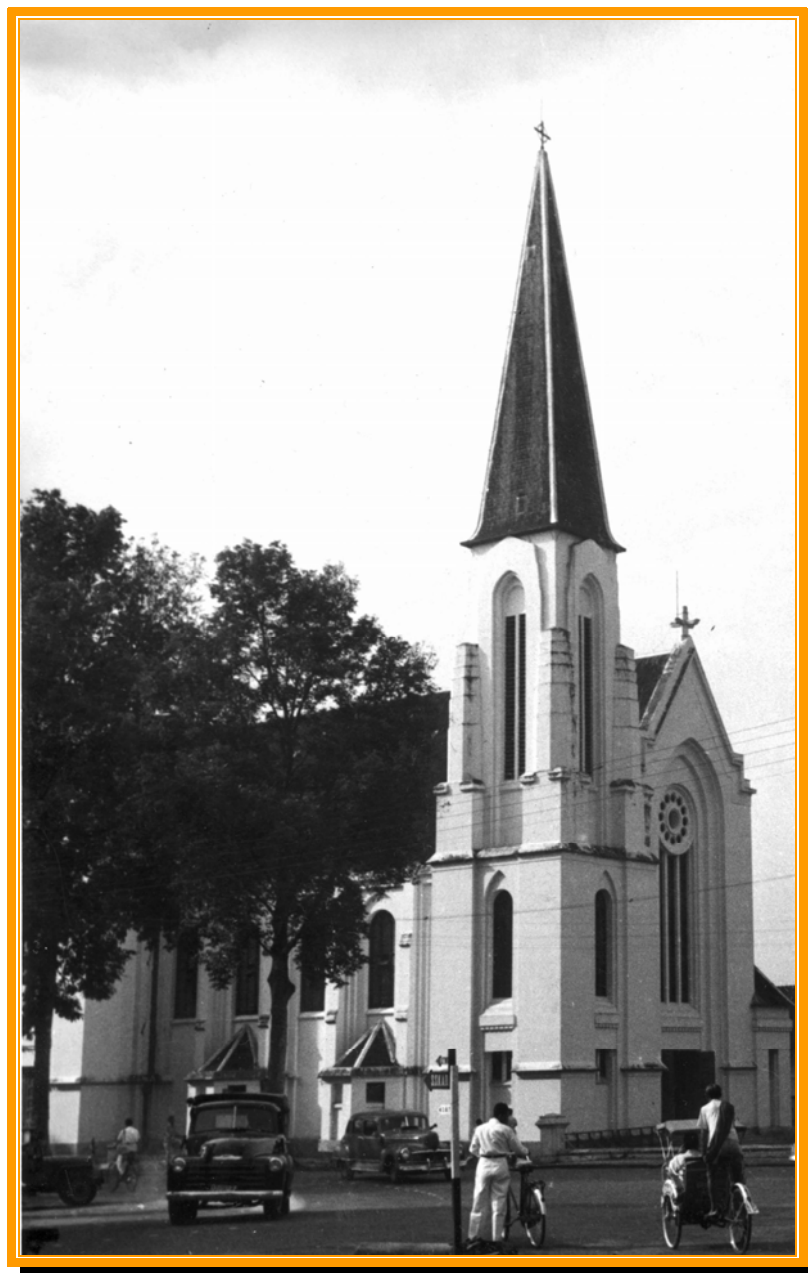
ANRI : PT. Pos dan Giro No. 11

Agama



Gereja di Depok,
14 Juni 1949.

ANRI : RVD 90614 FJ 5



Gereja Katolik Roma, Bandung,
27 Juli 1953.

ANRI : Djapenpro Djabar 530418 FP 8



Gereja Protestan, Bandung,
27 Juli 1953.

ANRI : Djapnepro Djabar 530418 FP 9



Masjid Agung di Sukabumi,
31 Agustus 1952.
ANRI : Kempen 520831 FK 4-4



Masjid Kanoman Cirebon,
15 November 1953.
ANRI : Kempen 531115 FY 19



Masjid Agung Bandung,
22 Juli 1957.
ANRI : Kempen 570722 FP 2-1



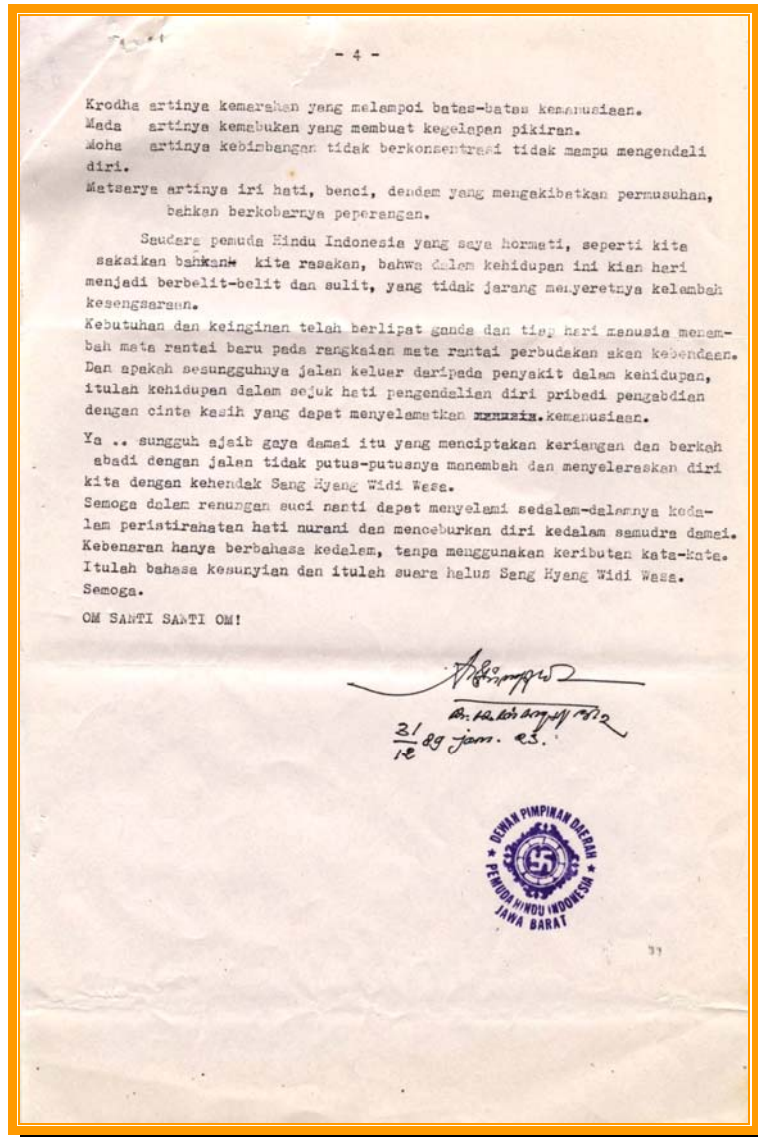
Presiden Soekarno sedang melaksanakan Sholat Idul Adha di alun-alun Sukabumi, 31 Agustus 1952.

ANRI : Kempen 520831 FK 25



Perayaan hari Whu Chang oleh bangsa Tionghoa golongan Kuo Min Tang di Bandung, 10 Oktober 1953.

ANRI : Djapenpro Djabar 531010 FP 1



Renungan tahun baru 1990 di Paseban Tri Panca Tunggal Cigugur Kabupaten Kuningan Jawa Barat yang dilakukan oleh 80 orang anggota pemuda Hindu Indonesia Provinsi Jawa Barat ,
17 Januari 1990.

ANRI : Depag No.134

Kebudayaan dan Olahraga



Pertunjukan Tari Kelana Sunda, Bandung,
31 April 1950.

ANRI : Kempen 500431 FP 1-1



Orkes Angklung yang diselenggarakan oleh Badan Kesenian
Indonesia, Bandung,
1 Februari 1951.

ANRI : Kempen 51839



Batu Tulis di Jawa Barat ,
3 Januari 1952.
ANRI : Kempen 520103 FG 1-9



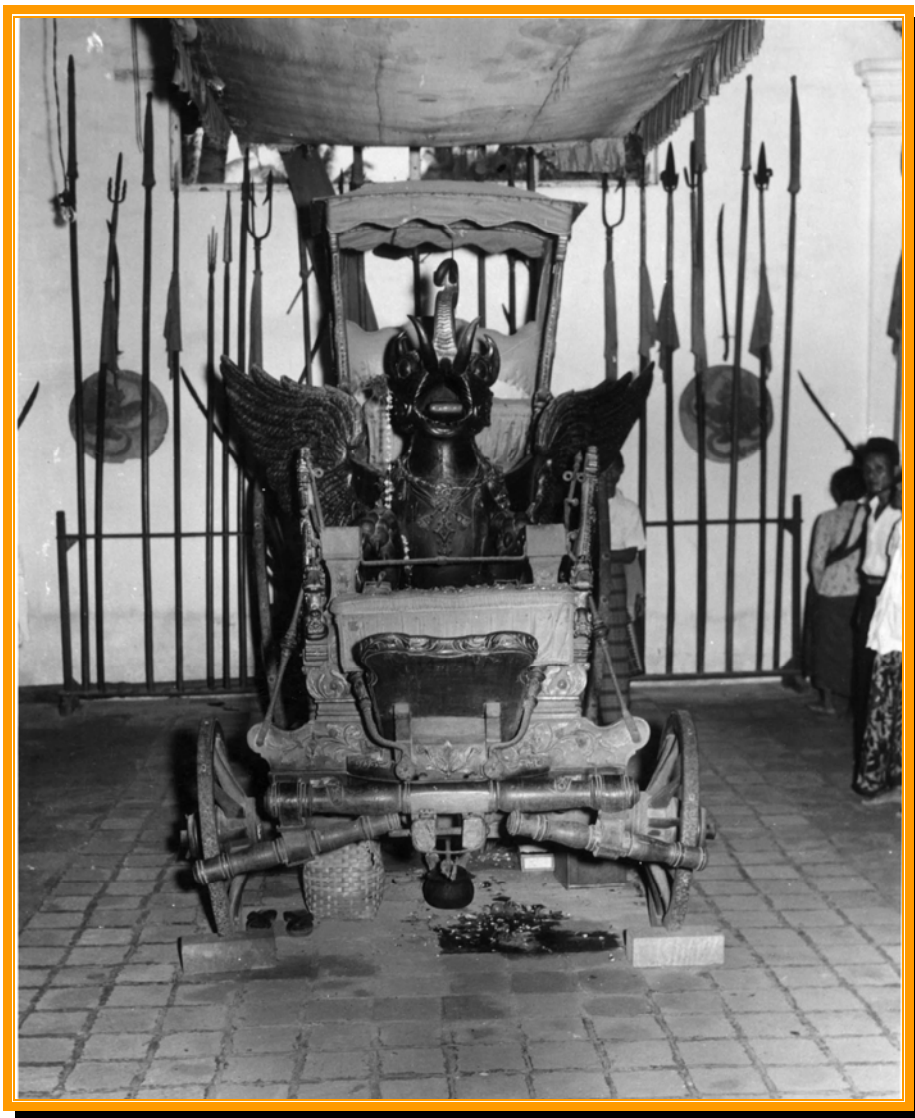
Rombongan "Panjang Jimat" dari Kraton Kanoman menuju
Masjid Agung, Cirebon,
19 Oktober 1953.

ANRI : Kempen 531119 FY 19



Gua Sunyaragi bekas peristirahatan Putri Tiongkok istri Sultan Cirebon di abad ke-16 (1570), Cirebon,
20 November 1953.

ANRI : Kempen 531120 FY 64



Kereta Kencana peninggalan Sultan Cirebon Pertama dalam Gedung Jimat di Kraton Kasepuhan, Cirebon, 20 November 1953.

ANRI : Kempen 531120 FY 34



Seperangkat Gamelan Sunda untuk mengiringi
pertunjukan tari di Gubernuran, Bandung,
9 Mei 1955.

ANRI : Kempen 550509 FP 1-1



Wayang Golek merupakan salah satu ciri khas
kesenian Jawa Barat ,
20 Mei 1955.

ANRI : Kempen 550420 FP 2-2

BELUM DIKOREKSI

PIDATO PJM PRESIDEN SUKARNO PADA UPATJARA
PEMBUKAAN PON V DI BANDUNG, 30 SEPTEMBER 1961.

Saudara-Saudara sekalian dan anak-anakku sekalian,

Saja diminta untuk membuka setjara resmi Pekan Olahraga Nasional jang ke-V. Insja Allah akan saja kerdjakan hal itu. Dan memang Pekan-Pekan Olahraga Nasional adalah sumbangan-sumbangan jang penting bagi usaha kita untuk membangun negara, membangun bangsa, membangun masjarakat.

Saudara-Saudara dan anak-anak sekalian masih ingat benar akan perkataan saja jang saja ulangi berulang-ulang, bahwa pokok tudjuan daripada revolusi kita jang kita tjetuskan pada tanggal 17 Agustus 1945, bahkan jang kita persiap-siapkan berpuluh-puluh tahun sebelum itu dengan apa jang dinamakan Gerakan Nasional, pokok tudjuan daripada segala perdjongan dan usaha kita itu ialah untuk — dalam bahasa asing — "Nation Building", membangun bangsa, bangsa Indonesia, bangsa Indonesia jang hidup didalam satu negaranja sendiri jang berdaulat penuh dari Sabang sampai ke Merauke. Bangsa Indonesia jang duduk, hidup didalam satu masjarakat jang adil dan makmur. Bangsa Indonesia jang menduduki tempat terhormat dan bersahabat antara semua bangsa-bangsa didunia ini. Maka tudjuan ini tidak boleh sekedjap matapun terlepas dari pandangan kita.

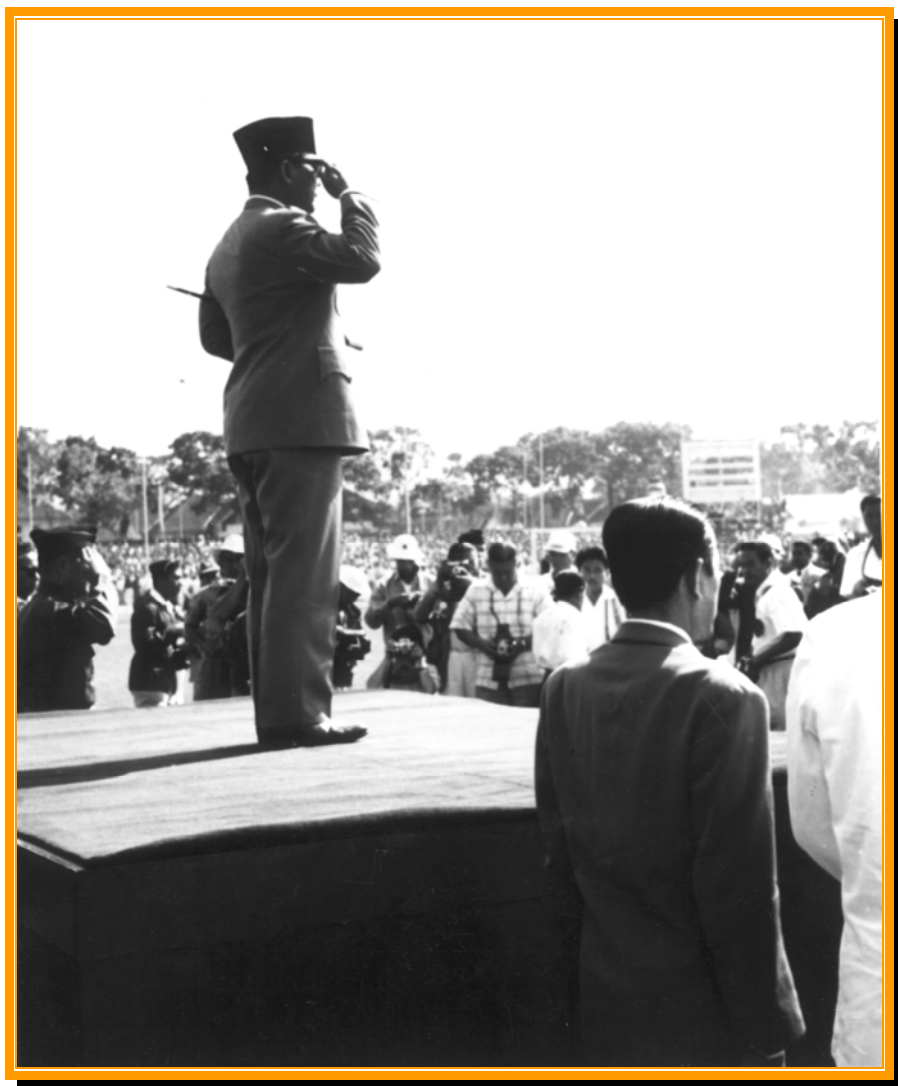
Berulang-ulang saja katakan — (...Polisi Militer, saja minta jang diluar disuruh diam....ditudjukan kepada para petugas - red)... Saja ulangi, tudjuan itu tidak boleh sekedjap matapun terlepas dari pandangan mata kita, malahan ingatlah, hai saudara-saudara sekalian, anak-anakku sekalian, bahwa revolusi kita belum selesai, sehingga tudjuan pokok daripada revolusi kita ini, "Nation Building" dalam arti politik, dalam arti sosial-ekonomis, dalam arti persahabatan duniapun belum selesai.

Usaha kita itu kita djalankan terus dan salah satu sjarat untuk mendjalankan terus revolusi jang hebat ini, revolusi jang saja namakan revolusi multi-complex, revolusi jang saja namakan Pantjamuka, sjarat mutlak daripada itu ialah persatuan bangsa. Maka oleh karena itu saja amat bergembira, bahkan terharu sekali, djikalau saja melihat anak-anak sekalian, saudara-saudara sekalian, berdiri dengan tegap, berbaris dengan tegap dihadapan saja.

Anak-anak, putra-putra, putri-putri Indonesia dari pelbagai daerah menunjukkan satu persatuan bangsa, malahan amat bergembiralah saja pada waktu sekarang ini, oleh karena peserta-peserta dari daerah pada

Pidato Presiden Soekarno pada upacara pembukaan
PON ke V di Bandung,
30 September 1961.

ANRI : Pidato Presiden No. 337



Presiden Soekarno dalam upacara pembukaan
PON V di Stadion Siliwangi, Bandung,
30 September 1961.

ANRI : Kempen 610930 FP 3-3



Kontingen Jawa Barat (paling kanan) pada upacara pembukaan
PON V di Bandung,
30 September 1961.

ANRI : Kempen K 610930 FP 7-25



Regu Basket Putri Kontingen Jawa Barat berfoto
sebelum bertanding pada PON V,
01 Oktober 1961.

ANRI : Kempen 611001 FP 6-2

**SUATU PENEMUAN.
URAIAN DAN PENGLAMHAN
TERHADAP BERSIKAPNYA
DUA MACAM BAHAN BUKTI,
YAKNI PERING CUPANG
DAN KERTAS GARIS PA-
RAHYANGAN, DINJAU
DENGAN METODE MASAAT
(EPIGRAFI, ASTROLOGI
DAN MATEMATIKA).-**

PENGANTAR.

Yang disebut Piring Cupang ialah piring-antik yang berasal dari Desa Cupang, Kecamatan Ciaringin, Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat.

Tiga buah piring, sejak Januari 1975 telah saya miliki. Itu saya dapati sebagai hadiah kenang-kenangan dari rakyat Cupang, setelah saya melakukan penelitian bahan pertambangan, terutama batu-andesit horenbende yang merupakan depositnya Gunung Jaya. Saya mendapat sebuah piring lagi atau mungkin dua buah lagi, masih berada di tangan rakyat Cupang.

Terhadap ketiga buah piring yang telah saya miliki itu, dengan alasan-alasan yang akan disebutkan kemudian, telah saya berikan nama masing-masing sebagai berikut:

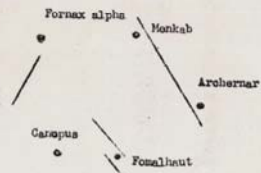
1. PERING CUPANG UTAMA,
2. PERING CUPANG SANDANG, dan
3. PERING MARBUHAN.

Mengenai Piring Cupang Sandang telah saya laporkan sebagai lampiran kepada Direktorat Museum dan Direktorat Sejarah dan Purbakala dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan tertanggal 5 Maret 1975.

Dalam uraian sekarang ini akan ditelaah piring yang pertama.

I. PERING CUPANG UTAMA.

Piring ini menerangkan ukuran lonkan dan memadi —sekiranya disebut U t a s a — semua tempat Fendaman (Invisible Grafomumenten) yang banyaknya 5 (lima) buah ex V.C.C. dari abad 17 di Gunung Jaya, atau di dalam peta ditulis Gunung Djaga, Desa Cupang tersebut di atas.



(Ket.: GARS adalah garis bantu khayal matematika)

a. Gambar piring.
Ukuran piring sebenarnya bergaris-tengah 22 cm. Potret di kiri-atas, skala 1:3 adalah bagian sekelungnya. Gambar kanan kenamaan astronominya.

Pendaftaran benda antik berusia 50 tahun bernama "Piring Cupang Sandang" disertai gambar, 23 Desember 1976.

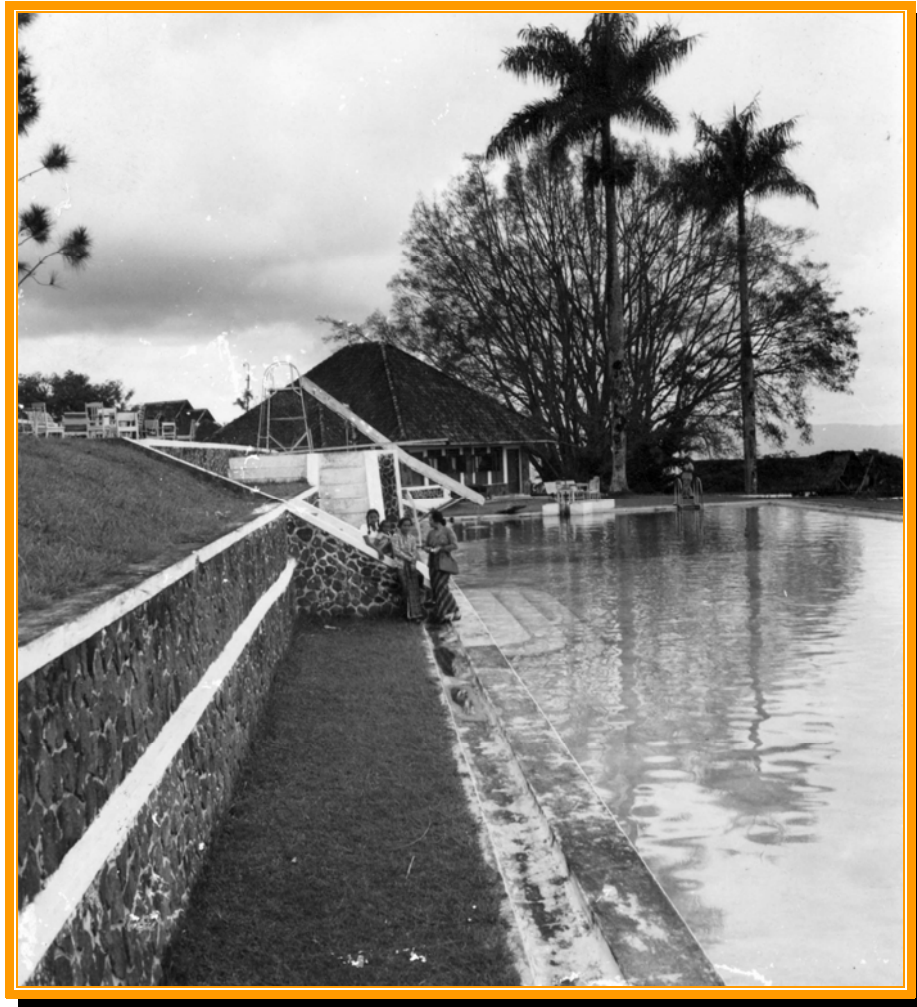
ANRI : Hamengkubuwono IX No. 775

Lingkungan Hidup



Pemandangan Kawah Kamojang di Garut,
14 Juli 1949.

ANRI : RVD 90714 FR 1



Pemandian Salabintana, Sukabumi,
21 Juni 1950.

ANRI : Kempen 500621 FK 1



Gunung Tangkuban Perahu, tampak Kawah Ratu dengan lahar panas, Lembang, Oktober 1950.

ANRI : Kempen 501711



Pemandangan dalam Kebun Raya Bogor,
27 Mei 1951.

ANRI : Kempen 7-25-3



Pemandangan air terjun di Maribaya, Bandung,
7 November 1958.

ANRI : Kempen 581107 FP 1

41
 Model T'.
GOVERNEMENTS POST- EN TELEGRAAFDIENST.
 KANTOOR te **BUTENZORG**
 TELEGRAM No. **493** bevattende **77** woorden.
 Aangeboden to den **189** ten **12** u. m. v. middags.
 Ontvangen den **30** ten **189** u. m. v. middags.
 (Bovenstaande tijdsopgaven zijn gerekend naar den middelbaren tijd van het hoofdkantoor in elken staat.)

DINSTAANWIJZINGEN

Woor-
 dental.

Menot nr. 4825.
 6 Spasmeur General Butenzorg
 verbodig mededeeling dat volgens
 bericht assistent Resident Butenzorg
 gisteren doord ongekende hoop
 bandje Tulluwang aldaar sinds
 1872 nooit zoo geweest peilschaal
 hedaeng hadak was 2-7/8 meter
 verschillende dammen beschadigd
 vijftien huizen weggespoeld nog
 geen bericht van menschen.
 Heng

Laporan Asisten Residen Bogor tentang banjir
 Kali Ciliwung yang menghancurkan bendungan dan rumah-
 rumah, 1895.

ANRI : *Algemeene Secretarie* AG No.12619



Sebuah tanggul Kali Cimanuk di Desa Panjindangan Wetan,
Kecamatan Sindang, Indramayu yang hancur diterjang air bah,
14 Desember 1957.

ANRI : Djapenpro Djabar 5712 14 FT 4-1 Da/ Kab



Rumah-rumah penduduk di Desa Panjindangan Wetan,
Kecamatan Sindang, Indramayu yang runtuh akibat
banjir Kali Cimanuk,
14 Desember 1957.

ANRI : Djapenpro Djabar 571214 FT 3-1 /Da/Kab

BEUM DIKOREKSI

nst.1827/60-



PIDATO PJM PRESIDEN SUKARNO PADA RAPAT UMUM PEMBERIAN HADIAH DENGAN KEMENANGAN KOTA GARUT SEBAGAI JUARA PERTAMA DALAM PERLOMBAAN KEBERSIHAN KOTA; GARUT, 16 DESEMBER 1960.

Saudara-Saudara,

Hana karakjat Garut, seberaha tahun Bapak enteu kadijeu? Lima tahun?...

Saudara-Saudara, lebih dahulu, oleh karena saja mengetahui bahwa rakjat Garut buat sebagian besar adalah beragama Islam dan saja sendiripun beragama Islam, saja menjampaikan kepada saudara-saudara sekalian salam Islam: Assalamu'alaikum warochmatullahi wabarakatuh..... Kurang keras! Assalamu'alaikum warochmatillahi wabarakatuh!

Kemudian mari kita bersama-sama sebagai biasa memekikkan pekik merdeka kita dengan suara jang gegap gempita: Merdeka!!

Saudara-Saudara, sesudah sekian tahun Bapak tidak datang di Garut, sekarang datang di Garut lagi, bahkan membawa rombongan. Antara lain, sobagai tadi dikatakan oleh Bapak Subandrio, Menteri Luar Negeri Subandrio Bapak bawa kesini. Dan Bapak membawa pula Duta-Duta Besar dari Luar Negeri. Apakah saudara-saudara pernah melihat Duta Besar? Duta Besar itu djuga manusia saudara-saudara. Boga tjeuli', boga hidung, boga panon, malahan Duta Besar djuga makan, minum, tidur.

Saja membawa Duta BesarYugoslavia, saja minta madju kemuka. Ini dari negara Yugoslavia jang dipresideni oleh Presiden Tito (Merdeka!... sahut Duta Besar Yugoslavia -- red).... ..Kemudian Duta Besar dari Amerika Serikat. Kelihatannja kan djuga seperti kita, manis muka, banjak kotawa, dan suka, suka djuga menari lenso.... Nah, Duta Besar dari Pakistan. Dia tentu mengutjapkan Assalamu'alaikum (Assalamu'alaikum! Merdeka!... kata Duta Besar Pakistan -- red)Duta Besar dari Djerman Barat. Ini dia, sebagai saudara-saudara lihat, kelihatannja serem, tetapi hati baik. Thank you....Duta Besar Djepang. Ha, ini Duta Besar Djepang, djuga manis hati, datang dari kota Tokyo jang selalu dikundjungi oleh Pak Subandrio. (Konichiwa ...kata Duta Besar Djepang -- red) ...Konichi wa artinja selamat siang. Konichiwa, Merdeka...Kata Duta Besar Djepang -- red) ...Arigato gozaimasu.... Duta Besar dari negara Arab Persatuan, dari Mesir... Nah, ini dia. Ini utusan dari Presiden Nasser. (Assalamu'alaikum! Merdeka! ... kata Duta Besar Republik Arab Persatuan -- red)... Nah, eskarang Duta Besar dari Soviet Uni. Ini dia. Orang kira orang dari Rusia,

orang dari

Pidato Presiden Soekarno pada Rapat Umum Pemberian Hadiah atas kemenangan kota Garut sebagai juara I dalam lomba kebersihan kota, 16 Desember 1960.

ANRI : Pidato Presiden No. 251



Bencana alam tanah longsor akibat hujan
yang terus menerus di Sukabumi,
19 Januari 1965.

ANRI : Kempen 65-264

Daftar Arsip

Citra Jawa Barat dalam Arsip

DAFTAR ARSIP CITRA DAERAH PROPINSI JAWA BARAT.

BAB I GEOGRAFIS

1. Peta bagian Priangan antara lain : Soekapoera, Galunggung, Limbangan, 16 Januari 1942.
ANRI: F. de Haan No E.43.
2. Peta bagian barat Priangan dibawah aliran sungai Citandui, tahun 1830
ANRI: F. de Haan No. E.34
3. Sketsa Cipanas Distrik Ciputri Kabupaten Cianjur Karesidenan Priangan, tanpa tahun.
ANRI: F. de Haan No. A. 119
4. Peta Rencana Kota Bandung, tanpa tahun.
ANRI: F de Haan No A. 71
5. Peta Daerah Cirebon, tanpa tahun
ANRI: F de Haan No K. 13
6. Sketsa Wilayah Puncak, tanpa tahun.
ANRI: F de Haan No E.35
7. Peta Kota Bandung, Februari 1946
ANRI: Topografi No 1282

BAB II PEMERINTAHAN

8. Akta perjanjian nomor 6 tahun 1699 tentang mufakat raja-raja Cirebon antara lain : Sultan Anom, Panembahan Cirebon, Pangeran Dipatty Cirebon dan Pangeran Arya Adiwijaya untuk pembagian kekuasaan pemerintahan atas Negeri Cirebon, 4 Agustus 1669.
ANRI: Cirebon No. 38/5

9. Daftar Silsilah Raja-raja Cirebon, 15 oktober 1765.
2 lembar
ANRI: Cirebon No. 37/5
10. Acte Perjanjian antara Pemerintah Belanda dengan Sultan Kasepuhan dan Sultan Anom dari Cirebon tentang pengakuan kekuasaan Belanda atas Negeri Cirebon, 1 September 1806.
ANRI: Cirebon No.38/8
11. Daftar silsilah keturunan Bupati sampai Mantri Polisi di Karesidenan Karawang dan Priangan (Cianjur), 23 Mei 1854. 6 lembar
ANRI: Karawang No. 99
12. Notulen rapat daerah Cirebon tentang anggaran tahun 1914, 26 September 1914. 22 lembar
ANRI: Binnenlandsch Bestuur No. 354
13. Program kerja Propinsi Jawa Barat di bidang pendidikan, pertanian, peternakan, kesehatan, 16 Juli – 8 Oktober 1926. 7 lembar
ANRI: Binnenlandsch Bestuur No. 923
14. Laporan mengenai akibat adanya pembentukan Pemerintahan di Jawa Barat, 24 Januari 1928. 4 lembar
ANRI: Binnenlandsch Bestuur No. 1384
15. Peristiwa penyerahan Belanda pada Jepang tanpa syarat di Kali Jati, Subang, 8 Maret 1942.
[www. gimonca.com](http://www.gimonca.com)
16. Gedung tempat perundingan Perjanjian Linggarjati antara Indonesia dengan Belanda di Kuningan, Cirebon, Jawa Barat, 11 November 1946.
ANRI: IPHOS, 1946

17. Penandatanganan Perjanjian Linggarjati oleh Perdana Menteri Sutan Syahrir, 25 Maret 1947.
ANRI: IPHOS, 1947
18. Perjanjian Linggarjati, 25 Maret 1947
ANRI: Koleksi Khusus
19. Laporan singkat rapat pembentukan PPN (Pembelaan Pertahanan Nasional) Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka dan anggaran dasarnya, 30 Desember 1947. 3 lembar
ANRI: Kempen No. 171
20. Permohonan pembentukan Daerah Istimewa Karesidenan Cirebon, 16 Februari 1948. 4 lembar
ANRI: Algemene Secretarie No.1215
21. Surat-surat tentang desakan pembentukan Karesidenan Purwakarta, 15 Januari – 13 April 1949. 2 lembar
ANRI: Algemene Secretarie No .1216
22. Keppres RI nomor 112 Tahun 1951, tentang pengangkatan T. Mohamad Sanusi Hardjadinata, Residen Priangan menjadi Gubernur KAD Propinsi Jawa Barat, terhitung mulai tanggal 1 Juli 1951. 2 lembar
ANRI: Sekkab Keppres No. 331
23. Perjalanan Presiden Soekarno ke Tasikmalaya, terlihat sambutan rakyat sangat meriah sepanjang jalan raya ketika Presiden dan rombongan tiba, di Tasikmalaya, 10 Juli 1951.
ANRI: Kempen 514438
24. Foto-foto Gubernur Jawa Barat.
Basipda Jabar

25. R.M. Sanusi Hardjadinata sedang diambil sumpahnya sebagai Gubernur Jawa Barat, Bandung, 13 Juli 1951.
ANRI: Kempen 514474
26. Keppres RI nomor 39 tahun 1952 tentang Pengesahan Pedoman untuk Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Jawa Barat' sebagaimana ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Jawa Barat tanggal 22 Agustus 1951, 13 Desember 1952. 1 lembar
ANRI: Sekkab Keppres No. 511
27. Sokongan dari Serikat Buruh PU Jawa Barat terhadap pernyataan SOBSI Jawa Barat tentang pengoperan Jawatan Pekerjaan Umum oleh Daerah Otonom Propinsi Jawa Barat, 8 Maret 1954.
ANRI: Kabinet Presiden No 869
28. Keppres RI No 216 tahun 1954 tentang Penggunaan Lambang Kota Sukabumi, 30 Oktober 1954. 1 lembar
ANRI: Sekkab Keppres No.1107
29. Keppres RI Nomor 134 Tahun 1958 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Swatantra TK II Cianjur tanggal 23 Juli 1957 yang berisi Peraturan Pungutan Pajak, 2 Juli 1958. 1 lembar
ANRI: Sekkab Keppres No.1703

BAB III. POLITIK DAN KEAMANAN

30. Pembakaran Kota Bandung yang dikenal sebagai Peristiwa Bandung Lautan Api , 24 Maret 1946
ANRI: IPHOS, 1946.
31. Berita Peristiwa Bandung Lautan Api tanggal 24 Maret 1946 di Bandung Selatan, 25- 27 Maret 1946. 6 lembar
ANRI: Berita Antara Bulan Maret 1946

32. Mohammad Toha tokoh yang juga dikenal sebagai Pahlawan Bandung Selatan, 24 Maret 1946.
Basipda Jabar: Deppen No. 45.7
33. Laporan keadaan keamanan di daerah Dayeuh Kolot Bandung Selatan, 21 Mei 1947. 1 lembar
ANRI: Kempen No 388
34. Laporan keadaan Daerah Subang Jawa Barat akibat Agresi Militer I, Juli 1947.
ANRI: Kepolisian Negara No.526
35. Peristiwa Agresi Militer Belanda ke II di Jawa Barat, 12 Juli 1947.
ANRI: IPHOS , 1947
36. Suasana Kota Bandung pasca Agresi Militer I, 1947.
ANRI: Siliwangi
37. Laporan tentang pertahanan yang dilakukan oleh Tentara Siliwangi terhadap Sub Teritorial Komando di Yogya, 13 Desember 1948.
ANRI: Kepolisian Negara No.686
38. Pasukan TNI Siliwangi, Brigade Surya Kencana, Batalyon Sujono di Sukanegara menjelang hijrah ke Jogja, 1948.
ANRI: Siliwangi
39. Anggota TNI dari Divisi Siliwangi berkumpul di Cicalengka Bandung untuk hijrah ke Jogja, 1948.
ANRI: Siliwangi
40. Panglima Siliwangi, Kolonel Sadikin memasuki Kota Bandung menjelang Pengakuan Kedaulatan RI oleh Belanda, 1949.
ANRI: Siliwangi

41. Surat rakyat Cibarusah kepada Presiden Soekarno tentang permohonan untuk dikirim TNI Siliwangi untuk menjaga keamanan daerah tersebut, 18 Juni 1950. 1 lembar
ANRI: Kabinet Presiden RIS No. 123
42. Memorandum mengenai acara Konferensi Bogor, 8 Desember 1954.
ANRI: LN. Palar No 287
43. Perdana Menteri India Shri Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri Birma U.Nu bertemu dengan Presiden Soekarno dalam rangka Konferensi Panca Negara di Istana B0gor, 27 Desember 1954.
ANRI: Kempen 541227 FG 1-2
44. Laporan singkat pada session I Konferensi 5 Perdana Menteri di Bogor, 28 Desember 1954.
ANRI: LN. Palar No 289
45. Ulasan berita mengenai Konferensi Pancanegara di Bogor, 29 Desember 1954. 2 lembar
ANRI: Berita Antara Bulan Desember 1954
46. Naskah Kerja Delegasi RI pada Konferensi Asia Afrika di Bandung, 18 -23 April 1955. 23 lembar
ANRI: M.Yamin No.177
47. Perdana Menteri RI Mr Ali Sastroamidjoyo menyambut kedatangan Sir John Kotelawala dari Srilangka di Bandung 18 April 1955.
ANRI: Kempen 550418 FP 1
48. Dasa Sila Bandung merupakan hasil rumusan Konferensi Asia Afrika. April 1955
ANRI: Djamal Marzuki 120

49. Pemandangan pada Sidang Pleno Konferensi Asia Afrika tanggal 18 – 24 April 1955, Bandung 20 April 1955
ANRI: **Kempen 550420 FP 38**
50. Gedung Dwi Warna tempat Sidang Ekonomi, Politik, Kebudayaan pada Konferensi Asia Afrika di Bandung, 20 April 1955.
ANRI: **Kempen 550420 FP 73**
51. Hotel Savoy Homan dan Hotel Preanger di Jalan Asia Afrika Bandung, tempat menginap para delegasi peserta KAA, 20 April 1955.
ANRI: **Kempen, 550420 FP 4-56, 4-52.**
52. Pemandangan Sidang Pleno pada Konferensi mahasiswa Asia Afrika, Bandung 3 Juni 1956.
ANRI: **Kempen 560603 FP 1-7**
53. Gubernur Jawa Barat Ipik Gandamana sedang memasukkan suaranya pada pemungutan suara untuk DPRD Jawa Barat, Bandung, 10 Agustus 1957.
ANRI: **Djapenpro Djabar 570810 FP 1**
54. Presiden Soekarno menerima Emblem Batalyon Infantri 330 TT III Siliwangi, Bandung 21 Mei 1958.
ANRI: **Kempen 580521 FP 20**
55. Raja Keprabonan sedang memberikan suara pada pemungutan suara ke II kembali ke UUD 1945 oleh Dewan Konstituante di Bandung, 1 Juni 1959.
ANRI: **Kempen 590601 FP 22A – 59**
56. Pidato Presiden Soekarno pada pembukaan Konferensi Dewan Solidaritas Asia Afrika di Bandung, 10 April 1961. 4 lembar
ANRI: **Pidato Presiden No.294**

57. Amanat Presiden Soekarno pada upacara pemberian " Sam Karya Anugerah Kepresidenan" kepada Kodam Siliwangi Bandung, 28 Agustus 1965.
ANRI: Pidato Presiden No. 787.

BAB IV. PEREKONOMIAN DAN PERINDUSTRIAN

58. Pembangunan gedung Javasche Bank di Bandung, 21 Mei 1915
ANRI: Algemene Secretarie Mgs. No.12
59. Gedung Javasche Bank di Bandung, 1920
ANRI: KIT No.85
60. Pekerja wanita sedang memintal benang pada perusahaan "Yo Sek In" di Bandung, Maret 1946.
ANRI: RVD A. 27778
61. Bagian pemintalan dengan mesin kelos bersilang di pabrik tenun di Bandung, 23 Mei 1952
ANRI: Kempen 520523 FP 13
62. Para pekerja sedang membuat hiasan payung di Tasikmalaya, 28 Juni 1948.
ANRI: RVD 80628 FU 4
63. Seorang pekerja wanita sedang membuat keramik pada perusahaan keramik di Plered, 12 februari 1953.
ANRI: Kempen 530212 FN 1-5
64. Pemandangan di depan pasar Depok, 11 Juni 1949
ANRI: RVD 90611 FJ 3
65. Pembangunan Pasar Pengalengan hasil gotong royong rakyat desa Pengalengan , Bandung, 25 agustus 1958.
ANRI: Kempen 580925 FP 3-96 Da/Kab.

66. Pembuatan tikar mendong dengan alat-alat penganyam yang dikerjakan dengan tangan pada Perusahaan rumput mendong di Tasikmalaya, 22 Mei 1952.
ANRI: **Kempen 520522 FU 6**
67. Perusahaan sepatu di Bogor, 14 Juni 1951.
ANRI: **Kempen 514077**
68. Para pekerja perempuan sedang membatik tulis di Koperasi " Mitra Batik " di Tasikmalaya, 14 Maret 1956
ANRI: **Kempen 560314 FU 53**
69. Para pekerja perempuan sedang membuat sikat dari ijuk hasil produksi Industri " Sikat Indonesia " di desa Cisaat, Sukabumi 1955/ 1956.
ANRI: **Kempen IX-10**
70. Pemandangan dalam pabrik ban "Good Year " di Bogor, 10 April 1953.
ANRI: **Kempen 530410 FJ 13**
71. Kunjungan Wakil Presiden M. Hatta didampingi Ketua Koperasi Pegawai Negeri, Hasan Wirawatna memasuki gedung KPN, Bandung, 7 September 1956.
ANRI: **Djapenpro Djabar 560907 FP 9**
72. Keppres RI Nomor 174 tahun 1956 tentang pengiriman suatu delegasi Indonesia untuk menghadiri Konfrensi FAO Regional untuk negara-negara Asia dan Timur Jauh, 15 oktober 1956.
ANRI: **Sekkab Keppres No. 1336**
73. Wakil Presiden M. Hatta dengan lambang "Bhineka Tunggal Ika" yang dibuat dari rotan yang diberikan sebagai tanda mata kepada beliau oleh Koperasi perusahaan rotan di Tegalwangi, Cirebon, 25 Juli 1956.
ANRI: **Kempen 560725 FY 5-7**

74. Wakil Presiden M. Hatta sedang melihat alat rumah tangga seperti dandang, teko dll yang terbuat dari tembaga sebagai hasil dari Koperasi rakyat Panyingkiran, Majalengka, 25 Juli 1956.
ANRI: Kempen 560725 FV 1-5
75. Pemandangan di pabrik tekstil Majalaya bandung, 18 September 1963.
ANRI: Kempen 63-12074.
76. Surat Keputusan Dirjen Perindustrian Kimia tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Penyehatan Managerial PN. Kertas Padalarang, 29 Agustus 1974. 2 lembar
ANRI: Perindustrian No.413
77. Keputusan Kepala Pusat Perindustrian tentang penempatan Pejabat-pejabat dalam lingkungan Lembaga Industri penerbangan Nurtanio (LIPNUR) di pangkalan Angkatan Udara Utama Husein Sastranegara, Bandung, 28 Desember 1971. 2 lembar
ANRI: IPTN No. 1
78. Prof. DR. Ing. B.J Habibie President Direktur PT Pesawat Terbang Nurtanio, pada peresmian, tanggal 23 Agustus 1976.
ANRI: IPTN 1976.
79. Flow Charts pembuatan Pesawat CN-235, 13 juni 1988. 8 Lembar
ANRI: IPTN No. 51

BAB V. PERTANIAN DAN PERTERNAKAN

80. Kalkulasi hasil perkebunan kopi di Karesidenan Priangan, 18 Januari 1861. 2 lembar
ANRI: Preanger No 29/25

81. Laporan kerusakan 450 pohon kopi akibat serangan kumbang tanah di daerah Bandung, 16 Maret 1891
ANRI: [Algemene Secretarie AG 5323/91](#)
82. Besluit tanggal 17 Oktober 1911 nomor 55 tentang penyuluhan penanaman teh di Karesidenan Priangan, 7 Oktober 1911. 8 Lembar
ANRI: [Algemene Secretarie Bt 7 Oktober 1911 No. 55.](#)
83. Nota Perjanjian antara organisasi pertanian dengan penduduk tentang penyerahan bagi hasil pertanian dan penelitian dibidang pertanian, 10 Maret 1923. 10 Lembar
ANRI: [Binnenlandsche Bestuur No. 376](#)
84. Pembebasan tanah untuk pertanian Agroponic di Karesidenan Priangan, 22 oktober 1940. 5 Lembar
ANRI: [Binnenlandsche Bestuur No. 2843.](#)
85. Seorang pekerja sedang menebang Pohon Kina, Bandung, 8 september 1949.
ANRI: [RVD 90908 FP 13](#)
86. Seorang pemetik teh di Perkebunan Gunung Mas, Puncak, 25 April 1951.
ANRI: [Kempen 512558](#)
87. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan pemerintah pusat dalam bidang perikanan darat kepada Propinsi Jawa Barat, 27 Juni 1951. 5 lembar
ANRI: [Sekkab Peraturan Pemerintah No.63](#)
88. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam bidang pertanian kepada Propinsi Jawa Barat, 27 Juni 1951. 6 lembar
ANRI: [Sekkab Peraturan Pemerintah No. 61](#)

89. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1951 tentang Pelaksanaan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam bidang kehewananan kepada Propinsi Jawa Barat, 27 Juni 1951. 5 lembar
ANRI: Sekkab Peraturan Pemerintah No.62
90. Bunga bangkai di Kebun Raya Bogor, 28 Juli 1952
ANRI: Kempen 520728 FJ 2
91. Perkebunan kol di Lembang, 27 Mei 1965.
ANRI: Kempen 65- 4981
92. Wakil Presiden M. Hatta didampingi Menteri Pertanian Moh. Sardjan meninjau Balai Penyelidikan karet di Bogor, 1 Agustus 1952.
ANRI: Kempen 520801 FE 8
93. Pemandangan petani sedang menanam padi di sawah, Depok, 26 November 1952.
ANRI: Kempen 521126 FJ 10

BAB VI. PENDIDIKAN

94. Pelajaran pertama di Kelas Sekolah Kartini di Bandung, tanpa tahun.
ANRI: KIT No.252/66
95. Sekolah Internasional "Taman Siswa" Mr. Soerjo Adipoetra khusus perempuan di Bandung, tanpa tahun.
ANRI: KIT No.352/16
96. Sekolah Swasta Pribumi di Bogor, tanpa tahun.
ANRI: KIT No.353/20

97. Besluit No.31 tentang perluasan bangunan Technische Hooge School dengan biaya 22.000 Gulden, 16 Februari 1921.
ANRI: Algemene Secretarie No. 31.
98. Besluit No.29 tentang Pengembangan Jurusan teknik Kimia di Technische Hooge School, 11 April 1921
ANRI: Algemene Secretarie Mgs. No. 2061.
99. Peraturan menetapkan Technische Hooge School untuk memberikan gelar insiyur kepada lulusannya, pengangkatan Ketua ITB oleh Gubernur Jenderal, pengangkatan dosen-dosen oleh Minister van Kolonie serta rincian penggajiannya, 11 April 1921
ANRI: Algemene Secretarie Mgs. No. 2061
100. Para siswa Sekolah Pertanian Atas Bogor sedang berpraktek tanaman pinus, Bogor 14 Mei 1949.
ANRI: Kempen 90514 FJ 9
101. Mahasiswa Perguruan Tinggi Tehnik sedang mengukur kejernihan langit, Bandung 18 Agustus 1949.
ANRI: RVD 90811 FP 1-10
102. Gedung Institut Pasteur Bandung, 21 Agustus 1949.
ANRI: RVD 90821 FP 3
103. Perguruan Tinggi Teknik Bandung (ITB) , 14 September 1949.
ANRI: RVD 90914 FP 7
104. Alat teropong bintang (Boscha), Lembang 9 Februari 1951.
ANRI: Kempen 3-10-6
105. Presiden Soekarno sedang mengunjungi Sekolah Kader di Cimahi, 10 Juli 1951.
ANRI: Kempen 514430

106. Siswa Polisi Wanita yang belajar di Sekolah Polisi Sukabumi, 1951.
ANRI: Kempen 511282
107. Presiden Soekarno sedang memeriksa barisan kehormatan ketika mengunjungi Sekolah Polisi di Sukabumi, 31 Agustus 1952.
ANRI: Kempen 520831 FK 1-1
108. Peletakan batu pertama pembangunan gedung Taman Siswa oleh Ki Hajar Dewantoro, Bandung, 27 Juli 1952.
ANRI: Kempen 520727 FP 1
109. Siswa Penerbang Akademi Penerbangan Indonesia sedang bersiap mengadakan demonstrasi penerbangan, Curug, 3 Mei 1955.
ANRI: Kempen 550503 FE 12
110. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjajaran (UNPAD) di Bandung, 18 September 1957. 3 lembar
ANRI: Sekkab Peraturan Pemerintah No. 335
111. Pemandangan kegiatan belajar di kelas pada Sekolah Rakyat di Sumedang, 5 November 1957.
ANRI: Djapenpro Djabar 571105 Fs- 9-75/ da
112. Gedung universitas Negeri padjajaran, Fakultas keguruan dan Ilmu pendidikan di Bandung, 6 November 1958.
ANRI: Kempen 581106 FP 1
113. Presiden Universitas Negeri Padjajaran menyerahkan surat pengesahan kepada Dewan Mahasiswa Sdr Abdul Djabar pada pelantikan Dewan Mahasiswa Universitas Negeri Padjajaran, Bandung 30 Desember 1957.
ANRI: Djapenpro Djabar 571230 FP 7- 231

114. Pidato Presiden Soekarno pada peresmian pembukaan ITB di Bandung, 2 maret 1959. 4 lembar
ANRI: Pidato Presiden No. 64
115. Amanat Presiden Soekarno pada peringatan Dies Natalis ke II Universitas Padjajaran, 10 Oktober 1959. 4 lembar
ANRI: Pidato Presiden No. 122
116. Pemberian Gelar DR. Honoris Causa dari Institut Teknologi Bandung kepada Presiden Soekarno, Bandung, 13 September 1962.
ANRI: Djapenpro Djabar 620913 FP 9-62.
117. Pidato Presiden Soekarno pada pemancangan tiang pertama gedung Herbarium di Bogor, 19 Agustus 1963. 5 lembar
ANRI: Pidato Presiden No.516
118. Sambutan Roeslan Abdulgani selaku wakil Ketua Badan Pembantu IKIP di Bandung tentang perlunya mahasiswa dalam persoalan revolusi, 17 Maret 1964. 2 lembar
ANRI: Roeslan Abdulgani No. 434

BAB VII. KESEHATAN.

119. Pembangunan gedung rehabilitasi epidemi di Daerah Sukabumi, epidemi tersebut sedang diteliti oleh Institut Pasteur, bandung, 28 Mei 1915.
ANRI: Algemeene Secretarie Besluit Mgs. No. 20, tanggal 28 Mei 1915
120. Sanatorium Cisarua, Jawa Barat, 4 Oktober 1947.
ANRI: RVD 71004 FJ 1

121. Presiden Soekarno sedang mengunjungi PMI dalam rangka Kongres PMI ke V di Bogor, 4 April 1951.
ANRI: [Kempen 511906](#)
122. Konferensi WHO di Bandung, 9 Oktober 1956
Basipda Jabar: [Deppen No.56.27](#)
123. Gedung Balai Pengobatan Penyakit Kusta di Desa Kedaung, Bekasi, 2 Maret 1957.
ANRI: [Kempen 570302 FL 9](#)
124. Izin pendirian Rumah Sakit Khusus Ginjal Ny. R.A. Habibie, November 1991-September 1995.
Basipda Jabar: [Kanwil Kesehatan provinsi Jawa Barat No.91-96.59.23](#)

BAB VIII. INFRASTRUKTUR

125. Denah Bangunan Algemene Secretarie, Bogor, tanpa tahun
ANRI: [F de Haan Nomor K 59](#)
126. Surat-surat tentang penunjukan daerah Kedung Halang (Bogor) untuk digunakan sebagai laboratorium percobaan dibidang pertanian dan peternakan, Kedokteran Hewan, lampiran Besluit, 29 Oktober 1938. 6 lembar
ANRI: [Bow Ax . No.76.](#)
127. Salinan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang perluasan kantor Dinas Pekerjaan Umum, Propinsi Jawa Barat lampiran denah, 21 Juli 1941. 2 lembar
ANRI: [Bow Ax. No. 115](#)
128. Jembatan di atas Kali Ciliwung, Puncak, 10 Juli 1949.
ANRI: [RVD 90710 FK 1-1](#)

129. Gedung Fakultas Teknik, Universitas Indonesia, Bandung, 8 Juli 1953.
ANRI: **Kempen 530708 FP 2**
130. Menteri Perhubungan Prof. Ir Rooseno, sedang mengadakan pembicaraan pertama melalui sentral telepon otomatis dengan Walikota Bandung R. Enoch, 10 Oktober 1953.
ANRI: **Djapenpro Djabar 531010 FP 9**
131. Jembatan Kereta Api sedang diperbaiki dengan tenaga ahli yang dapat diselesaikan dalam waktu 20 menit, Sindanglaut, 18 November 1953.
ANRI: **Kempen 531118 FY 1**
132. Gedung Sate, Kantor Kepala Daerah Gubernur Jawa Barat, Bandung, 22 April 1955.
ANRI: **Kempen 550422 FP 4-25**
133. Istana Bogor, tempat pemerintahan Gubernur Jenderal pada musim panas, tanpa tahun.
ANRI: **KIT No.96/2**
134. Istana Cipanas, tempat peristirahatan Gubernur Jenderal, tanpa tahun.
ANRI: **KIT No.863/23**
135. Jembatan gantung sepanjang 40 meter yang dibangun atas biaya Pemerintah Daerah Bekasi, 14 Oktober 1957.
ANRI: **Kempen 571014 FL 1-3**
136. Pembangunan kembali jembatan Leuwisapi (Daerah Nanjung) yang menghubungkan antara Cimahi dan Soreang, Bandung, 15 November 1958.
ANRI: **Djapenpro Djabar 581115 FP 1-107 / Da / Kab**

137. Gedung "Merdeka" tempat pemungutan suara ke II kembali ke UUD 1945 oleh Dewan Konstituante, Bandung, 2 Juni 1959.

ANRI: Djapenpro Djabar 590602 FP 40 b -59

BAB. IX IRIGASI

138. Denah saluran air ledeng yang berasal dari rawa Cibinong, 29 Januari 1801. 1 lembar

ANRI: F de Haan Nomor E. 22

139. Pusat tenaga air di Lumajang, Bandung Selatan, 23 September 1949.

ANRI: RVD 90823 FP 3-11

140. Pidato Presiden Soekarno pada peresmian pembukaan Instalasi penyaringan air Tjisangkuij, Bandung, 10 Oktober 1959. 3 lembar

ANRI: Pidato Presiden No. 121

141. Proyek Pembangunan Waduk Serba Guna Djatiluhur, 18 April 1965.

ANRI: Deppen 64-4156, Deppen 64- 4150

142. Amanat Presiden Soekarno pada waktu mengunjungi proyek Waduk Serba Guna Djatiluhur di Purwakarta, 19 September 1965. 3 lembar

ANRI: Pidato Presiden No. 803

BAB X PERTAMBANGAN

143. Resolusi untuk memutuskan Pemerintah Pusat Cq. Kementerian Perindustrian agar segera mengusahakan penggalan sumber-sumber minyak tanah di daerah Indramayu, 10 September 1957. 1 lembar

ANRI: Kabinet Presiden No.1676.

144. Pidato Presiden Soekarno pada pembukaan tambang mas di Cikotok Sukabumi, 12 Juli 1958. 5 lembar
ANRI: Pidato Presiden No. 012

BAB XI TRANSPORTASI

145. Grafik tentang biaya pekerjaan Stasiun Kereta Api jalur priangan-Cilacap, 1890
ANRI: Tzg.34429
146. Nota kepala Dinas Interlokal tentang organisasi Dinas Interlokal, 15 Mei 1925.
ANRI: Pos Telegraaf dan Telefoon No.45.
147. Surat tentang perhiasan gedung Kantor Pos besar di Bandung, lampiran denah, 9 Oktober 1931.
ANRI: Pos Telegraaf dan Telefoon No.45
148. Kantor Pos dan Telepon di Bandung, 27 Juli 1953.
ANRI: Djapenpro Djabar 530708 FP 2
149. Kantor Besar Pos di Bandung, 27 Juli 1953
ANRI: Djapenpro Djabar 530418 FP 7
150. Penyerderhanaan organisasi Pos Telegraaf dan Telefoon (PTT), 6 September 1935.
ANRI: Pos Telegraaf dan Telefoon No.30
151. Peraturan Pemerintah RI No.24 tahun 1984 tentang pendirian Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro, 4 September 1984
ANRI: PT Pos dan Giro No.11
152. Stasiun Kereta Api Bandung, 27 Juli 1953
ANRI: Djapenpro Djabar 530602 FP 19

153. Becak sebagai salah satu alat transportasi di kota Bandung, 1 Agustus 1953.
ANRI: **Kempen K. 530801 FP 2**
154. Pemandangan disekitar pelabuhan Cirebon dimana terlihat pangkalan kapal-kapal penarik sampan tempat kapal berlabuh, Cirebon, 14 November 1953.
ANRI: **Kempen 531114 FY 6**
155. Pesawat terbang Garuda Indonesia Airways sedang mendarat dilapangan terbang Andir, Bandung, 10 september 1949.
ANRI: **RVD 90910 FP 6**
156. Stasiun Kereta Api di Cirebon, 15 November 1953
ANRI: **Kempen 531115 FY 33**
157. Pemandangan di Cirebon dengan alat transportasi becak, dokar dan sepeda, Cirebon, 15 November 1953.
ANRI: **Kempen 531115 FY 67**

BAB XII KEAGAMAAN

158. Gereja di Depok, 14 Juni 1949.
ANRI: **RVD 90614 FJ 5**
159. Gereja Katolik Roma, Bandung, 27 Juli 1953.
ANRI: **Djapenpro Djabar 530418 FP 8**
160. Gereja Protestan, Bandung, 27 Juli 1953.
ANRI: **Djapnepro Djabar 530418 FP 9**
161. Masjid Agung di Sukabumi, 31 Agustus 1952.
ANRI: **Kempen 520831 FK 4-4**
162. Masjid Kanoman Cirebon, 15 November 1953.
ANRI: **Kempen 531115 FY 19**

163. Masjid Agung Bandung, 22 Juli 1957.
ANRI: [Kempen 570722 FP 2-1](#)
164. Presiden Soekarno sedang melaksanakan Sholat Idhul Adha di alun-alun Sukabumi, 31 Agustus 1952.
ANRI: [Kempen 520831 FK 25](#)
165. Perayaan hari Whu Chang oleh bangsa Tionghoa golongan Kuo Min Tang di Bandung, 10 Oktober 1953.
ANRI: [Djapenpro Djabar 531010 FP 1](#)
166. Renungan tahun baru 1990 di Paseban Tri Panca Tunggal Cigugur Kabupaten Kuningan Jawa Barat yang dilakukan oleh 80 orang anggota pemuda Hindu Indonesia Propinsi Jawa Barat, 17 Januari 1990. 4 lembar
ANRI: [Depag No.134](#)

BAB XIII KEBUDAYAAN DAN OLAH RAGA.

167. Pertunjukan Tari Kelana Sunda, Bandung, 31 April 1950
ANRI: [Kempen 500431 FP 1-1](#)
168. Orkes Angklung yang diselenggarakan oleh Badan Kesenian Indonesia, Bandung, 1 Februari 1951.
ANRI: [Kempen 51839](#)
169. Batu Tulis di Jawa Barat, 3 Januari 1952.
ANRI: [Kempen 520103 FG 1-9](#)
170. Gamelan Gong Sekati yang dibunyikan setiap tahun sekali di Kraton Kanoman, Cirebon, 17 Oktober 1953.
ANRI: [Kempen 531117 FY 47.](#)
171. Rombongan "Panjang Jimat" dari Kraton Kanoman menuju Masjid Agung, Cirebon, 19 Oktober 1953.
ANRI: [Kempen 531119 FY 19](#)

172. Gua Sunyaragi bekas peristirahatan Putri Tiongkok istri Sultan Cirebon diabad ke 16 (1570), Cirebon, 20 November 1953.
ANRI: Kempen 531120 FY 64.
173. Kereta Kencana peninggalan Sultan Cirebon Pertama dalam Gedung Jimat di Kraton Kasepuhan , Cirebon, 20 November 1953.
ANRI: Kempen 531120 FY 34
174. Seperangkat Gamelan Sunda untuk mengiringi pertunjukan tari di Gubernurnan, Bandung, 9 Mei 1955.
ANRI: Kempen 550509 FP 1-1
175. Wayang Golek merupakan salah satu cirri khas kesenian Jawa Barat, 20 Mei 1955.
ANRI: Kempen 550420 FP 2-2
176. Pidato Presiden Soekarno pada upacara pembukaan PON ke V di Bandung, 30 September 1961.
ANRI: Pidato Presiden No. 337
177. Presiden Soekarno pada upacara pembukaan PON ke V di Bandung, 30 September 1961.
ANRI: Kempen 610930 FP 3-3
178. Regu basket putri kontingen Jawa Barat berfoto sebelum bertanding pada PON ke V, 1 Oktober 1961.
ANRI: Kempen 611001 FP 6-2
179. Pendaftaran benda antik berusia 50 tahun bernama " Piring Cupang Sandang " disertai gambar, 23 desember 1976. 5 lembar
ANRI: Hamengkubuwono IX No. 775

BAB XIV LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMANDANGAN

180. Pemandangan Kawah Kamojang di Garut, 14 Juli 1949.
ANRI: RVD 90714 FR 1
181. Pemandian Salabintana, Sukabumi, 21 Juni 1950.
ANRI: Kempen 500621 FK 1
182. Gunung Tangkuban Perahu sedang mengeluarkan asap, Lembang, 15 Juli 1950.
ANRI: Kempen K. 500715 FP 1
183. Pemandangan dalam Kebun Raya Bogor, 27 Mei 1951.
ANRI: Kempen 7-25-3
184. Pemandangan air terjun di Maribaya, Bandung, 7 November 1958.
ANRI: Kempen 581107 FP 1
185. Laporan Asisten Residen Bogor tentang banjir Kali Ciliwung yang menghancurkan bendungan dan rumah-rumah, 1895
ANRI: Algemeene Secretarie AG No. 12619
186. Sebuah tanggul Kali Cimanuk di Desa Panjindangan Wetan, Kecamatan Sindang yang hancur diterjang air bah di Indramayu, 14 Desember 1957.
ANRI: Djapenpro Djabar 5712 14 FT 4-1 Da/ Kab
187. Rumah-rumah penduduk di Desa Panjindangan Wetan, Kecamatan sindang yang runtuh akibat banjir Kali Cimanuk di Indramayu, 14 Desember 1957.
ANRI: Djapenpro Djabar 571214 FT 3-1 /Da/Kab.

188. Pidato Presiden Soekarno pada Rapat umum Pemberian hadiah atas kemenangan kota Garut sebagai juara I dalam lomba kebersihan kota, 16 Desember 1960. 3 lembar

ANRI: Pidato Presiden No. 251

189. Bencana alam tanah longsor akibat hujan yang terus menerus di Sukabumi,
19 Januari 1965.

ANRI: Kempen 65-264.

Penutup

PENUTUP

Program Citra Daerah yang dikembangkan ANRI merupakan salah satu upaya memberdayakan daerah melalui arsip. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yakni meningkatkan peran daerah di berbagai bidang, termasuk bidang kearsipan.

Arsip sebagai salah satu sumber informasi yang terpercaya dapat menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan yang dialami pada masa lalu untuk diaplikasikan secara adaptif dan kontekstual dalam merencanakan pembangunan di daerah yang semakin kompleks.

"Citra Jawa Barat Dalam Arsip" diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan menyebarkannya kepada masyarakat umum, khususnya generasi muda.

Penyebarluasan ini sangat penting artinya karena dapat memberikan dorongan kepada masyarakat luas untuk mempelajari dan menggali lebih dalam lagi informasi mengenai penyelenggaraan kehidupan kebangsaan dalam lingkup daerah.

Pada gilirannya arsip dapat menjadi memori kolektif daerah yang berfungsi sebagai pemberi semangat dalam menumbuhkan rasa kebanggaan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.